

LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN I TAHUN 2021

BAPPEDA PROVINSI NTB TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan I tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi RKPD disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Provinsi NTB pada Triwulan I tahun 2021 berdasarkan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil capaian sasaran pembangunan daerah belum ada indikator yang memenuhi target, capaian program prioritas rata-rata sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Sementara itu, capaian kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2021.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Mei 2021

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si Pembina Utama Madya

NIP: 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, untuk mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan I tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 269 kegiatan dan 751 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.834.225.973.367,64 atau 51,26% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp.5.528.931.855.427.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil capaian kinerja dan anggaran pada triwulan 1 tahun 2021 dapat dideskripsikan bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut on the track. Adapun terkait 120 Program pembangunan daerah, terdapat 93 program yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya dan 17 indikator diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerjanya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Sementara itu, dari 281 Kegiatan yang ada pada 120 program, terdapat 155 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya. Adapun sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan, terdapat 390 Sub Kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi

i

kinerja dan keuangannya dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2021.

DAFTAR ISI

KATA PE	ENGANTAR Error! Bookmark not defined.
RINGKA	SANi
DAFTAR	ISIiii
BAB I :	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2 La	andasan Hukum2
1.3	Tujuan2
1.4	Sasaran
1.5	Sistimatika Penulisan Laporan
BAB II :	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN	20214
2.1 Tu	ujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 20214
2.2. A	rah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 20215
2.3	Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021 6
BAB III	PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN
DAERAH	1 DAERAH TAHUN 202110
BAB IV	: CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
TRIWUL	AN I30
4.1	Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada
Triwu	lan I Tahun 2021
4.2	Permasalahan
BAB V :	PENUTUP
5.1	Kesimpulan
5.2 I	Rekomendasi77

BABI: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. RPKD Tahun 2021 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan I tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
- 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui:

- 1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021;
- 2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
- 3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2021.

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistimatika penulisan laporan;
- Bab II: Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2021. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2021. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021.
- Bab IV: Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan I Tahun 2021. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2021 Triwulan I.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
- 2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
- 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
- 4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
- 5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
- 6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
- 7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
- 8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
- 9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
- 10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
- 2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- 3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
- 5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
- 6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
- 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
- 9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
- 11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- 12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
- 13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
- 14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
- 15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
- 16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
- 17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
- 18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
- 19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
- 20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
- 21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
- 22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
- 23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
- 24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- 25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
- 26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

- 1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi :
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
- 2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :

- a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
- b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.
- c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluk. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
- e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.
- 3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi:
 - a. Mengendalikan inflasi.
- 4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
 - a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
 - b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
 - e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu "Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah".

Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu:

- 1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah
- 2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
- 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- 5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
- 6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2021 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
1	Misi 1 NTB	Terwujudnya	Indeks Risiko			Point	123.11
	TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi	Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Bencana	Meningkatnya kapasitas dalam	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
	bencana dan pengembangan infrastruktur			penanggulangan bencana			
	serta	Terwujudnya	Indeks			Point	78.56
	wilayah antar	aksesibilitas antar wilayah untuk	Aksesibilitas	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95
		Pengembangan Sektor Unggulan		wilayah	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71
2	Misi 2 NTB	Terwujudnya	Indeks			Point	В
	BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi	pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
	birokrasi yang berintegritas, berkinerja	itas,		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41
	tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN	Terwujudnya pengelolaan	Indeks Kesehatan			Point	71.97
	CERDAS melalui peningkatan	kesehatan untuk SDM		Meningkatnya derajat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78
	kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi	yang berdaya saing		kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	31.49
	daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya	Harapan Lama	Point Tahun	62.39 13.68
		untuk SDM yang berdaya		kualitas dan jangkauan	Sekolah Rata rata Lama	Tahun	7.01
		saing		layanan pendidikan	Sekolah		7.02
4	Misi 4 NTB ASRI	Terwujudnya	Indeks			Point	67.72
	DAN LESTARI melalui	lingkungan hidup dan	Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya	Indeks Kualitas Air	Point	42.83
	pengelolaan sumber daya alam dan	pengelolaan persampahan yang bersih	Hidup (IKLH)	Dukung dan Daya Tampung	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53
	lingkungan yang berkelanjutan	dan berkelanjutan		Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas	Point	87.60 67.70
	-				Tutupan Lahan	ruiil	07.70

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
			Neraca pengelolaan			%	70.00
			sampah	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Persentase	%	50.00
					Pengurangan Sampah	70	20.00
5	Misi 5 NTB	Terwujudnya	Indeks Daya			Point	73.80
	SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,	pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Beli	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
	mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan			Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
	ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi			Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhinya pelayanan dasar	Cakupan Air Minum	%	76.48
				bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273
		Terwujudnya pariwisata	Pertumbuhan sektor			%	1.50
		yang dapat diandalkan	kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71
					rianari Pilitatii)	%	6.50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
		Terwujudnya perindustrian	Pertumbuhan Industri	Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39
		yang unggul	Industri	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30
6	Misi 6 NTB	Terwujudnya	Indeks			Point	14.85
	AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang	Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Kriminalitas	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
	beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan			Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
			Partisipasi			%	83.74
			politik masyarakat	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80
			Indeks			Point	59.81
			Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS Dan Program Unggulan daerah daerah tahun 2021

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2021 sebanyak 120 program dari 163 Program perangkat daerah sebagai berikut:

- 1. Program Penanggulangan Bencana
- 2. Program Penanganan Bencana
- 3. Program Penyelenggaraan Jalan
- 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- 5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- 6. Program Pengelolaan Pelayaran
- 7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 9. Program Penyelenggaran Pengawasan
- 10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- 11. Program Pengelolaan
 - Keuangan Daerah
- 12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 15. Program Penataan Organisasi
- 16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
- 17. Program Kepegawaian Daerah
- 18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 19. Program Pendaftaran Penduduk
- 20. Program Pencatatan Sipil
- 21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 28. Program Pembinaan Perpustakaan
- 29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
- 30. Program Pelayanan Penghubung
- 31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 35. Program Pengelolaan Pendidikan
- 36. Program Pengembangan Kurikulum
- 37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
- 40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- 42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- 47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 50. Program Pengelolaan Hutan
- 51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- 52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
- 53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
- 54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 55. Program Pengelolaan Persampahan
- 56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 57. Program Promosi Penanaman Modal
- 58. Program Pelayanan Penanaman Modal
- 59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 64. Program Penyuluhan Pertanian
- 65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 66. Program Pengelolaan Hutan

- 67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
- 71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 73. Program Rehabilitasi Sosial
- 74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- 76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- 81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- 82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- 83. Program Pengembangan Perumahan
- 84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- 85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 86. Program Pengembangan Ekspor
- 87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 91. Program Pemasaran Pariwisata
- 92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- 95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- 98. Program Pengembangan Umkm
- 99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 100. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 101. Program Hubungan Industrial
- 102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 105. Program Kesejahteraan Rakyat
- 106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- 107. Program Pengembangan Kebudayaan
- 108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 109. Program Pembinaan Sejarah
- 110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- 112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
- 113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 116. Program Perlindungan Perempuan
- 117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- 119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- 120. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun Program prioritas dan program unggulan daerah yang dipetakan berdasarkan prioritas daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi :

- a. Mitigasi bencana.
- b. Infrastruktur dasar.
- c. Infrastruktur kawasan.
- d. Konektivitas wilayah.
- e. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain: Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Benderang.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik , dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain: eNTeBe Plan, NTB SDGs *centre, Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, e-Samsat, Samsat Delivery, Bale Mediasi, Kampung Madani, Kampung Media, Sekolah Perjumpaan, NTB Satu Data, Satu Peta, Sakip level A, NTB *care*, Kota Layak Anak, Ramah *Difable*, Manajemen Talenta dan Agen Perubahan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan

- c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitaslisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi

:

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB *Zero Waste*, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.

5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan investor sektor riil
- c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan, Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.

6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
- c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
- d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, , Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran Pembangunan Pada Tahun 2021

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targo	et 2021	Perangkat Daerah	
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MAI konektivitas wilayah	NTAP melalui penguatan n	nitigasi benca	na dan pengen	nbangan infrastr	uktur serta	
Tujuan 1:	Indeks Risiko	Point	123.11	1		
Terwujudnya Ketangguhan	Bencana	rome	125.11			
Menghadapi Resiko Bencana	Delicalia					
	Tudoka Kanasitas	Point	0.61			
Sasaran:	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61			
Meningkatnya kapasitas	Daeran					
dalam penanggulangan						
bencana						
PROGRAM PENANGGULANGAN	Persentase	%	25.48	4,159	Pelaksana Badan	
BENCANA	terbentuknya DESTANA				Penanggulangan	
	dan SMAB				Bencana Daerah	
					Provinsi NTB	
	Persentase	%	44.69			
	terlaksananya Renkon,					
	Respon Cepat PDB,					
	Pencarian Pertolongan					
	Evakuasi Korban,					
	Jitupasna					
PROGRAM PENANGANAN	Cakupan Penanganan	%	100	2,446	Dinas Sosial	
	Bencana Daerah	70	100	2,440	Dillas Sosiai	
BENCANA						
	Provinsi					
Tujuan 2:	Indeks Aksesibilitas	Point	78.56			
Terwujudnya aksesibilitas						
antar wilayah untuk						
Pengembangan Sektor						
Unggulan						
Sasaran 1:	Persentase	%	83.95			
Meningkatnya pembangunan	Kemantapan jalan					
infrastruktur layanan dasar	. ,					
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Jaringan jalan Provinsi	%	83.95	255,582	Dinas Pekerjaan Umum	
JALAN	dalam Kondisi Mantap				dan Penataan Ruang	
Sasaran 1:	Persentase	%	50.04		aan raaan raang	
Meningkatnya pembangunan	Kemantapan Sistem	70	30.04			
	Irigasi					
infrastruktur layanan dasar PROGRAM PENGELOLAAN		0/	74.55	172 161	D'an Dala tana Haran	
	Persentase Kenaikan	%	74.55	172,161	Dinas Pekerjaan Umum	
SUMBER DAYA AIR (SDA)	Areal Layanan Irigasi				dan Penataan Ruang	
Sasaran 2:	Persentase	%	81.71			
Meningkatnya konektivitas	konektivitas					
antar wilayah	transportasi publik					
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Sarana	%	50.83	4,436	Dinas Perhubungan	
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	transportasi darat dalam					
JALAN (LLAJ)	kondisi baik					
	Persentase Prasarana	%	94.37			
	transportasi darat dalam					
	kondisi baik					
	Persentase Prasarana	%	30			
	terminal dalam kondisi	-70	30			
	baik		10.0-			
	Persentase tersedianya	%	46.20			
	Fasilitas Keselamatan					
	Jalan dalam kondisi baik					
PROGRAM PENGELOLAAN	Sarana dan prasana	%	59.39		Dinas Perhubungan	
PELAYARAN	transportasi Laut dalam			564		
	kondisi baik					
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAY	YANI melalui transformasi	i birokrasi yan	g berintegrita:	s, berkinerja ting	gi, bersih dari KKN	
dan berdedikasi		•	-			
Tujuan 1:	Indeks Reformasi	Point	В			
- · ·		-	-			
Terwujudnya nemerintahan	Birokrasi					
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan	Birokrasi					

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targe	et 2021	Perangkat Daerah	
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab	
Sasaran 1 :	Opini BPK	Status	WTP			
Meningkatnya akuntabilitas						
kinerja dan keuangan daerah						
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase ketepatan	%	100	711,669	Badan Pengelolaan	
KEUANGAN DAERAH	waktu penetapan			. ==,	Keuangan dan Aset	
	APBD/APBDP dan				Daerah	
	pertanggungjawaban				Bacian	
	pelaksanaan APBD					
	Provinsi					
	Persentase ketepatan	%	100	1,050		
	waktu Evaluasi	70	100	1,030		
	APBD/APBDP dan					
	pertanggungjawaban					
	pelaksanaan APBD					
	Kabupaten/ Kota					
DDOCDAM DENCELOLAAN		%	60	1 777	Badan Pengelolaan	
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase pengelolaan	%	60	1,777	1	
BARANG MILIK DAERAH	BMD pada PD yang				Keuangan dan Aset	
	akurat dan akuntabel				Daerah	
PROGRAM PENYELENGGARAN	Persentase Penyelesaian	%	80	1,079	INSPEKTORAT	
PENGAWASAN	Tindak Lanjut Hasil					
	Pengawasan pada PD					
	Persentase Penurunan	%	40	2,119		
	Nilai Kerugian Perangkat					
	Daerah					
PROGRAM PERUMUSAN	Persentase Peningkatan	%	5.55		INSPEKTORAT	
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	Nilai Unsur Pembentuk			397		
DAN ASISTENSI	SPIP					
	Persentase Penyelesaian	%	95	1,571		
	Pengaduan Masyarakat					
	tepat waktu					
Sasaran 2:	Persentase	%	35.41			
Meningkatnya Pendapatan	Kontribusi PAD					
Asli Daerah	terhadap APBD					
PROGRAM PENGELOLAAN	Derajat Desentralisasi	%			Badan Pengelolaan	
KEUANGAN DAERAH	Fiskal		35.20	528	Pendapatan Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase PAD	%	33.23	14,608	Badan Pengelolaan	
PENDAPATAN DAERAH	Terhadap Pendapatan	70	50.12	11,000	Pendapatan Daerah	
FENDALATAN DALKAH	Daerah (diluar DAK)		50.12		rendapatan Daeran	
Sasaran 3:	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 -			
Meningkatnya Kualitas	Mildi SARIP	Kategori	76,00)			
- -			76,00)			
Akuntabilitas Kinerja						
Instansi Pemerintah	0 1 11 11 5 1 1	2/	100	4.224	5 . 5	
PROGRAM PERENCANAAN,	Cakupan Hasil Evaluasi	%	100	4,234	Badan Perencanaan	
PENGENDALIAN DAN	yang dimanfaatkan				Pembangunan,	
EVALUASI PEMBANGUNAN	dalam Perencanaan				Penelitian dan	
DAERAH	Pembangunan				Pengembangan Daerah	
PROGRAM KOORDINASI DAN	Persentase Keselarasan	%	100	11,089	Badan Perencanaan	
SINKRONISASI PERENCANAAN	Program Renja				Pembangunan,	
PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah				Penelitian dan	
	dengan RKPD				Pengembangan Daerah	
	Persentase PD yang	%	84.44		INSPEKTORAT	
PROGRAM PENYELENGGARAN	Meningkat Nilai			827		
PENGAWASAN	Implementasi SAKIP-					
	nya					
PROGRAM PERUMUSAN	Persentase PD yang	%	17,77		INSPEKTORAT	
				717		
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	menerapkan ZI menuju			/1/		
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	menerapkan ZI menuju WBK/WBBM			,1,		
•		%	80	1,148	Biro Organisasi	
DAN ASISTENSI	WBK/WBBM	%	80		Biro Organisasi	

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targ	et 2021	Perangkat Daerah	
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	2,834	Biro Pemerintahan	
Sasaran 4:	Indeks	Point	0.68			
Meningkatnya	Profesionalisme ASN					
Profesionalisme ASN						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	6,500	Badan Kepegawaian Daerah	
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80			
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88			
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132			
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16			
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,446	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.03			
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.13			
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.55			
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pendududk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,70	243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	15	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media	%	60	4,644	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targ	et 2021	Perangkat Daerah
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
	Pelayanan Informasi				
	Komunikasi Publik (%)				
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Layanan	%	45	1,707	Dinas Komunikasi,
APLIKASI INFORMATIKA	Berbasis TIK (%)				Informatika dan
					Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Ketersediaan	%	20		Dinas Komunikasi,
STATISTIK SEKTORAL	Data yang Terintegrasi			420	Informatika dan
	(%)				Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase	%	30		Dinas Komunikasi,
PERSANDIAN UNTUK	Penyelenggaraan			409	Informatika dan
PENGAMANAN INFORMASI	Persandian untuk				Statistik
	Pengamanan				
	Informasi pada				
	Perangkat Daerah (%)				
PROGRAM PERENCANAAN	Persentase kab/ kota	%	75	0.5	Dinas Tenaga Kerja dan
TENAGA KERJA	yang menyusun rencana			85	Transmigrasi
	tenaga kerja				
PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Peningkatan	%	100	077	Dinas Perpustakaan dan
PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengembangan			977	Kearsipan
	Budaya Baca dan				
	Pembinaan				
PROGRAM PELESTARIAN	Perpustakaan	%	100		Dinas Damustakaan dan
KOLEKSI NASIONAL DAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr	90	100	179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
NASKAH KUNO	Dan Naskah Kuno Milik			1/9	Rearsipari
NASKATI KUNU	Daerah				
PROGRAM PELAYANAN	Angka kunjungan	Orang			
PENGHUBUNG	wisatawan pada	Orang			Badan Penghubung
TENGRODONG	Anjungan NTB TMII				Daerah
	(orang)				Ducium
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDA	` ",	alitas sumber	dava manusia	sebagai pondasi	dava saing daerah
Tujuan 3:	Indeks Kesehatan	Point	71.97		
=					
Terwujudnya pengelolaan					
Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang					
kesehatan untuk SDM yang	Angka Harapan	Tahun	66.78		
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78		
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1:		Tahun	66.78		
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat		Tahun	66.78		
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi		Tahun %	66.78	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Hidup			150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Hidup Persentase fasilitas			150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		85	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan			150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	85 97	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang	%	85	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana	%	85 97	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat	%	85 97	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai	%	85 97	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	97 65	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan	%	85 97	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang	%	97 65	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan	%	97 65	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi	%	97 65	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	% %	97 65	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase kab/kota	%	97 65	150,430	Dinas Kesehatan
kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	% %	97 65	150,430	Dinas Kesehatan

Calcular	Mici/Tuiuan/	Indikator Kinerja		Targ	et 2021	Perangkat Daerah	
Stander minimal 80% Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesual standar Persentase Rualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesual standar Persentase Railitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional PROGRAM PENINKIKATAN RAPASTIAS SUMBER IAYA KAPASTIAS IAYA KAPASTI	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program		Satuan	Target	Rp. (Juta)	_	
Persentase Kualitas Lingkungan yang memenahi syarat sesual standar Persentase faelitas pelayanan keshatan yang menganakan obta rasional PROGRAM PENINGKATAN Resentatan obta rasional pelayanan keshatan yang menganakan obta rasional PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Persentase SDM MANUSIA KESHATAN PENGRAMSAN DAN MESHATAN PERORANGAN DAN MEMBANAKAT BIDAN MESHATAN PERORANGAN DAN MEMBANAKAT BIDANG MEMBANAKAT BIDANG MEMBANAKAT BIDANG MESHATAN PERORANGAN DAN MESHATAN PERORANGAN DAN MEMBANAKAT BIDANG MEMBANAKATANAKAT BIDANG MEMBANAKAT BIDANG MEMBANAKATANAKAT BIDANG MEMBANAKAT BIDANG MEMBANAKATANAKAT BIDANG ME		tidak menular sesuai					
Lingkungan yang memenuh syarat sesual standar Persentase Failinas pelayanan kesehatan yang mengamakan obat rasional pelayanan kesehatan yang mengamakan obat rasional pelayanan kesehatan yang mengamakan obat rasional pelayanan kesehatan yang ditingkatkan kapastasnya persentase Sama ditingkatkan kapastasnya persentase Sarana karamasian dan alat kesehatan yang menenuhi syarat (Persentase Sarana karamasian dan alat kesehatan yang menenuhi syarat (Persentase SPM yang menenuhi syarat (Persentase SPM yang menenuhi syarat (Persentase SPM yang menapahi saratan PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN upaya kesehatan yang sentangan pendidikan untuk SPM yang merapai target (Persentase SPM yang Masyarakatan (Persentase Balita (Persent		standar minimal 80%					
Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Faelitas % 1.00 pelayanan kesehatan yang mengunakan yang melakananan yang melaka							
Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Faelitas % 1.00 pelayanan kesehatan yang menganakan obat rasional 76.1 pelayanan kesehatan yang menganakan obat rasional 76.1 pelayanan kesehatan yang menganakan obat rasional 76.1 pelayanan kesehatan yang 76.1 persentase SDM % 2 76.1 persentase SDM % 76.1 persentase SDM % 30 30 persentase Sarana % 30 32 persentase Sarana % 30 32 persentase Sarana % 32 persentase Sarana % 32 persentase SPM yang % 83 52,458 persentase SPM yang % 83 52,458 persentase SPM yang % 73.81 7,479 persentase SPM yang % 75.00 36,664 persentase SPM yang % 75.00							
menenuhi syarat sesual standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional PROGRAM PENINCKATAN PENINCKATAN (Seshatan yang ditingkalkan kapasitasnya Persentase SDM (Seshatan yang ditingkalkan kapasitasnya Persentase SDM (Seshatan yang ditingkalkan kapasitasnya Persentase Sarana (Persentase Sarana kesehatan NAKARANA MINUMAN (Persentase SPM yang kesehatan yang menapai target (Persen) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA (KESHATAN PENORANGAN DAN UPAYA KESHATAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN PENORANGAN P			%	94			
Standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mengunakan obat rasional Persentase SDM Sub rasional Persentase Sub rasional Persentase SDM Sub rasional Persentase Sub rasional Persentase SDM Sub rasional Persentase SDM Sub rasional Persentase SDM Sub rasional Persentase Persentase Sub rasional Pers							
Persentase fasilitäs pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan obat rasional Persentase SDM yang menggunakan obat rasional Persentase SDM 9% 2 Dinas Kesehatan Persentase SDM 9% 2 Dinas Kesehatan Manusiak KESEHATAN Akseshatan yang dinipkatkan kapasitasnya Persentase Sarana kesehatan Makayaan Minuman Mi							
pelayanan kesehatan yang menggunakan obot rasional ROGRAM PENINGKATAN PERSENTASE SUMBER DAYA KESEHATAN kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase SDM % 2 761 Dinas Kesehatan Alaya ditingkatkan kapasitasnya Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan NAAANAN MINIUMAN KESEHATAN DAN Kefarbatian dan alat kefarmasian dan alat kefarmasian dan alat kefarbatian dan dan dan dan dan dan dan dan dan d							
PROGRAM PENINGKATAN ARPASTIAS SUMBER DAYA KRAPASTIAS SUMBER DAYA KRA			%	100			
Obet rasional PROGRAM PENINGKATAN RAPASITIAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KRAPASITIAS DAN KRAPASITIAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KRAPASITIAS DAN KRAPASITIAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MAKANAN MINUMAN MESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Me							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KAPASITAS SUMBER DAYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESPHATAN PROGRAM SEDIAAN FABMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMERDAYAN PROGRAM PEMERD							
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MANUSIA KESEHATAN MAKSIAKANAN MINUMAN Kefamasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapal target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapal target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Stunting Meningkatnya derajat Kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Stunting Meningkatnya Mengelolaan Masyarakata PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Kab/Kota yang meleksanakan KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Kab/Kota yang meleksanakan Masyarakata PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Kab/Kota yang meleksanakan Masyarakata PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PErsentase Kab/Kota yang melaksanakan Masyarakata PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PErsentase Kab/Kota Yang melaksanakan Masyarakata PROGRAM PEMERUHAN UPAYA MUtiara Sukma Masharakata Manunda Matakata M							
MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Dinas Kesehatan Masyarakat Persentase Balita Stunting Sasaran 1: Persentase Balita Stunting Persentase Balita Stunting Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan			%	2		Dinas Kesehatan	
RESEHATAN PERORAMSAI DAN MAKANAN MINUMAN RESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target PERSENTAN PERORAMSAI DAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target PERSENTAN PERORAMSAI DAN MASYARAKAT PERSENTAN PERORAMSAI DAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT PERSENTAN PERORAMSAI DAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT MENDIGAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT MEDIGAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT MEDIGAKATAN BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT MEDIGAKATAN BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MASYARAKAT BIDANG MEDIGAKATAN MEDIGAKATAN MA		, ,			761		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN keramasian dan alat kershatan yang memenuhi syarat (Persen) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROKANGAN DAN UPAYA KESHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Stunting Sunting Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Persentase Balita Wasting Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) Indeks Pendidikan Point Farwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan ProGRAM PEMEGLOLANN PROGRAM PEMEGLOLANN Persentase Angka Persentase Ang	MANUSIA KESEHATAN						
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Stunting Persentase Rajkota yang melaksanakan Germas (Persen) Tahun Sakakata Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/SMK/MK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/SMK/MK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Kurni (APM) Persentase PM yang		<u> </u>					
MAKANAN MINUMAN kesehatan yang memenuhi syarat (Persen) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA (ESESHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESHATAN PER	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,	. di sciitase sai ai a	%	30		Dinas Kesehatan	
memenuhi syarat (Persen) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan Wasting Persentase Kabi/Kota % 50 1,228 Dinas Kesehatan Wasting Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Pendidikan Pendidikan Perorama Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	ALAT KESEHATAN DAN				32		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase SPM yang mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESHATAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PERORANGAN PENGELOLAAN PENGELO	MAKANAN MINUMAN						
RCGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Persentase Capalan elemen akreditasi sesuai standar Persentase Capalan elemen akreditasi sesuai standar PEROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Persentase Balita Sasaran 1: Persentase Balita Stunting Sasaran 1: Persentase balita Wasting Persentase balita Wasting Persentase balita Wasting Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Marapan Lama Sekolah Persontase Angka Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)		memenuhi syarat					
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Manambai Abdulkadir Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Manambai Abdulkadir Persentase SPM yang mencapai target Persentase Balita Stunting Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Persentase Mayang May		` '					
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Stunting Persentase balita Wasting Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) Tujuan 2: Tervujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Persentase Angka Persent	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase SPM yang	%	83	52,458	Rumah Sakit Umum	
MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase SPM yang mencapai target Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT Persentase balita Wasting Persentase balita Wasting Persentase kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Perogram PEMEGLOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERORALOR PERORAL	KESEHATAN PERORANGAN DAN	mencapai target				Daerah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Persentase Balita Stunting Dinas Kesehatan Wasting Dinas Kesehatan Din	UPAYA KESEHATAN						
Mutiara Sukma Mercapai target Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PENGRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENGRELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Mutiara Sukma Men 80 80 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 81	MASYARAKAT						
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar Persentase SPM yang mencapai target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PENGRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE Balita Stunting Dinas Kesehatan Tahun Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Dinas Kesehatan Tahun T	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase SPM yang	%	73.81	7,479	Rumah Sakit Jiwa	
MASYARAKAT Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masayarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Germas (Persen) Tujuan 2: Tujuan 2: Tujuan 2: Tujuan 2: Tirwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Pertisipasi Murni (APM) Persentase Angka Pertisipasi Murni (APM)	KESEHATAN PERORANGAN DAN	mencapai target				Mutiara Sukma	
Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Fersentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Wasting Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Wasting Persentase Balita Stunting Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PEMBEDOLANAN Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Germas (Persen) Tahun Sekolah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Sekolah PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Persentase Salita Pro. 31.49 Pro. 31.49 Persentase Sali	UPAYA KESEHATAN						
elemen akreditasi sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Persentase Balita Persentase Balita Stunting Persentase balita Wasting Persentase balita Persentase balita Wasting Persentase balita Point 12.41 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Point 62.39 Dinas Kesehatan Point 62.39 Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan pangkauan layana pendidikan Persentase Angka Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	MASYARAKAT						
Standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEMORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEMORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN PEMORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Germas (Persen) Tujuan 2: Tujuan 2: Turwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan pendidikan Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Germas (Persen) Tahun Tahu		Persentase Capaian	%	80			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Balita Stunting Persentase Angka Persentase Angka Persentase Angka Persentase Angka Persentase Angka Persentase Angka Partisipasi Murmi (APM) Persentase Angka Partisipasi Murmi (APM)		elemen akreditasi sesuai					
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT mencapai target Manambai Abdulkadir Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat Persentase Balita Stunting % 31.49 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase balita Wasting 12.41 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) 50 1,228 Dinas Kesehatan Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Indeks Pendidikan Point 62.39 Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Sekolah Tahun Tahun T.01 13.68 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Persentase Angka Perusipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 7.01 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perusipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) 99,15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		standar					
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MESHATAN MESHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase SPM yang	%	75.00	36,664	Rumah Sakit H. L.	
MASYARAKAT Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTIAS Angka Persentase Angka Persenta	KESEHATAN PERORANGAN DAN	mencapai target				Manambai Abdulkadir	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PRESENTASE Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	UPAYA KESEHATAN						
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat Stunting PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PASYARAKAT Persentase balita % 12.41 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) % 50 1,228 Dinas Kesehatan Tujuan 2: Indeks Pendidikan Point Germas (Persen) 62.39 Fersentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) Fersentase Angka Pendidikan Point Germas (Persen) 62.39 Fersentase Angka Pendidikan Point Germas (Persen) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Pendidikan Persentase Angka Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun Tahun T.01 7.01 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) % 93,40 P93,40	MASYARAKAT						
kesehatan dan gizi masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERCRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERCRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERCRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Kab/Kota wang melaksanakan yang melaksanakan germas (Persen) % 12.41 Dinas Kesehatan TPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kab/Kota wang melaksanakan germas (Persen) % 50 1,228 Dinas Kesehatan Tujuan 2: Indeks Pendidikan Point 62.39 Ferwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Fersentase Angka Tahun 13.68 Fersentase Angka Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Fata rata Lama Sekolah Tahun 7.01 Fersentase Angka PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSELOLAAN PARTISIPASI Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sasaran 1:	Persentase Balita	%	31.49			
masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase balita Wasting % 12.41 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Germas (Persen) Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen) % 50 1,228 Dinas Kesehatan Tujuan 2: Indeks Pendidikan Point Point Prewujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Fesana 1: Harapan Lama Sekolah Tahun Pathan Pathan Pathan Pendidikan Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Tahun Pendidikan Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 7.01 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) % 93,40 93,40 93,40	Meningkatnya derajat	Stunting					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase balita % 12.41 % 12.41 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Polit 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Tahun 7.01 Farbun 7.01 F	kesehatan dan gizi						
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POINT Tahun Tahun T.01 Sekolah Tahun T.01 Sekolah POINT Tahun T.01 Sekolah PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PROGRAM PENGELOLAGN PERSENTASE Angka Partisipasi Murni (APM)	masyarakat						
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTAS ANGKA PArtisipasi Murni (APM) Dinas Kesehatan **O **O **O **O **O **O **O *	•	Persentase balita	%	12.41		Dinas Kesehatan	
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTAS ANGKA PArtisipasi Murni (APM) Dinas Kesehatan **O **O **O **O **O **O **O *	KESEHATAN PERORANGAN DAN	Wasting					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase Kab/Kota % 50 1,228 Dinas Kesehatan 62.39 Tahun 13.68 Sekolah 7.01 Tahun 7.01 Persentase Angka % 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5					
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Masyaraka (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Tahun 7.01 Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Patisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	MASYARAKAT						
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Masyaraka (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Tahun 7.01 Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Patisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Kab/Kota	%	50	1.228	Dinas Kesehatan	
KESEHATAN Germas (Persen) Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PROSRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Tahun 7.01 Point 62.39 Tahun 13.68 Sekolah Pathan 13.68 Sekolah Pathan 1					1,220	Dirias ressertatar.	
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Point 62.39 Tahun 13.68 Tahun 7.01 Fata rata Lama 7.01 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Fata rata Lama Fata rata Lama Fatisipasi Murni (APM)		, ,					
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Harapan Lama Tahun 13.68 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Sekolah PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 7.01 ### 13.68 ### 13.6			Point	62.39			
pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Sasaran 1: Harapan Lama Tahun 13.68 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	=		· Omit	02.00			
Berdaya saing Tahun 13.68 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Rata rata Lama Sekolah Tahun 7.01 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) % 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan % 93,40							
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Pathun Tahun 7.01 7.01 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan 7.01 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	· -						
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Sekolah Tahun 7.01 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C % 99.15 473,403 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) % 93,40 93,40		Haranan Lama	Tahun	13.68			
jangkauan layanan pendidikanRata rata Lama SekolahTahun7.01PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKANPersentase Angka 		-	ianun	15.55			
pendidikanSekolah99.15473,403Dinas Pendidikan dan KebudayaanPENDIDIKANPartisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket CSMA/SMK/MA/Paket CKebudayaanPersentase Angka Partisipasi Murni (APM)% 93,40			Tahun	7 01			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pensentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)			ianuli	7.01			
PENDIDIKAN Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Rebudayaan Kebudayaan Kebudayaan	•		0/2	00.15	472 402	Dinas Pondidikan dan	
SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka % 93,40 Partisipasi Murni (APM)		_	70	33.13	4/3,403		
Persentase Angka % 93,40 Partisipasi Murni (APM)	I FIADIDII/VII	, , ,				Rebuuayaan	
Partisipasi Murni (APM)		<u> </u>	0/-	02.40			
		_	70	93,40			
		SMA/SMK/MA/Paket C					

Misi/Tuiuan/	Indikator Kinerja		Targe	et 2021	Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
	Persen Angka Pastisipasi	%	96.68		
	Sekolah (APS)				
	Pendidikan Menengah				
	Persen Angka Partisipasi	%	69.4		
	Kasar (APK) SLB	0/	1 21		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk	%	1.01		
	usia sekolah pendidikan				
	menengah				
	Ratio Guru terhadap	%	1:18		
	Murid Pendidikan				
	Menengah,				
	Rasio Guru terhadap	%	1:14		
	Murid per kelas rata-				
	rata untuk SLB,				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase	%	100		Dinas Pendidikan dan
KURIKULUM	Pengembangan			568	Kebudayaan
	Kurikulum		100		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru	%	100	66,961	Dinas Pendidikan dan
TENAGA KEPENDIDIKAN	SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi				Kebudayaan
	S1/DIV				
	Persentase Guru SMK	%	99.55		
	yang memenuhi	,,	33.33		
	Kualifikasi S1/DIV				
	Persentase Kepala	%	70		
	Sekolah bersertifikat				
	Persentase Pengawas	%	50		
	Sekolah bersertifikat				
	Nilai Uji Kompetensi		5.5		
	Guru (UKG)				
PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase	%	100		Dinas Pendidikan dan
PERIZINAN PENDIDIKAN	Pengendalian Perizinan Pendidikan			61	Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase bahasa dan	%	35		Dinas Pendidikan dan
BAHASA DAN SASTRA	sastra yang	70	33	200	Kebudayaan
DATE OF THE STATE	dikembangkan			200	Rebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentase Pembinaan	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan
KAPASITAS DAYA SAING	Pemuda Berprestasi			ĺ	Olahraga
KEPEMUDAAN					
	De control De control	%	100		
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang	%	100		
	Bersertifikat				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentase Pembinaan	%	100	8,846	Dinas Pemuda dan
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Altlet Berprestasi	: -		5,5.5	Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI		ber daya alan	ı dan lingkunga	n yang berkelan	jutan
Tujuan 1:	Indeks Kualitas	Point	67.72		
Terwujudnya lingkungan	Lingkungan Hidup				
hidup dan pengelolaan	(IKLH)				
persampahan yang bersih					
dan berkelanjutan					
Sasaran 1:	Indeks Kualitas Air	Point	42.83		
Meningkatnya Kualitas,	Indeks Kualitas	Point	87.53		
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Udara Indeks Kualitas Air	Point	87.60		
rampung Emgkungan muup	Laut	Point	87.00		
	Persentase dokumen	%	51.52		Dinas Lingkungan
PROGRAM PERENCANAAN	, s. ss. itase donarileii	,0	J J -	1	Zac Enighangan
LINGKUNGAN HIDUP	perencanaan lingkungan			319	Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targe	et 2021	Perangkat Daerah	
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab	
PROGRAM PENGENDALIAN	Cakupan lokasi yang	lokasi	10		Dinas Lingkungan	
PENCEMARAN DAN/ATAU	dikendalikan			882	Hidup dan Kehutanan	
KERUSAKAN LINGKUNGAN	pencemaran dan					
HIDUP	kerusakannya				5: 1: 1	
PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan taman	lokasi	1	24	Dinas Lingkungan	
KEANEKARAGAMAN HAYATI	kehati Pulau Lombok			24	Hidup dan Kehutanan	
(KEHATI)	dan Pulau Sumbawa		210		Birry I'm I was	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Jumlah unit usaha yang dikendalikan	unit	210	23	Dinas Lingkungan	
BERACUN (B3) DAN LIMBAH	pengelolaan B3 dan			23	Hidup dan Kehutanan	
BAHAN BERBAHAYA DAN	limbah B3 nya					
BERACUN (LIMBAH B3)	iiiiibaii b5 iiya					
PROGRAM PEMBINAAN DAN	Jumlah pelaku usaha	usaha/	20		Dinas Lingkungan	
PENGAWASAN TERHADAP IZIN	dan/atau kegiatan yang	kegiatan	20	188	Hidup dan Kehutanan	
LINGKUNGAN DAN IZIN	taat terhadap dokumen	Regiatari		100	Thatp dan Kenatahan	
PERLINDUNGAN DAN	lingkungan					
PENGELOLAAN LINGKUNGAN	gaga					
HIDUP (PPLH)						
PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya kapasitas	%	10		Dinas Lingkungan	
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	sekolah peduli			197	Hidup dan Kehutanan	
PENYULUHAN LINGKUNGAN	lingkungan					
HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
PROGRAM PENGHARGAAN	Meningkatnya kapasitas	kelompok	0		Dinas Lingkungan	
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	kelompok masyarakat			-	Hidup dan Kehutanan	
MASYARAKAT	,					
PROGRAM PENANGANAN	Jumlah Penanganan	Pengaduan	20		Dinas Lingkungan	
PENGADUAN LINGKUNGAN	Pengaduan Lingkungan	3		200	Hidup dan Kehutanan	
HIDUP	Hidup					
Sasaran 1:	Indeks Kualitas	Point	67.70			
Meningkatnya Kualitas,	Tutupan Lahan					
Daya Dukung dan Daya						
Tampung Lingkungan Hidup						
PROGRAM PENGELOLAAN	Prosentase luas	%	67	19,206	Dinas Lingkungan	
HUTAN	kawasan hutan yang				Hidup dan Kehutanan	
	dilindungi					
	Peningkatan presentase	%	10.00		Dinas Lingkungan	
	kawasan hutan yang di				Hidup dan Kehutanan	
	kelola					
PROGRAM KONSERVASI SUMBER	Cakupan kawasan	ha	30,503		Dinas Lingkungan	
DAYA ALAM HAYATI DAN	konservasi kewenangan			885	Hidup dan Kehutanan	
EKOSISTEMNYA	provinsi yang					
	terlindungi					
PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase KTH yang	%	13.27		Dinas Lingkungan	
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	meningkat kelasnya			661	Hidup dan Kehutanan	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
DI BIDANG KEHUTANAN	Doninglester for the	DAC	4.00	4 440	Dinne Line Lune 1	
PROGRAM PENGELOLAAN	Peningkatan fungsi dan	DAS	4.00	4,449	Dinas Lingkungan	
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	daya dukung wilayah				Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN	DAS prioritas Persentase Kesesuaian	%	89.07		Dinas Pokoriaan Um	
PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70	09.07	681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
I LIVATAAN KUANU	i cilialilaatali Kudily			001	uan renataan Kuany	
Tujuan 1 :	Neraca pengelolaan	%	70.00			
Terwujudnya lingkungan	sampah (%)	/6	70.00			
	Sampan (70)					
hidup dan pengelolaan	i		Ì			
hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih						
persampahan yang bersih						
· · · ·	Persentase	%	50.00			
persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00			

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targe	et 2021	Perangkat Daerah
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
	Persentase	%	20.00		
	Pengurangan	, ,	20.00		
	Sampah				
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase pengelolaan	%	70	4,823	Dinas Lingkungan
PERSAMPAHAN	sampah	70	, 0	1,023	Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MA	· ·	ulangan kemisl	cinan, mengur	 angi kesenjanga	
ekonomi inklusif bertumpu pad		-		ang kesenjanga	n, dan pertambahan
Tujuan 1:	Indeks Daya Beli	%	73.80		
Terwujudnya pertumbuhan	(Point)		70.00		
agribisnis dan investasi yang	(* ******)				
berkualitas					
Sasaran 1:	Nilai Realisasi	Rp. Milyar	13,362		
Meningkatnya Investasi,	Investasi				
kerjasama pemerintah dan					
badan usaha, serta					
kemudahan perizinan					
PROGRAM PENGEMBANGAN	Perentase Peningkatan	Persen	3		Dinas Penanaman
IKLIM PENANAMAN MODAL	Minat Investasi		_	493	Modal dan Pelayanan
					Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI	Persentase Cakupan	Persen	100		Dinas Penanaman
PENANAMAN MODAL	Promosi Penanaman	. 5.55	100	715	Modal dan Pelayanan
	Modal				Terpadu Satu Pintu
	Persentase Capaian	Persen	87		Dinas Penanaman
PROGRAM PELAYANAN	Layanan Perizinan dan	. 5.55	0,	531	Modal dan Pelayanan
PENANAMAN MODAL	Non Perizinan			331	Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN	Rasio Realisasi Investasi	Persen	50		Dinas Penanaman
PELAKSANAAN PENANAMAN	dengan Target Daerah	reisen	30	735	Modal dan Pelayanan
MODAL	deligan ranger bacian			755	Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA	Persentase Cakupan	Persen	100		Dinas Penanaman
DAN SISTEM INFORMASI	Data dan Informasi	reisen	100	116	Modal dan Pelayanan
PENANAMAN MODAL	Perizinan dan Non			110	Terpadu Satu Pintu
1 210 110 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Perizinan Penanaman				Terpuda Sata Finta
	Modal yang				
	Terintegrasi				
Sasaran 2:	Kontribusi PDRB	%	23.52		
Meningkatnya Kontribusi	sektor pertanian,				
Sektor Pertanian dalam Arti	perikanan &				
Luas	kehutanan				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Pertumbuhan Populasi	%	9	44,458	Dinas Peternakan dan
PENGEMBANGAN SARANA	Ternak			,	Kesehatan Hewan
PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Cakupan Produksi Hasil	%	100	1	Dinas Peternakan dan
PENGEMBANGAN PRASARANA	Ternak yang dipasarkan			561	Kesehatan Hewan
PERTANIAN					
PROGRAM PENGENDALIAN	PERSENTASE	%	< 1	2,779	Dinas Peternakan dan
KESEHATAN HEWAN DAN	PENURUNAN TERNAK			'	Kesehatan Hewan
KESEHATAN MASYARAKAT	YANG TERINFEKSI				
VETERINER	PHMS				
PROGRAM PENYULUHAN	Persentase Kelompok	%	100	1	Dinas Peternakan dan
PERTANIAN	Ternak Berbasis			420	Kesehatan Hewan
	Korporasi				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Fasilitasi	%	1.93	20,209	Dinas Pertanian dan
PENGEMBANGAN SARANA	Sarana Pertanian				Perkebunan
PERTANIAN	Persentase Fasilitasi	%	35.41	104,379	Dinas Pertanian dan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Fasilitasi		.	,	1
	Prasarana Pertanian				Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN					Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA		Unit/ paket	2		Perkebunan

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Target 2021		Perangkat Daerah
Sasaran/Program		Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawal
PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Luas	%	95.5		Dinas Pertanian dan
DAN PENANGGULANGAN	Pertanaman Yang Aman			361	Perkebunan
BENCANA PERTANIAN	dari serangan OPT dan				
	DPI				
PROGRAM PENYULUHAN	Persentase kelompok	%	50	5,432	Dinas Pertanian dan
PERTANIAN	tani yang meningkat				Perkebunan
	skor kelas kelompok				
PROGRAM PENGELOLAAN	Peningkatan presentase	%	10		Dinas Lingkungan
HUTAN	kawasan hutan yang di				Hidup dan Kehutanan
	kelola				
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Luas	%	8.53	4,868	Dinas Kelautan dan
KELAUTAN, PESISIR DAN	Wilayah Laut dan Pesisir				Perikanan
PULAU-PULAU KECIL	yang dikelola sesuai				
	dengan peraturan				
	perundangan yang				
	berlaku				
PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi Perikanan	Ton	241,843	6,336	Dinas Kelautan dan
PERIKANAN TANGKAP	Tangkap				Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi Perikanan	Ton	1,195,104	3,023	Dinas Kelautan dan
PERIKANAN BUDIDAYA	Budidaya				Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN	Persentase kepatuhan	%	99.91	4,852	Dinas Kelautan dan
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN	pelaku usaha KP				Perikanan
PERIKANAN	terhadap peraturan				
	perundang-undangan				
PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Produksi olahan hasil	Ton	213130		Dinas Kelautan dan
PEMASARAN HASIL PERIKANAN	perikanan			616	Perikanan
Sasaran 3:	Cakupan penduduk	%	100		
Meningkatnya jaminan	miskin yang				
kesehatan dan sosial bagi	mendapatkan				
penduduk miskin	jaminan Sosial dan				
	Kesehatan (%)				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase fasilitas	%	85		Dinas Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN	kesehatan yang				
JPAYA KESEHATAN	terakreditasi				
MASYARAKAT					
PROGRAM PENANGANAN	Persentase PMB	%	100		Dinas Sosial
WARGA NEGARA MIGRAN	(pekerja migran		100		2
KORBAN TINDAK KEKERASAN	(penerja illigiani			764	
KORBAN TINDAK KEKERASAN	hermasalah) dan			764	
	bermasalah) dan Korban Tindak			764	
	Korban Tindak			764	
	Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	2.5		Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang	%	2.5	17,317	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan	%	2.5		Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang	%	2.5		Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani			17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk	%	2.5		Dinas Sosial Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang			17,317	
PROGRAM REHABILITASI 50SIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan			17,317	
PROGRAM REHABILITASI 50SIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan			17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN IAMINAN SOSIAL	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Sasaran 4:	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan			17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN DAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN DAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan	%	100	17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	% Skor	100 86.20	17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN IAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Program Pengelolaan Sumber	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	100	17,317	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN IAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Lumbung Pangan yang	% Skor	100 86.20	17,317	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN DAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	% Skor	100 86.20 71.97	17,317 12,091 215	Dinas Sosial Dinas Ketahanan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN DAMINAN SOSIAL Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan Persentase Ketersediaan	% Skor	100 86.20	17,317	Dinas Sosial Dinas Ketahanan
PROGRAM REHABILITASI GOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN IAMINAN SOSIAL Gasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi Dangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Korban Tindak Kekerasan tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	% Skor	100 86.20 71.97	17,317 12,091 215	Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targe	t 2021	Perangkat Daerah
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	80.00	539	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76.48	2,936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.10		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	На	84,393	256,813	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.77		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.96	557	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99.77	1,552	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	1,943	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.81		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	60	280	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,658	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	3	1,303	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja		Target 2021		Perangkat Daerah
	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	80	1,253	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas	%	100	12,024	Dinas Perdagangan
NEGERI	Pemasaran Kelompok UKM				
Sasaran 7:	Pengeluaran per	Rp.000	11,273		
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	kapita (Rp.000)				
PROGRAM PENINGKATAN	Cakupan Fasilitasi	%	100	3,704	Dinas Perdagangan
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
Tujuan 2:	Pertumbuhan sektor	%	1.50		
Terwujudnya pariwisata	kepariwisataan				
yang dapat diandalkan	(Penyediaan				
	Akomodasi dan				
	Makan Minum)				
	dalam PDRB (%)		400 =4		
Sasaran 1:	Pertambahan Nilai	Rp. Milyar	122.71		
Meningkatnya daya saing	PDRB sektor yang terkait				
pariwisata	kepariwisataan				
	(Penyediaan				
	Akomodasi dan				
	Makan Minum) (Rp.				
	Miliar)				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase desa wisata	%	65.66	4,993	Dinas Pariwisata
TARIK DESTINASI PARIWISATA	yang dikembangkan			,	
	Persentase Geosite yang	%	37.5		
	tertata				
PROGRAM PEMASARAN	Efektifitas promosi di	orang		2,240	Dinas Pariwisata
PARIWISATA	dalam meningkatkan		4,650,000		
	angka kunjungan				
	wisatawan				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase HaKI yang	%	30.21		Dinas Pariwisata
EKONOMI KREATIF MELALUI	telah memberikan			165	
PEMANFAATAN DAN	kontribusi dalam				
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	pertambahan nilai				
INTELEKTUAL	ekonomi kreatif				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase SDM	%	60	1,063	Dinas Pariwisata
SUMBER DAYA PARIWISATA	penunjang layanan				
DAN EKONOMI KREATIF	pariwisata yang memenuhi standar				
Tujuan 3:	Pertumbuhan	%	6.50		
Terwujudnya perindustrian	Industri (%)	70	0.50		
yang unggul Sasaran 1:	Pertambahan Nilai	Rp. Milyar	166.39		
Meningkatnya daya saing	PDRB sektor Industri	кр. Миуаг	100.39		
industri	Pengolahan (Rp.				
	Miliar)				
PROGRAM PERENCANAAN DAN	Persentase Kesesuaian	%	100	27,070	Dinas Perindustrian
PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen Perencanaan	· · · · ·	===		
	Pembangunan Industri				
	Provinsi				
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN	Persentase IKM yang	%	2.69		Dinas Perindustrian
USAHA INDUSTRI	Meningkat dari Kecil ke			799	
	Menengah				
PROGRAM PENGELOLAAN	Cakupan Database IKM	%	1		Dinas Perindustrian
SISTEM INFORMASI INDUSTRI	Se-NTB dalam Sistem			540	
NASIONAL					
	l .			1	l

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Target 2021		Perangkat Daerah
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
	Informasi Industri				
	Nasional				
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Proporsi usaha kecil	%	5,99	1,280	Dinas Koperasi Usaha
USAHA MENENGAH, USAHA	yang diperkuat menjadi	, ,	0.00	1,200	Kecil dan Menengah
KECIL, DAN USAHA MIKRO	wirausaha				J
(UMKM)					
PROGRAM PENGEMBANGAN	Proporsi usaha kecil	%	50.32	2,122	Dinas Koperasi Usaha
UMKM	yang Ditingkatkan				Kecil dan Menengah
	manajemen dan				
	kapasitas usahanya	0,	100	2.245	2: 2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
KEPEMUDAAN	remuda berprestasi				Olarii aya
KEI EI IOD/VIIV	Persentase Pemuda	%	100		
	Peserta Pelatihan Yang	, ,	100		
	Bersertifikat				
Sasaran 2:	Tingkat	%	3.30		
Menurunnya pengangguran	Pengangguran				
terbuka	Terbuka				
PROGRAM PELATIHAN KERJA	Persentase pencari kerja	%	16		Dinas Tenaga Kerja dan
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	yang bersertifikat			830	Transmigrasi
KERJA	kompetensi	0/	4474		D: T //
PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Pencari	%	44.71	002	Dinas Tenaga Kerja dan
TENAGA KERJA	Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan			992	Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN	Persentase perusahaan	%	21		Dinas Tenaga Kerja dan
INDUSTRIAL	yang memiliki perangkat	70	21	300	Transmigrasi
11.000114.12	hubungan industrial				
PROGRAM PENGAWASAN	Persentase perusahaan	%	21	1,014	Dinas Tenaga Kerja dan
KETENAGAKERJAAN	yg menerapkan Norma				Transmigrasi
	Ketenagakerjaan & K3				
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKA	H melalui perwujudan ma	syarakat mada	ani yang berima	an, berkarakter d	lan penegakan hukum
yang berkeadilan Tujuan 1:	Indeks Kriminalitas	Point	14.85	1	
Terwujudnya Kehidupan	Indexs Killinantas	Foliic	14.03		
Masyarakat NTB yang					
Madani					
Sasaran 1:	Persentase	%	16.67		
Meningkatnya Nilai Sosial	penurunan konflik				
Budaya & Toleransi	sosial				
Masyarakat					
PROGRAM PENGUATAN	Persentase pembinaan	%	10		Badan Kesatuan Bangsa
IDEOLOGI PANCASILA DAN	ideologi wawasan			458	dan Politik Dalam
KARAKTER KEBANGSAAN	kebangsaan dan				Negeri
	karakter bangsa pada daerah rawan konflik				
PROGRAM PENINGKATAN	Cakupan mediasi	%	10	3,328	Badan Kesatuan Bangsa
KEWASPADAAN NASIONAL DAN	potensi konflik sosial	/0	10	3,320	dan Politik Dalam
PENINGKATAN KUALITAS DAN	pada daerah rawan				Negeri
FASILITASI PENANGANAN	konflik				
KONFLIK SOSIAL					
PROGRAM KESEJAHTERAAN	Persentase	%	100	87,427	Biro Kesejahteraan
RAKYAT	Kesejahteraan Rakyat				Rakyat
	dari Segi Mental				
	Spiritual, Kebutuhan				
	Dasar dan Non				
DDOCDAM PENDEDS	Kebutuhan Dasar	2,		2 = 2 = 2	Division I
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga	%	60	6,798	Dinas Pemberdayaan
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Adat Aktif				Masyarakat, Pemerintahan Desa,
					i cilicilitatiati Desa,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja		Target 2021		Perangkat Daerah
	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawat
LEMBAGA ADAT DAN					Kependudukan dan
MASYARAKAT HUKUM ADAT					Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes	%	14.43		
	Berprestasi				
	Persentase Pokja	%	60		
	Posyandu aktif				
	Persentase Posyantek	%	47.86		
	yang aktif				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase	%	63.64	1,975	Dinas Pendidikan dan
KEBUDAYAAN	Pengembangan Obyek				Kebudayaan
	Pemajuan Kebudayaan				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase	%	100		Dinas Pendidikan dan
KESENIAN TRADISIONAL	Pengembangan			390	Kebudayaan
	Kesenian Tradisional				
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan	%	100		Dinas Pendidikan dan
	sejarah			164	Kebudayaan
Sasaran 2:	Persentase	%	5.41		
Meningkatnya Kualitas &	Penurunan				
Penegakan Produk Hukum	Pelanggaran Produk				
Daerah	Hukum Daerah				
PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penanganan	%	100.00	2,864	Satuan Polisi Pamong
KETENTERAMAN DAN	Gangguan Ketertiban				Praja
KETERTIBAN UMUM	Umum dan Ketentraman				
	Masyarakat				
	Persentase Penanganan	%	100.00		
	Pelanggaran Produk				
	Hukum Daerah				
PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa	%	51.72		Badan Kesatuan Bangs
PENGEMBANGAN KETAHANAN	Bersinar (Bersih dari			730	dan Politik Dalam
EKONOMI, SOSIAL, DAN	Narkoba)				Negeri
BUDAYA	-				
PROGRAM FASILITASI DAN	Persentase Fasilitasi	%	100	1,711	Biro Hukum
Koordinasi hukum	Penyusunan Produk				
	Hukum Daerah Provinsi				
	yang terbentuk				
	Persentase Produk	%	100		
	Hukum Daerah				
	Kab./Kota yang				
	Terfasilitasi				
	Persentase Produk	%	100		
	Hukum Daerah yang				
	terevaluasi				
	Persentase Produk	%	100		
	Hukum yang				
	Tersosialisasi kepada				
	masyarakat				
	Persentase MoU dan	%	100		
	perjanjian kerjasama	,,			
	yang tersusun				
	Persentase Penanganan	%	100		
	Masalah Hukum Litigasi	70	100		
	Persentase Penanganan	%	100		
	Masalah Hukum Non	70	100		
Tuiuan 1.	Litigasi dan HAM	0/	02.74		
Tujuan 1:	Partisipasi Politik	%	83.74		
Terwujudnya Kehidupan	Masyarakat (%)				
Masyarakat NTB yang					
Madani					

Misi/Tujuan/	Indikator Kinerja		Targe	et 2021	- Perangkat Daerah
Sasaran/Program	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	80	4,654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	79.66	489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59.81		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.6		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	60		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	1,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	806	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	381	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	361	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		518	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah
	(tujuan/impact/ outcome)		Target	Rp. (Juta)	Penanggung Jawab
					Pengendalian Penduduk
					dan Keluarga
					Berencana
	Persentase Anak Korban	%			
	Kekerasan yang				
	Mendapat Layanan				
	Komprehensif				

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 TRIWULAN I

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2021

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 269 kegiatan dan 751 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.834.225.973.367,64 atau 51,26% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp. 5,528,931,855,427.

Adapun hasil capaian kinerja dan anggaran pada triwulan 1 tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1. Dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.
- 2. Dari 120 Program pembangunan daerah tersebut, terdapat 93 program yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya dan 17 indikator diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerjanya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.
- 3. Dari 281 Kegiatan, terdapat 155 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya. Adapun sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan, terdapat 390 Sub Kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya dengan ratarata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

 Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 5,88 % pada pada capaian kinerjanyanya dan 10,30 % pada pada capaian keuangannyanya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna dengan target kinerja 25,48% dan 44,69%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (sub kegiatan: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penanganan Pascabencana Provinsi, Penyusunan Rencana Kontijensi), Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (sub kegiatan: Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Pencarian, Pertolongan, Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana) dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (sub kegiatan: Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan).
- b. Program Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.
- 2. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 19,24 % pada capaian keuangannya.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan target kinerja sebesar 83,95%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan,Pemeliharaan Berkala Jalan,Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
- 3. Sasaran Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 42 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 74,55%. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA

WS Kewenangan Provinsi; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi) dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah; Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Permukaan; Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya; Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai; Rehabilitasi Bendung Irigasi; Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi; Operasional Unit Pengelola Irigasi).

- 4. **Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Rata-Rata Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan sebesar 10,81 % pada capaian kinerjanya dan 4,32 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 50,83 %), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 94,37 %), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 30 %), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 46,2 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan

Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).

b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

- **5. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** dengan indikator kinerja Opini BPK. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 11,57 % pada capaian kinerjanya dan 16,01 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 %), Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
 - b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan

Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

- **6. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 2,1 % pada capaian kinerjanya dan 5,71 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal dengan target kinerja 35.2 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) dengan target kinerja sebesar 50.12 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajaka Darah; Pengendalian, Pemerikasaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 14,28 % pada capaian kinerjanya dan 23,48 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja 100 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (dengan sub kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik;Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi); Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan: Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota); Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Bidang Pemerintahan; Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (sub kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA); Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan).

c. Program Penyelenggaran Pengawasan pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya dengan target kinerja sebesar 84.44%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; dan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota.

- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 17,77%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat dengan target kinerja yaitu Nilai BB. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan (sub kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi; Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; danPenataan Analisis Jabatan) dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik).
- f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan; Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum; dan Fasilitasi Penataan Wilayah), Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan; dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan) dan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah; Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama).
- **8. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN** dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 7,03 % pada capaian kinerjanya dan 9,62 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%); Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan (target capaian: 80%); Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi (target capaian: 88%); Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan 132%); dan Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (sub kegiatan: Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitasi

Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian); Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; dan Pengelolaan Promosi ASN); Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional), Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN).

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja: 0.086%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja: 0.033%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja: 0.13%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi(target kinerja: 0.55%). Adapun bentuk kegiatan uang dilakukan meliputi : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

- **9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,34 % pada capaian kinerjanya dan 6,37 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk (target capaian: 98,7%). Adapun bentuk kegiatan uang dilakukan meliputi : Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional; dan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk; dan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk).
 - b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil indikator Persentase pengelolaan informasi dengan kinerja kependudukan tingkat kab/kota (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; dan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi); Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan).
- d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir (target capaian: 15%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (target capaian: 60%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK (target capaian: 45%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik).
- g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Statistik Sektoral; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah).
- h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%) (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan

- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).
- i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
- k. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi).
- Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam); Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (sub kegiatan : Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah); Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Pendaftaran Naskah Kuno; Pengembangan, dan Pengolahan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan).

- 10. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 14,59 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (target capaian: 85%), Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (target capaian: 97%); Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar(target capaian: 65%); Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB(target capaian: 100%); Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target capaian: 80%); Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (target capaian: 94%); dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional (target Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan capaian: 100%). Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi

Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub Kegiatan: Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan); Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (target capaian: 2%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (sub kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan); Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan).
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (target capaian: 30%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (sub kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (sub kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional).
- d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 83%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan.
- e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 73,81%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas

- Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit); dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit).
- **11.Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 13,10 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting (target capaian: 12,41. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (target capaian: 50%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi); Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM).
- **12.Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan** dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target: 13,68 Tahun) dan Rata rata Lama

Sekolah Target: 7,01 Tahun). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 6,52 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 99.15 %); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 93,408 %); Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja: 96.68%); Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja: 69.4%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja: 1.01 %); Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah (Target kinerja: 1:18); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja: 1:14). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan: Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Kejuruan; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).
- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja: 99.15%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan

- Lokal Pendidikan Menengah dengan sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja: 100%); Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja: 99.55%); Persentase Kepala Sekolah bersertifikat (Target kinerja: 70%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja: 50%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja: 5,5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendidikan Khusus.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan (Target kinerja : 35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan MenjadiKewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent); Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan Pengembangan : Keolahragaan).
- **13.Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup** dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air ,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 16,95 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Target kinerja: 51,52 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (sub kegiatan: Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (sub kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya (Target kinerja: 10 lokasi). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi); Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan (sub kegiatan: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Target kinerja: 1 lokasi). Adapun kegiatan yang

- dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (Target kinerja: 210 unit). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan (Target kinerja: 20 kegiatan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan (Target kinerja: 105). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Target kinerja: 20 Pengaduan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.
- 14.Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air ,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,83 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi kelola (Target kinerja: 66,74 %) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja: 10 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan

Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan: Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun)

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja : 30503.3 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan

- Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).
- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya (Target kinerja: 13,27%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas (Target kinerja: 4 DAS). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.
- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Target kinerja: 89,07%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).
- **15. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan** dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 21,21 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah (Target kinerja: 70 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan

Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional).

- **16.Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan** dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 6,32 % pada pada capaian kinerjanya dan 8,96 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Perentase Peningkatan Minat Investasi (Target kinerja: 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan: Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman); dan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (sub kegiatan: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi; dan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi).
 - b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal (Target kinerja: 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Target kinerja: 87 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota (sub kegiatan: Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); dan Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi (sub kegiatan: Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik; Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan).
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja: 50 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; Koordinasi dan sinkronisasi

- pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi (Target kinerja: 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- **17.Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas** dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 1,52 % pada pada capaian kinerjanya dan 5,10 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak (Target kinerja: 9 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (sub kegiatan: Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan

- Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Terna; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak)
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi Phms (Target kinerja: <1%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (sub kegiatan: Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya).
- d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan: Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan: Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani; Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani).
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian (Target kinerja: 1,93%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan: Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan: Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran

- Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian (Target kinerja: 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
- g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian (Target kinerja: 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok (Target kinerja: 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan: Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan: Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).
- i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja: 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar

Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).

- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Target kinerja : 8,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).
- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap (Target kinerja: 241843 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan

Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan: Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).

- Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan I. Program Pengelolaan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya (Target kinerja: 1195104 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
- m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,91%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil)

n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan (Target kinerja : 213130 ton). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi; dan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan: Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan bagi Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

18.Sasaran Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 7,69 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (Target kinerja : 85 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja: 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja : 2,5 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja: 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (sub kegiatan: Pengangkatan Anak antar WNI; Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal); dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat).
- **19.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan** dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 1,27 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan (Target kinerja: 71,97%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (sub kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan); Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi); Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi (sub kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)).
 - **c.** Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) (Target kinerja: 5,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi denagn sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi'
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) (Target kinerja: 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi; Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).
- **20. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 11,64 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum (Target kinerja : 76,48%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.

- **21.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 39,72 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (Target kinerja: 94%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
 - **b.** Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas (Target kinerja: 84392,8 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
- **22.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar

- 50,11 % pada pada capaian kinerjanya dan 2,08% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik (Target kinerja: 5,96%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan: Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi EnergI; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).
- b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Target kinerja: 99,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usah Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan).
- **23.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 3,21% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi); Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

- **24.Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok** dengan Indikator Kinerja Inflasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 5,61% pada pada capaian kinerjanya dan 1,60% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting" (Target kinerja: 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya); Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana) (sub kegiatan : Koordinasi dan singkronisasi layanan penerbitan SKA).
 - **b.** Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Target kinerja : 4%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang

Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida; Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi; Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).

- c. Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang (Target kinerja: 3%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor).
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa (Target kinerja: 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen; Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen; Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan: Fasilitasi penganganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen_; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan: Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).
- e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi

peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

25.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Indikator Kinerja Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 0,32% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

- **26.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata** dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 2,07% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Persentase desa wisata yang dikembangkan (Target kinerja: 65,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi (sub kegiatan: Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan: Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lointas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).
 - b. Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan (Target kinerja: 4.650.000 orang). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif (Target kinerja: 30,21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan sub kegiatan Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan

- ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (Target kinerja: 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.
- **27.Sasaran Meningkatnya daya saing industri** dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 2,13% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat; Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja: 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi

- melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja: 5,99%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
- **e.** Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja: 50,32%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator Kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja: 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.
- **28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka** dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,79% pada pada capaian kinerjanya dan 5,11% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi (Target kinerja: 16%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (sub kegiatan: Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan: Proses

- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (Target kinerja: 44,71%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan: Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan: Job Fair / Bursa Kerja); Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi (sub kegiatan: Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan); Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan: Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).
- c. Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi ; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).
- d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 (Target kinerja: 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan; Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan).
- **29.Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 6,96% pada pada capaian kinerjanya dan 8,59% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - **a.** Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase

pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik (Target kinerja: 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

- **b.** Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
- c. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (Target kinerja: 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja: 63,64%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat)
- f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
- g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan

Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

- 30.Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 12,42% pada pada capaian kinerjanya dan 5,25% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target kinerja: 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS).
 - b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Target kinerja: 51,72%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

- dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- c. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk; Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi ;Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi;Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat; Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun ; Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi; Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota); dan Bantuan Hukum dan HAM (sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; dan Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM).
- **31.Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 12,5% pada pada capaian kinerjanya dan 1,06% pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik (Target kinerja: 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
 - b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja

Persentase Ormas yang aktif (Target kinerja: 79,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

- **32.Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan** dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 12,5% pada pada capaian kinerjanya dan 1,06% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG (Target kinerja : 52,17%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi)
 - b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (Target kinerja: 75,52%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan

- Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender (Target kinerja: 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 26 sasaran yang ditetapkan dengan 37 indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB diketahui bahwa terdapat 7 indikator (18,92 %) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain (81,08 %) masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan I Tahun 2021 sesuai dengan tabel berikut.

- Dalam RKPD Tahun 2021, terdapat beberapa istilah program antara lain program prioritas, program unggulan, dengan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara nomenklatur berbeda satu sama lain dan memiliki level pengukuran yang sama dan tidak ada pemetaan yang menunjukkan keterkaitan satu sama lain;
- 2. Tidak tersedia penjabaran dan target yang akan dicapai pada setiap program prioritas dan program unggulan sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengukuran capaian pada setiap program prioritas dan program unggulan;
- 3. Terdapat beberapa indikator baik indikator Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan antara yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dengan yang tertuang dalam laporan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD, hal ini terjadi karena penetapan RKPD Tahun 2021 dilakukan sebelum adanya perubahan Renstra perangkat daerah, sehingga kesulitan untuk mengukur tingkat capaiannya
- 4. Rendahnya penyampaian laporan evaluasi renja perangkat daerah pada triwulan 1 tahun 2021 oleh perangkat daerah, dari 46 perangkat daerah sebanyak 33 perangkat daerah yang menyampaikan laporan atau 71,74%, sehingga mempengaruhi besaran rata-rata tingkat capaian kinerja pada laporan evaluasi triwulan 1 ini.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Dalam RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
- 2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanan program prioritas dan program unggulan;
- 3. Terdapat beberapa indikator baik indikator Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan antara yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dengan yang tertuang dalam laporan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD, hal ini terjadi karena penetapan RKPD Tahun 2021 dilakukan sebelum adanya perubahan Renstra perangkat daerah, sehingga kesulitan untuk mengukur tingkat capaiannya
- 4. Dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.
- 5. Dari 120 Program pembangunan daerah tersebut, terdapat 93 program yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya dan 17 indikator diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerjanya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.
- 6. Dari 281 Kegiatan, terdapat 155 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya. Adapun sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan, terdapat 390 Sub Kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

- Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum kedalam kegiatan RKPD Tahun 2021;
- 2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- 3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
- 4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan;
- 5. Perlu percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk mengefektifikan pencapaian kinerja dan anggaran;
- 6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala, agar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikendalikan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2021 TRIWULAN I

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	a Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ıran Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp		Rp	
1	2	3	4		5	6		7		8		9	10=8/7*	100	11	L=6+9	12=9/5*1	100	13
Misi NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui pengu	atan mitigasi bencana dan pengembangan																		
Tujuan : Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point	115,83			123,11												
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan		Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65			0,61	6.605.666.830						10,713825					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445.499.395		25,48	4.159.298.730		402.867.911	-	402.867.911	-	9,69	-	402.867.911	-	P	elaksana Badan enanggulangan Bencana baerah Provinsi NTB
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,5			44,69				-	-	-		-	-	-		raeran Provinsi NI B
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		J. Capasia			3.854.515.942	1	1	1.109.832.400,00	-	20.857.170	-	20.857.170			-	20.857.170			
terhadap Bencana			<u></u>	L			<u> </u>		<u> </u>		<u></u>						<u> </u>		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	terbentuk/ ditingkatkan levelnya	Desa	60	2.161.122.110		20	622.252.800	-	6.600.000	-	6.600.000	-	1,06	-	6.600.000	-	0,31	
		Jumlah SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana) yang terbentuk	Sekolah	30			10		-		-	-	-		-	-	-		
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen Jitupasna yang disusun	Dok	10	860.276.586		3	247.699.800	-	5.317.170	-	5.317.170	-	2,15	-	5.317.170	-	0,62	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon Penanggulangan Bencana yang disusun	Dok	15	833.117.247		5	239.879.800	-	8.940.000	-	8.940.000	-	3,73	-	8.940.000	-	1,07	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban					10.434.516.346			3.004.414.690,00		382.010.741	-	382.010.741		12,71	-	382.010.741		3,66	
Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat	Kejadian Bencana yang	Kejadian	3	258.841.006		3	74.528.200	-	34.062.206	-	34.062.206	-	45,70	-	34.062.206	-	13,16	
	Bencana Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Tertangani Jumlah Korban Bencana yang Tertolong dan Terevakuasi	Orang	3000	4.073.942.912		1000	1.173.012.100	1.000	309.874.402	1.000	309.874.402	100,00	26,42	1.000,00	309.874.402	33,33	7,61	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Logistik yang Tersedia dan Didistribusikan	Jenis	25	6.101.732.428		25	1.756.874.390	-	38.074.133	-	38.074.133	-	2,17	-	38.074.133	-	0,62	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					156.467.107			45.051.640		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	156.467.107		1	45.051.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993		100	2.446.368.100		287.245.000	-	287.245.000	-	11,74	-	287.245.000	-	3,81	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah korban bencana alam sosial urusan provinsi yang tertangani	Jiwa	73775	7.543.347.993		23550	2.446.368.100		287.245.000	-	287.245.000	-	11,74	-	287.245.000	-	3,81	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jiwa	47500	1.923.788.498		15000	623.900.000		192.445.000	-	192.445.000	-	30,85	-	192.445.000	-	10,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Rer sampai dg Thn La	nstra g Renja		an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kin	erja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ran Renja	Renstra (Akhir	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang diberikan sandang	KK	11875	1.076.137.499			3750	349.000.000		-	-	-		-	-	-			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah korban bencana alam	Jiwa	9000	878.794.233			3000	285.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok	Kjumlah kelompok	Jiwa	2700	1.985.390.740			900	643.878.100		9.000.000	-	9.000.000	-	1,40	-	9.000.000	-	0,45	
	Rentan	rentan yang tertangani																		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan	Jiwa	2700	1.679.237.022			900	544.595.000		85.800.000	-	85.800.000	-	15,75	-	85.800.000	-	5,11	
		Dukungan Psikososial) yang dtingkatkan																		
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					21.988.847.388				6.605.666.830				690.112.911	5,88	10,30		690.112.911	1,96	3,12	
nata-nata Capaian Registan/Sub Registan					21.500.047.300				0.003.000.830				090.112.911	3,00	10,30		050.112.511	1,50	3,12	
Tujuan : Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point	81,17				78,56												
Sasaran: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	86,6				83,95												
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,6	922.596.058.991			83,95	249.463.037.482		66.931.453.189	-	66.931.453.189	-	26,83	-	66.931.453.189	-	7,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yg dibangun	Km	90,31	922.596.058.991			89,07	249.463.037.482		66.931.453.189	-	66.931.453.189	-	26,83	-	66.931.453.189	-	7,25	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				3.022.510.939				855.552.300		172.287.300	-	172.287.300		20,14	-	172.287.300		5,70	
					4.144.694.553				1.139.986.200		198.436.200		198.436.200				198.436.200			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pembangunan Jalan				836.600.536.203				195.018.425.900		55.116.936.689	-	55.116.936.689		17,41 28,26		55.116.936.689		4,79 6,59	
	Rehabilitasi Jalan				40.884.402.060				35.353.227.000		6.970.131.400	-	6.970.131.400		20,20	-	6.970.131.400		17,05	
	Pemeliharaan Berkala Jalan				16.630.407.060				11.099.232.000		2.215.827.400	-	2.215.827.400			-	2.215.827.400		13,32	
	Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jembatan				23.390.918.476 1.345.224.166				5.557.452.882 370.000.000		2.247.334.200	-	2.247.334.200			-	2.247.334.200			
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				277.809.619				69.161.200		10.500.000	-	10.500.000		15,18	-	10.500.000		3,78	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	T errycleriggaraan salany sembatan				922.596.058.991				249.463.037.482		66.931.453.189		66.931.453.189	-	19,24		66.931.453.189	-	7,30	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																				
Sasaran: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,5				50,04												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	345.464.448.089			74,55	170.863.271.539		72.220.226.400	-	72.220.226.400	-	42,27	-	72.220.226.400	-	20,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Buah	70	155.020.779,476			30	83.121.261.994,00		27.636.339.600	-	27.636.339.600	-	33,25	-	27.636.339.600	-	17,83	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				112.778.696											-				
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				154.298.629				80.010.000,00		-	-	-		-	-	•		-	
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				5.080.552.994				5.080.552.994,00		-	-	-			-	-			
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				11.837.069.230				7.710.707.800,00		2.177.328.000	-	2.177.328.000		28,24	-	2.177.328.000		18,39	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				17.952.306.764				11.502.743.200,00		2.821.146.000	-	2.821.146.000		24,53	-	2.821.146.000		15,71	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				880.526.046				469.004.700,00		96.000.000	-	96.000.000		20,47	-	96.000.000		10,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Berjalan	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)		rja Pada Triwulan I	Anggar Diev	Capaian Kinerja dan ran Renja yang raluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja 21 (%)	Renstra (Akhi	erja dan Anggaran [.] Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 20	nan nenstna 023 (%)	OPD Penanggung Jawab
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			К	Rp 2.464.106.133	K Rp	К	Rp 1.413.868.000,00	К	Rp 30.000.000	-	Rp 30.000.000	К	Rp 2,12	<u>к</u> -	30.000.000	К	1,22	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DI	65	201.126.393.614		25	98.424.734.545		8.473.773.600	-	8.473.773.600	-	8,61	-	8.473.773.600	-	4,21	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				1.253.062.619			764.076.900,00		66.000.000	-	66.000.000		8,64	-	66.000.000		5,27	
	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah				3.788.844.881						-	-		#DIV/0!	-	-		-	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				78.309.505.406			44.960.430.300,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				76.221.808.605			40599723245		1.069.134.000	-	1.069.134.000			ē	1.069.134.000			
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.729.381.617			1.066.881.400,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				111.898.932.587			55.088.204.800		22.511.865.600	-	22.511.865.600			-	22.511.865.600			
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.640.208.396			1.776.170.500		=	-	-			-	-			
	Rehabilitasi Bendung Irigasi				21.230.485.727			10.214.989.000		7.338.639.600									
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				17.492.940.962			290.830.000 527.803.700		-									
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	Operasional Unit Pengelola Irigasi				345.464.448.089			170.863.271.539		72.220.226.400		72.220.226.400	-	42	<u> </u>	72.220.226.400	-	20.91	
Sasaran : Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14			81,71												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	13.330.628.899		50,83	3.007.376.800		205.360.250	-	205.360.250	-	6,83	-	205.360.250,00		1,54	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100			94,37				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40			30				-	-	-		-	-	-		
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58			46,2				-	-	-		-	-			
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	3	1.147.935.839		1	345.000.000,00		=	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	terpasang	Jenis	2	1.147.935.839		1	345.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	1			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	Dokumen	18	2.789.208.621		4	808.978.000,00		141.380.250	-	141.380.250	-	17,48	-	141.380.250	-	5,07	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	2	221.081.845		0	21.600.000,00		2.080.250	-	2.080.250		9,63	-	2.080.250	-	0,94	
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun	Paket	1							-	-			-	-	-	#DIV/0!	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		a dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja	a Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan ran Renja yang raluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Enja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	12	1.975.505.979		3	586.548.000,00		139.300.000		139.300.000		23,75	,	139.300.000	-	7,05	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Dokumen	3	592.620.797		1	200.830.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pelanggaran Angkutan	Dokumen	60	2.364.773.429		20	598.801.000,00		45.000.000	-	45.000.000	1	7,52	,	45.000.000	-	1,90	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRLL dan DRK	Dokumen	56	1.461.831.014		18	394.061.800,00	1	45.000.000	1	45.000.000	5,56	11,42	1,00	45.000.000	1,79	3,08	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen	4	902.942.415		2	204.739.200,00		-		-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan Jumlah UPUBKB yang	unit unit	90 9	798.455.746		66 9	218.633.900,00		15.000.000	-	15.000.000	-	6,86		15.000.000	-	1,88	
		terbina	unt	,															
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Per	Unit	9	327.234.693		9	94.499.900,00		-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	Unit Kendaraan	90	471.221.053		66	124.134.000,00		15.000.000	-	15.000.000	•	12,08	•	15.000.000	-	3,18	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek	8	4.982.815.262		2	719.464.000,00		-		-		-		-	-		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8	4.140.876.440		2	575.700.000,00	2	-	2	-	100,00	-	2,00	-	25,00	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkend	Kab/ Kota	27	841.938.822		5	143.764.000,00	1	-	1	-	20,00	÷	1,00	-	3,70	-	
Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di Provinsi NTB	Dokumen	1			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota	Dokumen	1			0					-			-	-	-	#DIV/0!	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	1			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542	936.879.977		498	238.674.900,00	126	3.980.000	126	3.980.000	25,30	1,67	126,00	3.980.000		0,42	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang M	Unit	542	635.480.051		498	170.010.000,00	126	3.980.000	126	3.980.000	25,30	2,34	126,00	3.980.000	23,25	0,63	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen	2	301.399.926		1	68.664.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	lenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerj	a Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Realisasi Kinerja Renstra (Akhir Tal Ren	hun Pelaksanaan	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu)		jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	K 881	Rp 310.560.026	K Rp	K 811	Rp 77.825.000,00	K 13	Rp -	K 13	Rp -	K 1,60	Rp -	13,00	Rp -	K 1,48	Rp -	
Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881	310.560.026		811	77.825.000,00	13	-	13		1,60	-	13,00	-	1,48	-	
	Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi izin penyelenggaraan angkutan taksi	Dokumen	1			0				-				-	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Provinsi	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	1.729.526.622		59,39	563.820.000		24.960.000	-	24.960.000	-	4,43	-	24.960.000	-	1,44	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40	205.663.519		35	61.810.000,00	12	-	12	-	34,29	-	12,00	-	30,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Dokumen	40	205.663.519		35	61.810.000,00	12	-	12		34,29	-	12,00	-	30,00	-	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomislil dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25	369.735.040		21	30.682.000,00	3	1.000.000	3	1.000.000	14,29	3,26	3,00	1.000.000	12,00	0,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25	369.735.040		21	30.682.000,00	3	1.000.000	3	1.000.000	14,29	3,26	3,00	1.000.000	12,00	0,27	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	596.584.926		22	175.800.000,00	0	23.320.000	-	23.320.000	-	13,27	-	23.320.000	-	3,91	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	596.584.926		22	175.800.000,00	0	23.320.000	-	23.320.000	-	13,27	-	23.320.000	-	3,91	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122	108.483.878		110	27.008.000,00	56	-	56	-	50,91	-	56,00	-	45,90	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	diawasi	Dokumen	122	108.483.878		110	27.008.000,00	56		56	-	50,91	-	56,00	·	45,90	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun _P ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan tenja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	Dokumen	К 1	Rp	K Rp	<u>к</u> 0	Rp	К	Rp	-	Rp -	К	Rp	К -	Rp -	К -	Rp #DIV/0!	
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	Dokumen	1			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen	1			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen	1			0				-				-	-		#DIV/0!	
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan	4	449.059.258		1	122.020.000,00	0	640.000	-	640.000	-	0,52	-	640.000	-	0,14	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen DED dan Amdal Pelabuhan Regional yang direncanakan	Dokumen	1			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Jumlah pelabuhan yg	Paket	3			0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pelabuhan Pengumpan Regional Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	diperihara Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3	449.059.258		1	122.020.000,00	0	640.000	-	640.000	-	0,52	-	640.000	-	0,14	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengumpan Regional				15.060.155.521			3.571.196.800		230.320.250		230.320.250	10,81	4,32		230.320.250	5,56	#DIV/0!	
Misi NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transfori		in the set beautiful and truck to																	
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	liasi birokrasi yang berintegritas, berkiner	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	ВВ			В												
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP			WTP		WTP		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.280.262.468.462		100	714.105.821.724		57.180.056.740	-	57.180.056.740	-	8,01	-	57.180.056.740	-	2,51	Badan Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100			100				-	-	-		-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen	3	7.120.144.147		1	2.256.750.000	-	333.296.800	-	333.296.800	-	14,77	-	333.296.800	-	4,68	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	3	285.775.970		1	89.286.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	3	299.041.511		1	93.430.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	408	308.159.930		136	96.279.500	-	-		-	•	-	-	-	-	- 1	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	408	335.178.476		136	104.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	804	179.076.204		268	50.895.800	-	12.600.000	-	12.600.000	-	24,76	-	12.600.000	-	7,04	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capa Kin. Renstra sampai dg Re Thn Lalu	a Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Ki	nerja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian I Realisasi Angga Tahun 202	ıran Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	o K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	408	102.312.957		136	31.966.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6	3.047.082.447		2	989.242.500		1 214.080.500	1	214.080.500	50,00	21,64	1,00	214.080.500	16,67	7,03	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	6	955.711.392		2	298.596.300		- 12.154.300	-	12.154.300	-	4,07	-	12.154.300	-	1,27	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun		3	286.531.331		1	89.522.000		- 14.419.000	-	14.419.000	-	16,11	-	14.419.000	-	5,03	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Rapat Terselenggara		5	106.101.823		2	40.713.000		- 12.862.500	-	12.862.500	-	31,59	-	12.862.500	-	12,12	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Terselenggara		6	249.769.729		2	84.453.500		- 31.220.500	-	31.220.500	-	36,97	-	31.220.500	-	12,50	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Rapat Terselenggara		6	88.877.876		2	39.228.100		- 6.200.000	-	6.200.000	-	15,80	-	6.200.000	-	6,98	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	kegiatan	10	876.524.501		2	248.415.700		1 29.760.000	1	29.760.000	50,00	11,98	1,00	29.760.000	10,00	3,40	
embinaan Pengelolaan Keuangan Daerah abupaten/Kota					3.360.714.656			1050000000		142.436.000	-	142.436.000		13,57	-	142.436.000			
ооцианту коса	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				358.536.403			112018800		47.858.000		47.858.000		42,72	-	47.858.000			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				611.520.760			191059600		-	-	-			-	-			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				617.880.512			193046600		-	-	-			-	-			
	Asistensi Pengelolaan Keuangan				189.379.472			59168500		39.308.500		39.308.500			-	39.308.500			
	Kabupaten/Kota Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				596.752.499			186445500		-	-	-			-	-			
	Daerah Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				100.735.982			31473300		-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				885.909.029			276787700		55.269.500	-	55.269.500			-	55.269.500			
oordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan aerah	n emerinanan paeran				3.079.907.343			1071486100		109.920.000	-	109.920.000		10,26	-	109.920.000			
acton	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				834.573.471			773879800		79.380.000	-	79.380.000		10,26	-	79.380.000			
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				412.901.470			556200		-	-	-			-	-			
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				75.527.929			27579500		-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	n Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan ran Renja yang raluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaiar nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				K Rp	K Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			220.807.961		187371700		19.020.000		19.020.000		10,15	-	19.020.000			
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			1.860.720.491		12000000		-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			274,643.874		41798000		11.520.000	-	11.520.000		27,56	-	11.520.000			
	Koordinasi Pelaksanaan Plutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			319.860.667		15193600		-	-	-			-	-			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait			118.120.895		4387300		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			435.169.650		774000		-	-	-			-	-			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			443.156.342		7946000		-	-	-			-	-			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				921.154.543		870057600		35.058.400	-	35.058.400		4,03	-	35.058.400			
r craporan secungan bacran	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			187.705.510		105806300		-	-	-			-	-			
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			191.228.606		138442200		11.520.000	-	11.520.000		8,32	-	11.520.000			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			137.404.786		61661100		-	-	-			-	-			
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			283.743.218		217401500		23.538.400	-	23.538.400		10,83	-	23.538.400			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			1.554.757.327.482		197761700		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			811.254.923		23218700		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			22.044.021.647		37215400		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			1.531.788.709.711		23986400		-	-	-			-	-			
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			600.248.720		34418300		-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Ren Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Ang	si Capaian Kinerja dan garan Renja yang ievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	K Rp	К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				156.593.808			30146000	-		-		-	-			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Provinsi				708.866.194.006			7,08615E+11	56.551.845.540		- 56.551.845.540	7,98	-	56.551.845.540			
Keuangan Daerah																	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1.546.688.030			1358087500	1.000.000.000		- 1.000.000.000	73,63	-	1.000.000.000			
	Pengelolaan Dana Darurat dan				15.127.236.754			11215969720	3.596.903.760		- 3.596.903.760	32,07	-	3.596.903.760			
	Mendesak																
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				696.113.746.093			6,96041E+11	51.954.941.780		- 51.954.941.780	7,46	-	51.954.941.780			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem					323.277.201			242116100	7.500.000		- 7.500.000	3,10	-	7.500.000			
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah																	
Daeran	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang				294.643.456			57458500	_				-	-			
	Keuangan Daerah																
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem				166.907.177			113956600	7.500.000		- 7.500.000	6,58	-	7.500.000			
	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							1									
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah	1			1.144.776.189			70701000	-				-	-			
	Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi							1									
	remerintan Provinsi							1									
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	1.894.833.435		60	1.777.028.800	263.637.000		- 263.637.000	- 14,84	-	263.637.000	-	13,91	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
													1				
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan BMD Perangkat yang diterima	laporan	118	1.884.300.977		100	1.777.028.800	0 263.637.000		- 263.637.000	- 14,84	-	263.637.000	-	13,99	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	144.326.463		1	32.895.000	0 -	1			-	-	-	-	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah	Standar Harga Jumlah Dokumen	Dokumen	6	849.473.398		2	36.880.000	0				+				
	dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	DOKUMEN	8	649.475.596		2	36.880.000	0 -					-		-	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	322.846.116		1	107.778.000	0 -		-		-	-	-	-	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pergub	9	187.054.410		3	24.061.000	0 -				-	-	-	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	90	521.468.814		16	474.865.000	0 89.700.000		- 89.700.000	- 18,89	-	89.700.000	-	17,20	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	penatausahaan BMD Jumlah Kegiatan	kogiatan	26	3.964.798.034		12	F2 F24 000	0	<u> </u>	-			1	_		
		Inventarisasi yang dilaksanakan	kegiatan	36			12	53.531.000	-				-	_		-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah		15	1.192.229.208		5	372.492.400	1 28.460.000	1	1 28.460.000	20,00 7,64	1,00	28.460.000	6,67	2,39	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	15	1.446.265.444		5	48.745.000	0 -		-		-	-	-	-	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan	3	51.859.019		1	50.635.000	0 -				-	-	-	-	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD, Jumlah SK Penghapusan BMD		102	395.654.567		34	369.246.400	6 80.188.000		6 80.188.000	17,65 21,72	6,00	80.188.000	5,88	20,27	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	396	136.353.046		1	126.698.000	1 65.289.000	1	1 65.289.000	100,00 51,53	1,00	65.289.000	0,25	47,88	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen	144	75.768.327		14	74.065.000	0 -				-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun rang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Kii Realisasi Anggara Tahun 2021	ın Renja	Renstra (Akhir	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen	к 30	Rp 22.623.608	K Rp	K 5	Rp 5.137.000	. С	Rp -	- K	Rp -	- K	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807.331.659		80	1.078.974.400	-	291.989.790	-	291.989.790	-	27,06	-	291.989.790	-	7,67	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89			40	2.119.203.000	∞		∞	-			8	-			INSPEKTORAT
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jlh Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dokumen	209	7.738.889.634		72	2.120.781.000	-	206.160.000	-	206.160.000	-	9,72	-	206.160.000	-	2,66	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok. LHA, LHE dan Monev	Dokumen	98	3.577.855.286		36	1.118.988.500	-	99.620.000	-	99.620.000	-	8,90	-	99.620.000	-	2,78	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	Dokumen	51	1.450.949.876		16	425.159.500	1	29.600.000	1	29.600.000	6,25	6,96	1,00	29.600.000	1,96	2,04	
	Kerjasama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen LHA Jumlah Dokumen Laporan Monev	Dokumen Dokumen	3 57	514.341.109 2.195.743.363		1 19	150.713.000 425.920.000	-	76.940.000	-	76.940.000	-	18,06	-	76.940.000	-	3,50	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	75	3.685.314.639		25	1.077.396.400	-	85.829.790	-	85.829.790	-	7,97	-	85.829.790	-	2,33	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monev TPTGR	Dokumen	12	2.237.154.660		4	653.054.400	-	46.280.000	-	46.280.000	-	7,09	-	46.280.000	-	2,07	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHA	Dokumen	63	1.448.159.979		21	424.342.000	-	31.299.790	-	31.299.790	-	7,38	-	31.299.790	-	2,16	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402.134.356		5,55	397.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jlh Dok Laporan dan Dok Regulasi	laporan	48	1.372.846.178		16	397.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jlh Dok Regulasi Kebijakan Pengawasan	Dokumen	9	151.867.486		3	30.133.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jlh Dok Laporan Kegiatan	laporan	39	1.220.978.692		13	367.223.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	5.137.300.617		95	1.570.509.500	95	1.570.509.500	95	1.570.509.500	100,00	100,00	95,00	1.570.509.500	97,94		INSPEKTORAT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Dok. Lap. Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	33	5.137.300.617		11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	100,00	100,00	11,00	1.570.509.500	33,33	30,57	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jlh Dok Lap Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Dokumen	33	5.137.300.617		11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	100,00	100,00	11,00	1.570.509.500	33,33	30,57	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					2.292.504.068.528			718.929.690.424		59.306.193.030		59.306.193.030	11,57	16,01		59.306.193.030	4,38	5,88	
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65			35,41												
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000		35,2	527.520.000		12.700.000	-	12.700.000	-	2,41	-	12.700.000	-	0,76	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	4,05	488.825.248			154.620.800,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	umlah Dokumen Target Pendapatan Daerah	Dokumen	2	488.825.248			154.620.800,00		-		-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.178.903.064			372.900.000,00		12.700.000	-	12.700.000		3,41	-	12.700.000		1,08	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Ro	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Ren sampai dg Thn La	stra Target Kinerja Renja Berjalan	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ıran Renja	Renstra (Akhir	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian Ki nealisasi Anggana s/d Tahun 202	n nenstna	gung Jawab
				К	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1.178.903.064			372.900.000,00		12.700.000	,	12.700.000		3,41	-	12.700.000		1,08	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.183.810.000		50,12	14.608.450.000	0,70	1.342.117.500	1	1.342.117.500	1,39	9,19	0,70	1.342.117.500	1,29	2,91 Badan Pengelola Pendapatan Dae	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	9,59	45.363.335.800		9,91	13.029.812.100	0,42	1.342.117.500	0	1.342.117.500	4,20	10,30	0,42	1.342.117.500	4,34	2,96	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan		4976,408401	2.021.420.000		1487,726538	483.790.000	235,78	20.580.000	236	20.580.000	15,85	4,25	235,78	20.580.000	4,74	1,02	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi kesamsatan		6	6.115.352.900		2	1.639.981.300	0,08	48.360.000	0	48.360.000	3,91	2,95	0,08	48.360.000	1,30	0,79	
	Pajak Daetali Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak		450	3.937.812.600		150	1.147.347.500	1	25.155.000	1	25.155.000	0,97	2,19	1,45	25.155.000	0,32	0,64	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan		36	2.852.436.900		12	925.812.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah Potensial		1062624,178	4.399.620.500		1644206	1.003.359.700	18.272	25.400.000	18.272	25.400.000	1,11	2,53	18.271,51	25.400.000	1,72	0,58	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database		1936000	754.189.800		1600000	251.396.600	-	32.850.000	-	32.850.000	-	13,07	-	32.850.000	-	4,36	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor		153330	4.610.505.900		121924	1.352.505.300	2.619	108.177.000	2.619	108.177.000	2,15	8,00	2.618,76	108.177.000	1,71	2,35	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi		42800	1.847.985.300		13000	606.995.100	600	62.553.000	600	62.553.000	4,61	10,31	599,68	62.553.000	1,40	3,38	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	30	552.200.000		10	130.800.000	-	=	-	-	-	•	-	-	-	-	
	Penagihan Pajak Daerah	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB		268308,6125	6.059.983.800		255380	1.934.994.600	3.645	443.747.500	3.645	443.747.500	1,43	22,93	3.644,62	443.747.500	1,36	7,32	
	Penyelesaian Keberatan Pajaka Darah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	5	439.848.000		3	146.616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengendalian, Pemerikasaan dan Pengawasan Pajak Daearh	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	laporan	18	10.494.862.100		6	2.981.734.700	0,47	575.295.000	0	575.295.000	7,81	19,29	0,47	575.295.000	2,60	5,48	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Data Potensi Retribusi daerah dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	5	1.277.118.000		1	424.479.000	-	-	-	-	-	,	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					47.851.540.000			15.135.970.000		1.354.817.500		1.354.817.500	2,71	5,71		222.426.500	1,15	1,73	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)			BB (73,01 - 76,00)			-									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Realisasi Kinerja Renstra (Akhir Tah Renj	un Pelaksanaan	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 202	n nenstna	OPD Penanggung Jawab
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	%	K 100	Rp 14.444.339.884	K Rp	K 100	Rp 4.233.604.000	К	Rp 232.537.200	К -	Rp 232.537.200	К -	Rp 5,49	К -	Rp 232.537.200	К -	Rp 1,61	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen	100	52.277.424.045		14	2.849.070.200	3,00	140.401.000	3	140.401.000	21,43	4,93	3,00	140.401.000	3,00	0,27	. engenoungun euerum
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisis	dokumen	100	14.444.339.884		3	422.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen	laporan	42	7.687.144.995		2	248.960.400	1,00	7.500.000	1	7.500.000	50,00	3,01	1,00	7.500.000	2,38	0,10	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan	Laporan	9	511.401.684	 	2	124.000.000	-	3.151.000	-	3.151.000	-	2,54	-	3.151.000	-	0,62	
	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan	Laporan	6	2.953.215.980		2	476.182.000	-	126.000.000	-	126.000.000	-	26,46	-	126.000.000	-	4,27	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah laporan	Laporan	6	233.417.323	\vdash	1	882.787.800	_	_	 		_	_	_				
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan (Provinsi)	dokumen	6	511.773.233		4	695.140.000	-	3.750.000	-	3.750.000		0,54	-	3.750.000	-	0,73	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Succion 1 to 1	Jumlah dokumen	Dokumen	3	2.113.151.090		5	974.975.000	1,00	76.506.000	1	76.506.000	20,00	7,85	1,00	76.506.000	33,33	3,62	
	Analisis Data dan informasi Perencanaar Pembangunan Daerah	Jumlah laporan	laporan	14	1.364.185.684		1	502.975.000	-	40.880.000	-	40.880.000	-	8,13	-	40.880.000	-	3,00	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan	laporan	14	3.139.446.122		3	472.000.000	1,00	16.500.000	1	16.500.000	33,33	3,50	1,00	16.500.000	7,14	0,53	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	laporan	9	1.521.442.263		1	271.249.800	-	19.126.000	-	19.126.000			-	19.126.000	-	1,26	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	692.545.478		3	1.301.810.400	3,00	15.630.200	3	15.630.200	100,00	1,20	3,00	15.630.200	100,00	2,26	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	1	925.458.381		2	150.000.000	1,00	-	1	-	50,00	-	1,00	-	100,00	-	
	di Provinsi Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan	laporan	66	3.617.748.767		1	80.000.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil monev	dokumen	6	1.636.975.683		14	247.374.400	3,0	15.630.200	3	15.630.200	21,43	6,32	3,00	15.630.200	50,00	0,95	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaar Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil fasilitasi/evaluasi	dokumen	3	272.946.452		5	824.436.000	3,00	-	3	-	60,00	,	3,00	-	100,00	-	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833.084.161		100	11.088.793.100	100,00	1.377.086.300	100	1.377.086.300	100,00	12,42	100,00	1.377.086.300	100,00	3,64	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	15	614.128.493		3	4.016.563.000	-	85.573.700	-	85.573.700	-	2,13	-	85.573.700	-	13,93	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	100	37.833.084.161		2	309.820.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil asistensi	dokumen	К 9	Rp 7.074.746.916	K Rp	K 2	Rp 66.945.700	K -	Rp -	К -	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	К -	Rp -	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil monev	dokumen	6	420.808.562		2	194.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	122.349.575		1	57.000.000	-	÷	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	306.927.188		4	2.395.000.000	1,00	76.017.000	1	76.017.000	25,00	3,17	1,00	76.017.000	16,67	24,77	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil asistensi	dokumen	3	142.191.000		4	82.740.800	1,00	9.556.700	1	9.556.700	25,00	11,55	1,00	9.556.700	33,33	6,72	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil monev	dokumen	12	4.152.378.164		4	796.127.900	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	373.484.232		2	114.000.000	-	÷	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	12	848.520.274		3	6.596.216.960	1,00	679.856.600	1	679.856.600	33,33	10,31	1,00	679.856.600	8,33	80,12	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	708.087.921		5	2.164.849.950	1,00	23.130.000	1	23.130.000	20,00	1,07	1,00	23.130.000	16,67	3,27	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	19.507.304.818		4	728.631.520	-	600.000	-	600.000	-	0,08	-	600.000	-	0,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil monev	dokumen	12	1.316.145.426		4	954.038.490	1,00	19.750.000	1	19.750.000	25,00	2,07	1,00	19.750.000	8,33	1,50	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	714.365.009		3	171.000.000	1,00	61.053.000	1	61.053.000	33,33	35,70	1,00	61.053.000	8,33	8,55	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	12	1.122.864.514		2	2.226.697.000	-	47.463.600	-	47.463.600	-	2,13	-	47.463.600	-	4,23	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	3.261.740.437		2	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil monev	dokumen	6	1.493.870.050		2	290.000.000	-	91.130.000	-	91.130.000	-	31,42	-	91.130.000		6,10	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	426.478.831		2	38.000.000	-	436.730.000	-	436.730.000	-	1.149,29	-	436.730.000	-	102,40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Renst sampai dg R Thn Lalu	ra Target Kinerja enja Berjalan y	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angg	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian I Realisasi Angga Tahun 202	ran Renja	Renstra (Akhir T	ja dan Anggaran ahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	n nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K I	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
oordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan ewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	6	3.411.830.649		3	3.733.333.700	1,00	611.656.000	1	611.656.000	33,33	16,38	1,00	611.656.000	16,67	17,93	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	7.760.009.902		2	237.234.500	1,00	580.232.300	1	580.232.300	50,00	244,58	1,00	580.232.300	16,67	7,48	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	11.251.032.427		2	141.417.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil monev	dokumen	6	5.358.514.924		2	85.788.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	663.708.718		1	2.415.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	880.827.024		2	480.650.000	-	24.363.700	-	24.363.700	-	5,07	-	24.363.700	-	2,77	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil asistensi	dokumen	3	725.531.258		4	141.417.900	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1,03	-	1.450.000	-	0,20	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil monev	dokumen	6	1.398.271.579		4	193.825.000	-	5.610.000	-	5.610.000	-	2,89	-	5.610.000	-	0,40	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	698.367.957		2	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.916.865.961		84,44	826.621.500	0	77.462.431	-	77.462.431	-	9,37	-	77.462.431	-	2,66	INSPEKTORAT
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dokumen	280	2.923.408.414		97	826.621.500	-	77.462.431	-	77.462.431	-	9,37	-	77.462.431	-	2,65	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jlh Dok Laporan Hasil Evaluasi	Dokumen	186	506.495.268		62	148.414.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Laporan Kinerja	Jlh Dok Laporan Hasil	Dokumen	24	952.099.099		8	248.985.500	1	-	1		12,50	-	1,00	-	4,17	-	
	Pengawasan Umum dan Teknis	Review Jih Dok Lap dan Hasil	Dokumen	70	1.464.814.047		27	429.222.000	-	77.462.431	-	77.462.431	-	18,05	-	77.462.431	-	5,29	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten/Kota	Evaluasi Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529.078.823		17,77	716.725.400	-	1.500.000	-	1.500.000	-	0,21	-	1.500.000	-	0,06	INSPEKTORAT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	328	2.065.293.547		85	716.725.400	-	1.500.000	-	1.500.000	-	0,21	-	1.500.000	-	0,07	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jlh Dok Laporan Pembinaan Pendampingan dan Asistensi PD	dokumen	318	1.121.493.498		82	428.621.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jlh Dok Laporan Hasil Monev PMRPB	dokumen	4	277.495.002		1	92.862.000	=	=	-	-	-	-	-	-	-	i	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jlh Dok Laporan Kegiatan	dokumen	6	666.305.047		2	195.241.700	-	1.500.000	-	1.500.000	-	0,77	-	1.500.000	-	0,23	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842.393.557		ВВ	1.147.912.100	ВВ	65.154.000	ВВ	65.154.000	100,00	5,68	ВВ	65.154.000	-	1,70	Biro Organisasi

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Rensti sampai dg Re Thn Lalu	ra Target Kinerja enja Berjalan y	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kin	erja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ıran Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K R		Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
giatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis batan		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan dokumen analisis jabatan yang sesuai ketentuan	%	100	498.328.606		1	405.050.400	-	31.524.000	-	31.524.000	•	7,78	-	31.524.000	-	6,33	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang- undangan, Jumlah dokumen UPTO/UPTB Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	dokumen	6	215.079.792		6	174.820.700		8.300.000	-	8.300.000		4,75	-	8.300.000	-	3,86	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perangkat daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	dokumen	22	103.733.324		22	84.316.300		9.800.000	-	9.800.000		11,62	1	9.800.000		9,45	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja yang tersusun, jumlah sosialisasi peraturan penataan anjab abk, jumlah dokumen data jabatan struktural lingkup provinsi, jumlah dokumen hasil validasi Anjab, ABK dan Evjab Kab/Kota	dokumen	47	179.515.490		47	145.913.400		13.424.000	-	13.424.000		9,20		13.424.000		7,48	
egiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan kuntabilitas Kinerja		Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang baik	%	100	913.933.761		100	742.861.700	5,909	6 33.630.000	0	33.630.000	0,06	4,53	0,06	33.630.000	0,06	3,68	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten / Kota yang nilai PMPRB baik, Nilai PMPRB Provinsi	Nilai	А	236.215.400		В	192.000.100	E	9.010.000	В	9.010.000	100,00	4,69	В	9.010.000		3,81	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah dan jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Dokumen	35	225.755.369		35	183.498.000		4.900.000	-	4.900.000	-	2,67	-	4.900.000	-	2,17	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Keria	PD	35	98.332.852		35	79.926.700		-	-	-		,	-	-		-	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki SOP tata kelola Pemerintahan	PD	35	89.390.873		35	72.658.500		4.340.000	-	4.340.000	-	5,97	-	4.340.000	-	4,86	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan	Inovasi, PD	20	264.239.267		20	214.778.400		15.380.000	-	15.380.000	-	7,16	-	15.380.000	-	5,82	
ROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI AERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.045.504		100	2.833.650.000		364.044.756	-	364.044.756	-	12,85	-	364.044.756	-	3,84	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					2.778.249.879			830.000.000,00		63.727.800	-	63.727.800		7,68		63.727.800		2,29	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan				794.553.356			237.372.200,00		26.887.800	-	26.887.800		11,33	-	26.887.800		3,38	
	Pemerintahan			I		1 1	1		1	1	1	1						·	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Iraluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Realisasi Kinerj Renstra (Akhir Ta Rei	hun Pelaksanaan	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
		outcomey		К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	D.,	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan			N.	720.804.546	к кр	R	215.339.800,00	N.	- KP	-	- кр	N.	- кр	- N	nρ -		Rp -	
	Umum																		
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Penataan Wilayah				1.262.891.976 4.928.620.306			377.288.000,00 1,472.421.500.00		36.840.000 263.497.741	-	36.840.000 263.497.741		9,76 17.90	-	36.840.000 263.497.741		2,92 5.35	
Pelaksanaan Otonomi Daeran	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah				1.933.939.071			577.762.800,00		101.164.600	1	101.164.600		17,51	-	101.164.600		5,35	
	dan DPRD													,				5,25	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				652.721.357			195.000.000,00		3.800.000	-	3.800.000		1,95	-	3.800.000		0,58	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan				2.341.959.878			699.658.700,00		158.533.141	-	158.533.141		22,66	-	158.533.141		6,77	
	Pemerintahan													,				-,	
Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.778.175.320			531.228.500,00		36.819.215	-	36.819.215		6,93	-	36.819.215		2,07	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				763.762.649			228.173.500,00		23.379.400	-	23.379.400		10,25	-	23.379.400		3,06	
	Fasilitasi Kerjasama Badan				473.361.562			141.416.400,00		9.181.400	-	9.181.400		6,49	-	9.181.400		1,94	
	Usaha/Swasta																		
Data Data Canalan Kasintan (Sub Kasintan	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				541.051.109			161.638.600,00 20.847.306.100		4.258.415 2.117.784.687	-	4.258.415 2.117.784.687		2,63 23,48	-	4.258.415 2.117.784.687		0,79 5.08	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					71.050.807.891			20.847.306.100		2.11/./84.687		2.117.784.687	14,28	23,48		2.117.784.687	9,77	5,08	
Sasaran :		Indeks Profesionalisme	Point	0,72			0,68												
Meningkatnya Profesionalisme ASN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		ASN Nilei Asnak Sistem	Nilai					6		200		266				266			Dadan Kanagawalan Dani 1
PROGRAM REPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Aspek Sistem Informasi	INITAL	19	21.515.000.000		16	6.500.000.000		266.535.585	1 -	266.535.585	-	4,10	-	266.535.585	-	1,24	Badan Kepegawaian Daerah
		Nilai Aspek Perencanaan	Nilai	80			80				-	-	-		-		-		
		dan Pengadaan																	
		Nilai Aspek	Nilai	135			88	+			 			 					
		Pengembangan Karir,	141101	155							1	_	_		-	•			
		Promosi dan Mutasi																	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian,	Nilai	136			132				-	-	-		-	-	-		
		Penghargaan, Disiplin																	
		serta Perlindungan dan																	
		Pelayanan																	
		Nilai Aspek Sistem	Nilai	19	-		16	+		 	-		_			-	_		
		Informasi	141101	15			10				1	· ·	· -		-	•]		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi		Jumlah informasi		4170	3.699.062.520		1390	853.673.400	741,0952137	36.206.878	741	36.206.878	53,32	4,24	741,10	36.206.878	17,77	0,98	
Kepegawaian ASN		pegawai yang dikelola																	
ASIN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan	Jumlah usulan Formasi		4500	15.282.886		1500	3.527.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ASN	CPNS/PPPK									1								
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis	Jumlah Formasi		1200	112.747.576		400	26.020.000	109	7.106.844	109	7.106.844	27,25	27,31	109,00	7.106.844	9,08	6,30	
	dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	CPNS/PPPK																	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS	Jumlah CPNS/P3K		1200	1.904.365.497		400	439.491.400	0	-	-	-	-	-	-		-	-	
	dan PPPK	terseleksi									ļ						ļ		
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi		30	136.493.030		10	31.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CPNS/PPPK																	
	Perumusan Bahan Kebijakan	jumlah koordinasi		3	20.365.626		1	4.700.000	0	1.000.000	-	1.000.000	-	21,28	-	1.000.000	-	4,91	
	Pemberhentian ASN	perumusan bahan																	
		kebijakan pemberhentian ASN																	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah keputusan		735	264.809.478		245	61.113.000	41	12.485.034	41	12.485.034	16,73	20,43	41,00	12.485.034	5,58	4,71	
	Pemberhentian	pemberhentian PNS dan																	
	Evaluasi Pemberhentian ASN	PTT jumlah dokumen analisis		3	105.727.934		1	24.400.000	n		 	_	_					 	
		zero growth kebutuhan			103.727.334		*	24.400.000	U		1	1	_		_	-			
		ASN																	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI		0	-				0		-	-			-				
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan			3	18.849.036		1	4.350.000	1	2.615.000	1	2.615.000	100,00	60,11	1,00	2.615.000	33,33	13,87	
	Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Data dan					Ī -		-		1				_,		12,35	_,	
	Describilities Claters Informati	Informasi ASN						488.845.555			===								
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam		42429	777.966.944		14143	179.540.000	560	13.000.000	560	13.000.000	3,96	7,24	560,00	13.000.000	1,32	1,67	
	-,	SIMPEG/SIMADU																	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata		41850	231.093.533		13950	53.332.000	3.348	-	3.348	-	24,00	-	3.348,00	-	8,00	-	
1		Naskah yang diakuisisi											1						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Re	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capa Kin. Renstra sampai dg Re Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ıran Renja	Renstra (Akhir	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	к	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik		41850	111.360.980		13950	25.700.000	3.348	-	3.348	-	24,00	-	3.348,00	-	8,00	-	
utasi dan Promosi ASN		jumlah SK mutasi, kenaikan pangkat dan promosi		10680	3.492.141.693		3560	805.920.000		163.957.682	-	163.957.682	-	20,34	-	163.957.682	-	4,70	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT		690	365.757.991		230	84.410.000		4.258.000	-	4.258.000	-	5,04	-	4.258.000	-	1,16	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala		9000	1.037.953.669		3000	239.540.000		6.230.000	-	6.230.000	-	2,60	-	6.230.000	-	0,60	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural		1200	2.088.430.033		400	481.970.000		153.469.682	-	153.469.682	-	31,84	-	153.469.682	-	7,35	
engembangan Kompetensi ASN		Jumlah Pegawai yang terpetakan Kompetensinya		1200	1.415.601.711		400	326.694.000		39.468.400	-	39.468.400	-	12,08	-	39.468.400	-	2,79	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling		90	157.725.279		30	36.400.000		3.600.000	-	3.600.000	-	9,89	-	3.600.000	-	2,28	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya		1200	166.131.516		400	38.340.000		26.366.400	-	26.366.400	-	68,77	-	26.366.400	-	15,87	
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi		300	16.465.825		100	3.800.000		255.000	-	255.000	-	6,71	-	255.000	-	1,55	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal		240	111.581.969		80	25.751.000		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		30	269.562.902		10	62.210.000		732.000	-	732.000	-	1,18	-	732.000	-	0,27	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi		0	-					2.850.000	-	2.850.000			-	2.850.000			
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta		900	144.465.956		300	33.340.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi		60	92.884.590		20	21.436.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional		3	47.781.226		1	11.027.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional		1320	200.189.778		440	46.200.000		2.005.000	-	2.005.000	-	4,34	-	2.005.000	-	1,00	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK		120	121.717.118		40	28.090.000		3.660.000	-	3.660.000	-	13,03	-	3.660.000	-	3,01	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional		6	87.095.552		2	20.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
enilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai		38679	1.356.602.059		12893	313.078.000		26.902.625	-	26.902.625	-	8,59	-	26.902.625	-	1,98	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluai Kinerja Aparatur		9	42.616.157		3	9.835.000		300.000	-	300.000	-	3,05	-	300.000	-	0,70	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik		38679	420.896.842		12893	97.135.000		10.840.000	_	10.840.000	-	11,16	-	10.840.000	-	2,58	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur		36	166.530.163		12	38.432.000		330.000	-	330.000	-	0,86	-	330.000	-	0,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir T	ia dan Anggaran ahun Pelaksanaan nja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan		72	97.070.376		24	22.402.000		12.057.625		12.057.625	-	53,82	-	12.057.625	-	12,42	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya		600	160.593.800		200	37.062.000		750.000		750.000	-	2,02	-	750.000	-	0,47	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur		3	72.076.986		1	16.634.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN		138	243.672.558		46	56.235.000		375.000	-	375.000	-	0,67	-	375.000	-	0,15	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin		90	51.161.053		30	11.807.000		750.000	-	750.000	-	6,35	-	750.000	-	1,47	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS		60	14.160.609		20	3.268.000		750.000	-	750.000	-	22,95	-	750.000	-	5,30	
	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN		36	87.823.515		12	20.268.000		750.000	-	750.000	-	3,70	-	750.000	-	0,85	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,103157895	51.655.240.040		0,086633663	16.446.056.300	0,02	209.759.700	0	209759700	22,86	1,28	0,02	209.759.700	19,20	0,41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,037425743	-		0,033415842		0,00		-		-		-	-	-		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,145544554	-		0,129950495		0,02		0		14,29		0,02	-	12,76		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang	%	0,622710623			0,549450549		0,00		-		-		-	-	-		
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Tersertifikasi Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	org	630	3.017.260.627		210	960.639.000	30	29.970.550	30	29.970.550	14,29	3,12	30,00	29.970.550	4,76	0,99	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Diklat Teknis	dok	3	248.451.557		1	79.102.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Pembelajaran Diklat Teknis	Dok	3	188.076.443		1	59.880.000	0	-	,	-	-	-	-	-	-		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti , Pelayanan Dasar dan Pilihan	org	180	2.178.461.048		60	693.581.000	0	29.970.550	-	29.970.550	-	4,32	-	29.970.550	-	1,38	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Non Pelayanan Dasar	org	90			30		30		30	-	100,00		30,00	-	33,33		
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Penunjang	org	180			60		0		-	-	·		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Rensti sampai dg Re Thn Lalu	ra Target Kinerja enja Berjalan y	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kin	erja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan ran Renja yang raluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K R	р К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		Jumlah ASN yang	org	90			30			0	-	-	-		-	-	-		
		mengikuti																	
		Pengembangan																	
		Kompetensi Teknis																	
		Umum																	
		Jumlah ASN yang	org	90			30		'	0	-	-	-		-	-	-		
		mengikuti																	
		Pengembangan Kompetensi Pilihan																	
		Jabatan Administrasi																	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,	Jumlah Dokumen	Dok	1	402.271.578		1	128.075.700		n -	_	_	_	-	-	_	-	-	
	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Evaluasi Pasca Diklat	DOK	1	402.271.376		-	120.075.700			-	-	_		_	-	-	-	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Tekhnis																	
	umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan																		
	Administrasi Penyelenggara Urusan																		
	Pemerintahan Konkuren, Perangkat																		
	Daerah Penunjang, dan Urusan																		
	Pemerintahan Umum																		
				1	ļ									ļ					
ertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan ompetensi Manajerial dan Fungsional					48.637.979.414			12.822.375.700		179.789.150	-	179.789.150			-	179.789.150			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan			1	132.057.743			42.044.700		267.400	-	267.400			-	267.400			
	Rencana Sertifikasi Kompetensi,			1															
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga			1															
	Pengembang Kompetensi, Sumber			1															
	Belajar, Kerjasama, Pengembangan																		
	Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan																		
	Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan																		
	Prajabatan, Sertajabatan Fungsional																		
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi				392.098.238			124.836.700		1.781.000	_	1.781.000			_	1.781.000			
	Penyelenggara Pemerintahan Dalam																		
	Negeri Provinsi																		
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di				671.037.778			143.638.800		600.000	-	600.000			-	600.000			
	Lingkungan Pemerintah Provinsi dan																		
	Kabupaten/Kota																		
	Barralala a Kalaraha ara Taran									22 002 600									
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber				1.542.322.945			491.046.600		22.903.600	-	22.903.600			-	22.903.600			
	Belajar																		
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga				164.865.900			46.619.000		2.660.400	-	2.660.400			-	2.660.400			
	Penyusunan Standar Perangkat				188.076.443			58.249.400		-	-	-			-	-			
	Pembelajaran Pemerintahan Dalam																		
	Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																		
				1															
	Penyelenggaraan Pengembangan	1		t	45.427.613.780			11.877.764.500	1	151.576.750	-	151.576.750	1	1	_	151.576.750		 	
	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,			1	13.427.023.700														
	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan			1															
	Fungsional, Kepemimpinan, dan			1															
	Prajabatan								<u> </u>			<u></u>	<u></u>	<u> </u>	<u></u>				
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,				119.906.585			38.176.000		-	-	-			-	-			
	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan			1															
	Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan			1															
	Kelembagaan dan Tenaga Pengembang			1															
	Kompetensi, Pengelolaan Sumber			1															
	Belajar, dan Kerjasama, serta			1															
	Pengembangan Kompetensi Pimpinan			1															
	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1															
	neperimpinan, dan Frajabatan			1															
ata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan asaran :		Indeks Pelayanan Publik	Point	4.55	73.170.240.040		4,23	22.946.056.300		476.295.285 179.789.150		476.295.285	7,03	9,62		476.295.285	2,69	2,24	
asaran : Ieningkatnya Kualitas Pelayanan kepada		mueks Pelayanan Publik	Point	4,55			4,23			1/9./89.150									
nasyarakat																			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase pendududk	%	98,90	880.122.401		98,70	243.082.000	·	-	-	-			-	-			inas Pemberdayaan
	1	yang memiliki KTP-el per-	1	1															lasyarakat, Pemerintahan
	1	satuan penduduk	1	1		1 1		1	l		1	1	1	1	1		1		esa, Kependudukan dan
																			encatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi (Kin. Rei sampai dg Thn L	nstra T g Renja .alu	Berjalan ya	an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)		rja Pada Triwulan I	Angga Die	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja 21 (%)	Renstra (Akhi	nerja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna 023 (%)	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional				490.294.530				135.415.000	-	-	-	-			-	-			
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				108.620.433				30.000.000	=	-	-	-			-	-			
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					281.207.438				77.667.000	-	-	-	-			-	-			
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk				208.793.817				57.667.000	-	-	-	-			-	-			
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk				72.413.622				20.000.000	-	-	-	-			-	-			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654.257.000			100	180.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil					654.255.625				180.699.600,00	-	-	-	-		-	-	-		-	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil				654.255.625				180.699.600,00	-	-	-	-		-	-	-			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3.155.081.000			100	871.406.000		-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					692.574.742				191.283.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				31.922.459				8.816.700,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				430.597.827				118.927.300,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				189.443.449				52.322.600,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi				40.611.007				11.216.400,00		-	-	-		-	-	-		-	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					2.462.507.039				680.122.600,00		-	-	-		-	-			-	
	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				496.033.310				137.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1.966.473.729				543.122.600,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	25	266.644.000			15	47.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					171.982.352				47.500.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				171.982.352				47.500.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947.033.421			60	4.644.327.700		1.201.025.434	-	1.201.025.434	-	25,86	-	1.201.025.434	-	7,09	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Rer Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ran Renja	Renstra (Akhir T	ja dan Anggaran ahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian Ki nealisasi Anggana s/d Tahun 202	n nenstna
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten	%	K 85	Rp 16.947.033.421	K Rp	K 75	Rp 4.644.327.700	К	Rp 1.201.025.434	K -	Rp 1.201.025.434	К -	Rp 25,86	к -	Rp 1.201.025.434	-	7,09
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Informasi Publik (%) Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	5	912.845.710		1	250.165.000	0	17.640.012		17.640.012	-	7,05	-	17.640.012	-	1,93
		Opini dan Aspirasi																
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media Publik	Informasi	2117	4.013.523.491		610	1.099.904.500	158	247.200.000	158	247.200.000	25,90	22,47	158,00	247.200.000	7,46	6,16
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	Informasi	2070	290.091.285		300	79.499.400	50		50	-	16,67	,	50,00	-	2,42	
	Layanan Hubungan Manusia	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam Penyebarluasan Informasi	Lembaga	5	91.223.633		5	24.999.800	5		5	-	100,00		5,00	-	100,00	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	1440	277.404.895		30	76.022.700	0		-	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang Terselesaikan	Kasus	2	3.921.905.768		6	1.074.796.700	0	221.239.622	-	221.239.622	-	20,58	-	221.239.622	-	5,64
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	954	6.345.476.189		15	1.738.975.200	15	687.970.800	15	687.970.800	100,00	39,56	15,00	687.970.800	1,57	10,84
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Unit	30	1.094.562.451		10	299.964.400	1	26.975.000	1	26.975.000	10,00	8,99	1,00	26.975.000	3,33	2,46
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229.379.686		45	1.707.159.000		121.310.000	-	121.310.000	-	7,11	-	121.310.000	-	1,95 Dinas Komunikasi, Informati dan Statistik
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terintegrasi	6.229.379.686		Terstandarisasi	1.707.159.000	0	121.310.000	-	121.310.000		7,11	•	121.310.000		1,95
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e- government	Dokumen	6	1.604.833.588		2	439.804.000	0	98.660.000	-	98.660.000	-	22,43	-	98.660.000	-	6,15
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	2.997.632.565		40	821.500.000	40	14.000.000	40	14.000.000	100,00	1,70	40,00	14.000.000	86,96	0,47
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	1.364.351.572		18	373.900.000	5	8.650.000	5	8.650.000	27,78	2,31	5,00	8.650.000	16,67	0,63
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	9	262.561.961		1	71.955.000	0	-		-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809		20	419.500.000		89.362.000	-	89.362.000	-	21,30	-	89.362.000	-	5,84 Dinas Komunikasi, Informati dan Statistik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	1.530.744.809		30	419.500.000	0	89.362.000	-	89.362.000	-	21,30	-	89.362.000	-	5,84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang	Jenis	550	136.576.008		520	37.428.600	248	2.862.000	248	2.862.000	47,69	7,65	248,00	2.862.000	45,09	2,10

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Re	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ıran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp
	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	953.646.353		55	261.346.400		75.000.000	-	75.000.000	-	28,70	-	75.000.000	-	7,86
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang	Jenis	20	67.122.886		10	18.395.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapastitas Kelembagaan	terbangun Jumlah Perangkat	OPD	46	79.657.114	 	46	21.830.000		_	-	_				<u> </u>		_
	Statistik Sektoral	Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah			,500,111			1103000										
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Rekomendasi Statistik	OPD	7	293.742.449		5	80.500.000		11.500.000	-	11.500.000	-	14,29	-	11.500.000	-	3,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492.430.577		30	409.000.000		41.836.500	-	41.836.500	-	10,23	-	41.836.500	-	2,80 Dinas Komunikasi, Informat dan Statistik
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)	%	60	1.172.050.615		40	321.200.000		41.581.500	-	41.581.500	-	12,95	-	41.581.500	-	3,55
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	6	143.988.534		2	39.460.000	0	-	-	-	-	•	-	-	·	·
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	16	663.164.629		1	181.740.000	0	31.381.500	-	31.381.500	-	17,27	-	31.381.500	-	4,73
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah PengamananInformasi Perangkat Daerah	Insiden	14	282.795.525		18	77.500.000	1	10.200.000	1	10.200.000	5,56	13,16	1,00	10.200.000	7,14	3,61
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	82.101.927		15	22.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Komunikais Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	320.379.963		32	87.800.000		255.000	-	255.000	-	0,29	-	255.000	-	0,08
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Komunikasi Sandi	OPD	46	320.379.963		15	87.800.000	0	255.000	-	255.000	-	0,29	-	255.000	-	0,08
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300.351.716		75	84.705.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan		1	244.705.400		1	31.405.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan		1	244.705.400		1	31.405.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Renst sampai dg Ro Thn Lalu	ra Target Kinerja enja Berjalan	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K F	р К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.405.712.853		100	976.769.200		14.519.100	-	14.519.100		1,49	-	14.519.100	-	0,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Perpustakaan	Perpustakaan	1572	2.902.773.133		524	832.524.500		14.519.100	-	14.519.100	-	1,74	-	14.519.100	-	0,50	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan	Kunjungan	127000	446.258.337		37000	127.988.300		11.019.100	-	11.019.100	-	8,61	-	11.019.100	-	2,47	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan	4	1.978.709.038		524	567.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang Terbina	kab/kota	10	235.018.333		10	67.404.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka	Judul	3300	107.296.587		1000	30.773.000		3.500.000	-	3.500.000	-	11,37	-	3.500.000	-	3,26	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang Terdata	kab/kota	10	135.490.837		10	38.859.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624.349.821		100	179.065.500		2.046.400	-	2.046.400	-	1,14	-	2.046.400	-	0,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Eksemplar	7500	170,945,816.71		2500	49,027,800.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia	Eksemplar	7500	170,945,816.71		500	49,027,800.00		-	-	-	-		-	-	-		
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar	2250	224,357,013.90		700	64,346,300.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting)	Judul	2650	126,867,152.76		500	36,385,900.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi yang terhimpun (hunting)	Judul	690	97,489,861.14		200	27,960,400.00		-	-	-	•		-	-			
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Naskah	30	229,046,990.16		10	65,691,400.00		2.046.400	-	2.046.400	-		-	2.046.400	-		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Naskah	30	102,483,181.33		10	29,392,500.00		-	•	-	-		-	-	-		
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (Online)	Naskah	30	126,563,808.82		10	36,298,900.00		2.046.400	-	2.046.400	-		-	2.046.400	-		
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					32.331.026.285			8.891.808.800		1.470.099.434		1.470.099.434	8,34	6,37		89.519.100	5,20	1,72	
Misi NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkata Tujuan : Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	n kualitas sumber daya manusia sebagai p	ondasi daya saing daerah Indeks Kesehatan	Point	73,04615385			71,96923077												
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48			66,78												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.192.636.948		85	150.429.928.842		17.791.964.265	-	17.791.964.265	-	11,83	-	17.791.964.265	-	3,63	Dinas Kesehatan
		Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97			97					-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir I	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawak
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		Persentase RS yang	%	80			65				-	-	-	·	-	-	-		
		memenuhi sarana																	
		prasarana dan alat																	
		kesehatan yzng sesuai																	
		standar																	
		Pesentase pelayanan	%	100			100				-	-	-		-	-	-		
		kesehatan bagi orang																	
		yang terdampak dan																	
		beresiko pada situasi KLB																	
		Persentase kab/kota	%	100			80					_			-	-	-		
		melaksanakan layanan	,,,	100															
		penyakit menular dan																	
		tidak menular sesuai																	
		standar minimal 80%																	
		Persentase Kualitas	%	100			94				-	-	-		-	-	-		
		Lingkungan yang					1												
		memenuhi syarat sesuai	ĺ																
		standar	01		1						 					ļ	1	+-+	
		Persentase fasilitas	%	100			100					-	-		-	-	-		
		pelayanan kesehatan yang menggunakan obat					1												
		rasional					1												
		1					1												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana				İ	389.682.139		1	119.018.839,00		5.000.000	-	5.000.000		4,20	-	5.000.000		1,28	
dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan							1							'-					
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							1												
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan				389.682.139			119.018.839,00		5.000.000	-	5.000.000		4,20	-	5.000.000		1,28	
	Minuman serta Fasilitas Kesehatan																		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana	Lainnya																		
dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.634.345.730			501.964.400,00		15.160.000	-	15.160.000		3,02	-	15.160.000		0,93	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas				266.672.510			81.904.400,00		10.160.000	-	10.160.000		12,40	-	10.160.000		3,81	
	Kesehatan Lainnya				4 267 672 220			420,000,000,00		5 000 000		F 000 000		4.40		F 000 000		0,37	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.367.673.220			420.060.000,00		5.000.000	-	5.000.000		1,19	•	5.000.000		0,37	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP					182.411.964.543			56.025.056.800,00		17.551.263.000	-	17.551.263.000		31,33	-	17.551.263.000		9,62	
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan				774.614.349		1	237.911.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Akibat Bencana dan/atau Berpotensi						1												
	Bencana						1												
	-						1												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi				655.641.495			201.370.300,00		2.430.000	-	2.430.000		1,21	-	2.430.000		0,37	
	Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar						1												
	Biasa (KLB)			ļ			1												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia				2.945.529.741		1	904.674.600,00		38.010.000	-	38.010.000		4,20	-	38.010.000		1,29	
	Produktif			1	2 504 005 005		 	4 002 002 402 00										1	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Laniut				3.561.835.085		1	1.093.963.400,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	1		l .	1.836.434.213		t	564.032.800,00		37.950.000	_	37.950.000		6,73	-	37.950.000		2,07	
	dan Olahraga						1			222.000				1,,,,		21.123.000		_,,,,	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi				1.930.300.173			592.862.300,00		42.950.000	-	42.950.000		7,24	-	42.950.000		2,23	
	Kesehatan			ļ															
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.734.984.709			840.008.900,00		132.378.600	-	132.378.600		15,76	-	132.378.600		4,84	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				140.003.686			43.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				725.817.529			222.923.800,00		38.840.000	-	38.840.000		17,42	-	38.840.000		5,35	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang			1	432.172.821		1	132.735.300,00		-		_		-	-	-		-	
	dengan Kecanduan NAPZA	1	1		452.172.021							_							
		1	1	1	1		1	i l		Ī	1		1	1		1	1	i l	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K Rp	K Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan			10.500.276.470		3.225.000.000,00		=	-	-		-	-	-		-	
	Khusus Pengelolaan Jaminan Kesehatan			142.013.256.528		43.617.208.900,00		17.211.484.400	-	17.211.484.400		39,46	-	17.211.484.400		12,12	
	Masyarakat																
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			744.914.032		228.789.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas			321.070.779		98.612.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Kabupaten/Kota																
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			1.119.412.172		343.810.400,00		37.220.000	-	37.220.000		10,83	-	37.220.000		3,32	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			192.098.081		59.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan			1.041.522.260		319.887.700,00		5.000.000	-	5.000.000		1,56	-	5.000.000		0,48	
	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			9.767.699.042		3.000.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Demodlers des Des 11 01											 					
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			295.152.515		90.651.600,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik			281.032.330		86.314.800,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen			27.023.967		8.300.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penyakit Potensial KLB ke Lab																
	Rujukan/Nasional Upaya Pengurangan Risiko Krisis			371.172.564		114.000.000,00		5.000.000	-	5.000.000		4,39	-	5.000.000		1,35	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Kesehatan			1.140.500.272		350.287.289,00		41.160.000	-	41.160.000		11,75	-	41.160.000		3,61	
secara Terintegrasi	Banadalasa Bata dan Informasi			4 024 427 522		246 707 200 00		44 450 000		44 450 000		42.00		44 450 000		2.00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			1.031.427.633		316.787.289,00		41.160.000	-	41.160.000		12,99	-	41.160.000		3,99	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			109.072.639		33.500.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				310.078.862		95.236.000,00		5.000.000		5.000.000		5,25	-	5.000.000		1,61	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			310.078.862		95.236.000,00		5.000.000	-	5.000.000		5,25	-	5.000.000		1,61	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3.042.202.633		929.166.080,00		20.085.400		20.085.400		2,16	-	20.085.400		0,66	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			2.745.067.922		838.413.580,00		20.085.400		20.085.400		2,40	-	20.085.400		0,73	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan			297.134.711		90.752.500,00		-		-		-	-	-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				33.543.375		10.245.000,00		37.220.000		37.220.000		363,30	-	37.220.000	1	10,96	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			33.543.375		10.245.000,00		37.220.000		37.220.000		363,30	-	37.220.000	1	10,96	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				953.424.179		291.200.000,00		117.075.865		117.075.865		40,20	-	117.075.865		12,28	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			953.424.179		291.200.000,00		117.075.865		117.075.865		40,20	-	117.075.865		12,28	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3 3.651.104.864		2 760.915.500		43.875.200	-	43.875.200	-	5,77	-	43.875.200	-	1,20	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		nahasirasiiyd		488.903.921		103.767.000,00		16.275.200	-	16.275.200		15,68	-	16.275.200		3,33	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya			120.743.018		25.627.000,00		1.551.000	-	1.551.000		6,05	-	1.551.000		1,28	
	Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya			368.160.903		78.140.000,00		14.724.200	_	14.724.200		18,84	_	14.724.200	 	4,00	
	Manusia Kesehatan			538.100.503		7.5.240.000,00		2-1.7 2-1.200		12200		20,04	Ī	2-17,2-11,200		.,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
		,		К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					2.916.233.419			618.953.500,00		27.600.000		27.600.000		4,46	-	27.600.000		0,95	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				2.625.342.018			557.213.500,00		17.600.000	-	17.600.000		3,16	-	17.600.000		0,67	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				290.891.402			61.740.000,00		10.000.000	-	10.000.000		16,20	-	10.000.000		3,44	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Daya Manusia Kesenatan	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239.953.724		30	32.181.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					202.201.567			27.118.100,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				202.201.567			27.118.100,00		-	-	-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					37.752.156			5.063.100,00		-	-	-		-	-	-		-	
(Cont.)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				37.752.156			5.063.100,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.139.610.602		83	52.457.840.808		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daeral
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										-	-	-			-	-			
	Sub Kegatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan	Jumlat alat kesehatan/kedokteran yang tersedia		1422	559.528.580.056			50.154.050.808		•	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.809.896.151		73,81	7.478.712.574		•	1	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-		80			-	-	-	-		-	-	-		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.522.964.303			6.403.206.274,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengembangan Rumah Sakit				-			-		-	-	-			-	-			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat				5.789.133.722 4.017.692.277			1.452.379.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan							1.007.959.424,00		-	-					-		_	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				267.414.492			67.089.000,00		-	-	•		-	-	-		-	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan				1.502.327.632 13.946.396.180			376.904.250,00 3.498.874.600,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.131.001.626			785.506.300,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				400.302.622			100.428.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				727.379.057			182.485.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				285.594.484			71.650.000,00		=	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			1	1.666.133.906			418.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	

						Realisasi Ca	apaian								- u				
		Indikator Kinerja		Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Kin. Rens	stra Ta		lan Anggaran Renja Tahun	Realisasi Kine	ja Pada Triwulan I		apaian Kinerja dan ran Renja yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan		
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	sampai dg l Thn Lal		Berjalan ya	ing Dievaluasi (2021)		,		aluasi (2021)	Tahun 2021 (%)		Renja)	s/d Tahun 20		OPD Penanggung Jawab
		,		K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				51.591.557				12.943.300,00		-	-	-	-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas					1.155.930.222				290.000.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi																			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.155.930.222				290.000.000,00		9	-	-	-	-	-		-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Resemblan	Persentase SPM yang	%	80	144.479.341.067			75	36.663.725.000		-	-	-		-	-	-	-	Rumah Sakit H. L. Manambai
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		mencapai target																	Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana					20.348.493.926				5.163.725.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat				20.348.493.926				5.163.725.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
	Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah					124.130.847.142				31.500.000.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
Provinsi																			
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				124.130.847.142				31.500.000.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					831.512.543.356				247.823.303.924		17.835.839.465		17.835.839.465	- 14,59		17.835.839.465	-	4,37	
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi		Persentase Balita Stunting	%	30,49				31,49											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Persentase balita	%	10,41	32.507.781.615			12,41	9.984.270.034		80.340.000	-	80.340.000	- 0,80		80.340.000	-	0,25	Dinas Kesehatan
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Wasting		·															
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah					32.507.781.615				9.984.270.034,00		80.340.000	-	80.340.000	0,80	-	80.340.000		0,25	
Provinsi	Describer Delegans Keeketer He																		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				2.224.629.923				683.261.200,00		38.730.000	-	38.730.000	5,67	-	38.730.000		1,74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.283.151.692				9.301.008.834,00		41.610.000	-	41.610.000	0,45	-	41.610.000		0,14	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5.059.563.209			50	1.228.024.250		-	-	-		-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat		, ,			4.272.631.263				1.037.025.250,00		=	-	-	-	-	-		-	
Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,				4.272.631.263				1.037.025.250,00		-	-	-	-		-		-	
	Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi					263.681.263				63.999.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
(KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi																			
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	1			263.681.263				63.999.000,00		=	-	-	-	-	-	1	-	
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					523.250.683				127.000.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				523.250.683				127.000.000,00		-	-	-	-	-	-		-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					37.567.344.824				11.212.294.284		80.340.000		80.340.000	- 13,10		80.340.000		0.22	
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM		Indeks Pendidikan	Point	63,10	37.307.344.024			62,39	11,212,234,204		00.340.000		00.340.000	13,10		30.340.000		0,22	
yang berdaya saing																			
Sasaran :		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79				13,68											
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07				7,01											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214.496.782			99,15	473.402.998.477			-	-			-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun rang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	ja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan tenja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28			93,40					-			•	-			
		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02			96,68				-	-	-		-	-	-		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6			69,4				-	-	-		-	-			
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1			1,01				-	-	-		-	-	-		
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18			1:18				-	-	-		-	-	-		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10			1:14				-	-	-		•	-	-		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Angka Drop Out (DO) SMA			739.558.577.718			239.626.744.750		819.222.300	-	819.222.300			-	819.222.300			
		Persentase Akreditasi SMA minimal B									-	-			-	-			
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru			197.109.172.830			62.891.729.000		-	-	•	-	-	-	-			
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas			23.338.162.601			7.371.520.000		-	-	-		-	-	-			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dibangun			2.297.322.762			915.894.000		182.886.000	-	182.886.000		19,97	-	182.886.000			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah) yang dibangun									-	-			-	-			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang dibangun										-			•	-			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi			313.410.326			311.190.300		190.102.800	-	190.102.800		61,09	-	190.102.800			
	Rehabilitasi Asrama Sekolah				-			183.000.000		183.000.000	-	183.000.000		100,00	-	183.000.000			
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan			1.251.368.765			578.187.700		-	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku Paket, Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa SMA :pemenuhan SPM) yang diadakan						6.900.800		-	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				3.185.496.284			1.007.557.000		-	-	-		-	-	-			
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	7,70						1.147.000		-	-	-		-	-	-			
	Ujian bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				156.631.512			1.327.635.100		208.745.000	-	208.745.000		15,72	-	208.745.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiai Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaiar Realisasi Angg Tahun 20	garan Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian Kine nealisasi Angganan r s/d Tahun 2023	enstna ODD Demonstra
				K Rp	K Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas			1.148.695.856		1.608.479.140		-	-	-		-	-	-		
	Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan				 	417.222.410		54.488.500		54.488.500		13,06		54.488.500	-	
	Tenaga Kependidikan Pada Satuan					417.222.410		54.466.500	-	54.488.500		13,06	-	54.466.500		
	Pendidikan Sekolah Menengah Atas															
	Pembinaan Kelembagaan dan					46.988.500		-	-	-		-	-	-		
	Manajemen Sekolah Menengah Atas															
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah			510.521.915.134		162.892.500.000		-	-	-		-	-	-		
	Menengah Atas															
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			236.401.648		66.793.800		-	-	-		-	-	-		
	BOS Sekolan Menengan Atas															
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah				679.448.505.653		218.727.522.927		404.673.100	-	404.673.100		0,19	-	404.673.100		
Kejuruan																
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			4.774.367.541		1.523.360.000		-	-	-		-	-	-	+ +	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		1	134.813.445.472 7.245.360.370		43.014.998.016 2.311.781.001		-	-	-		1		-	+ +	
	Pengadaan Mebel Sekolah			1.878.189.417		843.408.900		244.134.000	-	244.134.000		28,95	-	244.134.000	 	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					6.900.800			-	-			-	-		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			3.124.675.877		996.992.000		=	-	-		-	-	-	Ι Τ	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga			360.421.875	 	115.000.000						-	-	-	+	
	Peserta Didik			300.421.875		115.000.000		-	-	-		-	_	_	1	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga			109.536.908.906		34.950.000.000		14.190.000	-	14.190.000		0,04	-	14.190.000		
	Siswa															
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian			156.631.512		698.000		-	-	-		-	-	-		
	bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi			625.253.600		955.151.800		144.733.500	_	144.733.500		15,15	-	144.733.500		
	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			023.233.000		333.131.000		144.733.300		144.733.300		13,13		144.733.300		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas			217.628.996		941.835.270		-	-	-		-	-	-		
	Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan			597.939.890		251.071.900			_	_		-	-	-	-	
	Tenaga Kependidikan Pada Satuan			357.535.850		231.071.500			-	-		-	-	-		
	Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan															
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			2.006.111.916		685.525.440		-	-	-		-	-	-		
	Wanajemen Sekolah Wenengan Kejaraan															
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah			413.879.647.267		132.056.800.000		-	-	-		-	-	-		
	Menengah Kejuruan															
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			231.923.014		73.999.800		1.615.600	-	1.615.600		2,18	-	1.615.600		
	BOS Sekolan Wenengan Kejardan															
Pengelolaan Pendidikan Khusus				46.755.664.713		15.317.973.500		19.450.000	-	19.450.000		0,13	-	19.450.000		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			791.047.663		214.540.000		=	-	-		-	-	-	Ι Τ	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana			20.007.974.171		6.383.955.000		_				-		-	+ +	
	dan Utilitas Sekolah			20.007.374.171		0.363.535.000		-				-	·		1	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi					158.876.100		19.450.000	-	19.450.000		12,24		19.450.000		
	Satuan Pendidikan Khusus			200								1			+ +	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			313.410.326		285.290.500		-	-	-		-	-	-	1	
	Pengembangan Karir Pendidik dan					84.367.900		=	-	-		-	-	-	 	
	Tenaga Kependidikan pada Satuan														1	
	Pendidikan Khusus			450,000,000		5004:100						1			 	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			156.705.163		58.944.100		-	-	-		-	-	-	1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>										<u> </u>	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah			25.448.918.464		8.120.000.000		-	-	-		-	-	-		
	Pendidikan Khusus															
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			37.608.926		11.999.900		-	-	-		-	-	-		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase	%	100 1.986.884.736		100 567.849.300		-	-	-	_	-	-	-	-	- Dinas Pendidik
		Pengembangan													1	Kebudaya
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan		Kurikulum		1.654.483.076		472.849.300,00						1			+	
Penetapan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				1.654.483.076		472.849.300,00		-	-	- 1		-	-	-	1	-
~	Penyusunan Silabus Muatan Lokal			448.292.624		128.121.500,00		-	-	-		-	-	-		-
	Pendidikan Menengah			i I	1 1				1			1				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian R nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				1.206.190.452			344.727.800,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004.195		100	66.960.761.300		20.926.827.700	-	20.926.827.700	-	31,25	-	20.926.827.700	-	10,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100			99,55				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100			70				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100			50				-	-	-		-	-	-		
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80			5,5				-	-	-		-	-	-		
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi					208.215.004.195			66.960.761.300,00		20.926.827.700	-	20.926.827.700		31,25	-	20.926.827.700		10,05	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				204.926.015.690			65.903.041.300,00		20.816.886.600	-	20.816.886.600		31,59	-	20.816.886.600		10,16	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3.288.988.506			1.057.720.000,00		109.941.100	-	109.941.100		10,39	-	109.941.100		3,34	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	194.889.101		100	60.769.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					146.783.381			45.769.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				105.871.069			33.012.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				40.912.312			12.757.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					48.105.720			15.000.000,00		=	-	-		-	-	-		-	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				11.224.668			3.500.000,00		=	-	-		-	-	-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				36.881.052			11.500.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187		35	200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					831.855.187			200.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi				831.855.187			200.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332		100	3.245.457.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahra
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100			100			-	-	-	-		-	-	-		Dinas Pemuda dan Olahrag
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	480	11.196.717.332		0	2.271.242.250		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi (Orang)	Orang	45	534.060.283		0	12.000.000		-	-	-		-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Re	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Ren Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaia Realisasi Ang Tahun 2	garan Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih (Orang)	Orang	300	479.287.279		0	2.130.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	Orang	1200	1.799.106.230		0	13.470.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan (Orang)	Orang	6	971.920.387		0	227.257.250		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang difasilitasi	Lembaga	60	7.175.198.742		20	2.015.705.000		-	-		-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	Orang	180	237.144.411		0	680.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	31.488.202.013		100	8.845.877.100		2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	22,61	·	2.000.000.000	-	6,35	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang MenjadiKewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar (%)	%	50	7.994.773.702		40	2.150.176.850		=	-	ı	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Oahraga yang Dibangun (Orang)	Orang	6	7.994.773.702		0	2.150.176.850		-	-			-	-	-	-		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	45	4.997.845.464		0	30.122.200		-	-	-		-	-	-	-	-	
-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga	Event	15	341.995.244		2	30.122.200		-	-		-	-	-	-	-	-	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional (Orang)	Orang	450	4.655.850.220		0	-		-	-	-			-	-	-	-	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor	3	4.203.011.832		3	1.039.564.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina (Orang)	Orang	36	4.203.011.832		12	1.039.564.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahraga yang Dibina	Lembaga	30	14.292.571.014		10	4.015.165.000		2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	49,81	-	2.000.000.000	-	13,99	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Difasilitasi (Lembaga)	Lembaga	30	14.292.571.014		10	4.015.165.000		2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	49,81	-	2.000.000.000	-	13,99	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					1.740.228.049.346			553.283.712.177		22.926.827.700		22.926.827.700	-	6,52	-	22.926.827.700		1,84	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Rer sampai dg Thn La	nstra Target Kinerja d g Renja Berjalan ya	an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Ki	nerja Pada Triwulan I	Angg	Capaian Kinerja dan garan Renja yang evaluasi (2021)	Tingkat Capaiar Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
Misi NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan	sumber daya alam dan lingkungan yang be I	erkelanjutan	2011	66.55															
Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,25			67,72												
Sasaran :		Indeks Kualitas Air	Point	43,03			42,83												
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya		Indeks Kualitas Udara	Point	87,59			87,53												
Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66			87,6												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24242424	1.024.902.303		51,51515152	318.975.200		57.392.138	-	57.392.138	-	17,99	-	57.392.138	-	5,60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	9	602.571.166		3	187.535.200		25.483.200	-	25.483.200	-	13,59	-	25.483.200	-	4,23	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH	Dokumen	1	445.639.676		1	138.694.200		21.512.200	-	21.512.200	-	15,51	-	21.512.200	-	4,83	
	Provinsi Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	yang tersedia Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersedia	Dokumen	6	156.931.490		2	48.841.000		3.971.000	-	3.971.000	-	8,13	-	3.971.000	-	2,53	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	25	422.331.136		15	131.440.000		31.908.938	-	31.908.938	-	24,28	-	31.908.938	-	7,56	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	10	218.812.769		6	68.100.000		15.360.000	-	15.360.000	1	22,56	-	15.360.000	-	7,02	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	12	133.665.363		8	41.600.000		16.548.938	-	16.548.938	-	39,78	-	16.548.938	-	12,38	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69.853.004		1	21.740.000		-	-	-	-	-		-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan	lokasi	30	2.835.284.286		10	882.411.299		56.860.000	-	- 56.860.000	-	6,44	-	56.860.000	-	2,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		kerusakannya Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	titik sampel	846	2.181.040.532		282	678.794.299		50.000.000	-	50.000.000	-	7,37	-	50.000.000	-	2,29	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	321.310.968		282	100.000.000		50.000.000	-	50.000.000	-	50,00	-	50.000.000	-	15,56	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	25	1.859.729.564		5	578.794.299		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	4	654.243.754		2	203.617.000		6.860.000	-	6.860.000	-	3,37	-	6.860.000	-	1,05	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemantauan kualitas air sungai, kualitas udara, dan air laut	kab/kota	10	654.243.754		10	203.617.000		6.860.000	-	6.860.000	-	3,37	-	6.860.000	-	1,05	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Ren Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kir	nerja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	in nenstna
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	232.926.464		1	23.583.400		-	-	-	-	-	-	-	-	- Dinas Lingkungan Hidup (Kehutanan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Persentase terbangunnya jumlah taman kehati	%	100	232,926,464		100	23,583,400		-	-	-	-		-	-	-	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan pendukung Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan	kegiatan	3	232,926,464		1	23,583,400		-	-		-		-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)		Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232.426.464		210	23.083.400		3.080.500	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33 Dinas Lingkungan Hidup (Kehutanan
Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	unit usaha	14	232.426.464		14	23.083.400		3.080.500	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	unit usaha	14	232.426.464		14	23.083.400		3.080.500	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiat an	30	605.251.864		20	188.369.500		46.880.400	-	46.880.400	-	24,89	-	46.880.400	-	7,75 Dinas Lingkungan Hidup (Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	605.251.864		20	188.369.500		46.880.400	-	46.880.400	-	24,89	-	46.880.400	-	7,75
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiat an	60	304.909.971		20	94.895.600		25.596.500	-	25.596.500	-	26,97	-	25.596.500	-	8,39
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiat an	60	300.341.893		20	93.473.900		21.283.900	-	21.283.900	-	22,77	-	21.283.900	-	7,09
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		meningkatnya kapasitas sekolah peduli	%	30	632,449,873		10	196.834.200		34.194.000	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	Dinas Lingkungan Hidup (Kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		lingkungan Jumlah kelompok peduli lingkungan yang dibina	kelompok	30	632.449.873		10	196.834.200		34.194.000	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	5,41
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	kelompok	30	632.449.873		10	196.834.200		34.194.000	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	5,41
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-		0	-			-	-			-	-		Dinas Lingkungan Hidup o Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641.333.479		20	199.599.000		43.679.390	-	43.679.390	-	21,88	-	43.679.390	-	6,81 Dinas Lingkungan Hidup (Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	60	641.333.479		20	199.599.000		43.679.390	_	43.679.390	-	21,88	-	43.679.390		6,81
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	45	319.536.689		15	99.447.800		24.808.190	-	24.808.190	-	24,95	-	24.808.190	-	7,76

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Ca Kin. Rens sampai dg I Thn Lal	tra Target Kinerja o Renja Berjalan ya	an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Iraluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	kasus	K 15	Rp 321.796.790	К	Rp К 5	Rp 100.151.200	К	Rp 18.871.200	К -	Rp 18.871.200	K -	Rp 18,84	K -	Rp 18.871.200	-	8p 5,86	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,7	#VALUE!		67,7	1.832.855.999		242.086.428		242.086.428	-	16,95		242.086.428		4,97	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.710.986.449		66,74127265	18.572.218.206		846.667.300	1	846.667.300	-	4,56	-	846.667.300	-	1,37	Dinas Lingkungan Hidup da Kehutanan
		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-		10				1	-	-		-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup da Kehutanan
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333.701.361		50	370.380.700		25.933.500	-	25.933.500	-	7,00	-	25.933.500	-	7,77	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333.701.361		50	370.380.700		25.933.500	-	25.933.500	-	7,00	-	25.933.500		7,77	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					693.158.700			231.052.900		4.680.000	,	4.680.000		2,03	-	4.680.000		0,68	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				693.158.700	1		231.052.900		4.680.000	-	4.680.000		2,03	-	4.680.000		0,68	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		tersedianya data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan	dokumen	3	846.111.385		1	1.184.029.700		33.952.500	-	33.952.500	-	2,87	-	33.952.500	-	4,01	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	Dokumen	3	548.256.118		1	120.631.000		14.932.500	-	14.932.500	-	12,38	-	14.932.500	-	2,72	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				121.668.600			40.556.200		-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung				83.783.700			27.927.900		-	-	-			-	-			
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	159.370.240		1	35.600.000		16.100.000	-	16.100.000	-	45,22	-	16.100.000	-	10,10	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	138.485.027		1	35.600.000		-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				2.771.143.800			923.714.600		2.920.000	•	2.920.000			-	2.920.000			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	16	1.224.773.148		16	9.525.242.000		78.125.700	-	78.125.700	-	0,82	-	78.125.700	-	6,38	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206.346.546		1	36.220.200		-		-	-	-	-	-		[
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kegiatan monev pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan	kegiatan	24	534.340.140		11	7.751.630.200		25.760.000	-	25.760.000	-	0,33	-	25.760.000	-	4,82	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				4.760.195.400			1.586.731.800		32.880.000	-	32.880.000			-	32.880.000			
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	КРН	24	484.086.462		11	150.659.800		19.485.700	-	19.485.700	-	12,93	-	19.485.700	-	4,03	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	805	2.068.695.441		505000	5.099.480.506		570.632.800	-	570.632.800	-	11,19	-	570.632.800	-	27,58	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan				4.157.716.200			1.385.905.400		223.897.000	-	223.897.000			-	223.897.000		5,39	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Ren sampai dg Thn La	nstra Targ Renja alu	Berjalan ya	an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)		nerja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja 1 (%)	Renstra (Akhii	nerja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggai s/d Tahun 2	nan nenstna 023 (%)	OPD Penanggung Jawab
	December des De 1 : : :			К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan				6.388.465.518				2.129.488.506		270.140.000	-	270.140.000			-	270.140.000		4,23	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan		kasus	30	1.311.290.624			10	428.106.400		46.190.800	-	46.190.800	-	10,79	-	46.190.800	-	3,52	
	Hasil Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	yang ditangani	landata.		437.308.404			1	511.586.500		28.870.000		28.870.000		5,64		28.870.000		6,60	
	Perlindungan Hutan	koordinasi pelaksanaan	kegiatan	1	437.308.404			1	511.586.500		28.870.000	-	28.870.000	-	5,64	-	28.870.000	-	6,60	
		perlindungan hutan																		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	tumlah sisik kahakayan	titik	90	220.000.442			30	644 202 700		4.535.000		4 525 000				4 525 000		0.40	
		hutan dan lahan yang	uuk	90	320.096.412			30	644.393.700		1.535.000	-	1.535.000	-	0,24	-	1.535.000	-	0,48	
	Hutan dan Lahan	ditangani																		
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Terlaksananya	11-2	4,575	321.310.968			1525	2.022.219.600		114.975.000		114.975.000		5,69		114.975.000		35,78	
(HHBK)		pengolahan HHBk di	Unit	4,575	321.310.968			1525	2.022.219.600		114.975.000	-	114.975.000	-	5,69	-	114.975.000	-	35,/8	
,		tingkat tapak																		
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan	monev kegiatan	kegiatan	3	321.310.968			1	1.844.167.700		114.975.000	-	114.975.000	-	6,23	-	114.975.000	-	35,78	
	Bukan Kayu Hayati	pengolahan HHBK yang dilaksanakan																		
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu				534.155.700				178.051.900		-	-	-			-	-			
	dengan tidak Mengurangi Fungsi																			
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Pokoknya	Terlaksananya	Industri	3	458.873.190	 		1	139.812.800		18.367.800		18.367.800	-	13,14	_	18.367.800	_	4,00	
dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun		pengolahan HHK dengan									22.22000								,,,,,,	
		kapasitas produksi <																		
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan	Jumlah industri HHK	industri	16	458.873.190	 		16	139.812.800		18.367.800	-	18.367.800	-	13,14	_	18.367.800	_	4,00	
	Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun	yang dibina dan diawasi			130.075.230				133.012.000		10.507.000		10,307,000		23,24		15.557.555		1,00	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		Cakupan kawasan	ha	30503,3	2.843.299.456		3	0503,3	884.905.820		50.420.300	-	50.420.300	_	5,70		50.420.300	-	1.77	Dinas Lingkungan Hidup dan
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi		,				,							,,,					Kehutanan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1.927.987.906			1	600.038.000		28.200.000	1	28.200.000	-	4,70	•	28.200.000	-	1,46	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3,155	585.814.157			3155	182.320.000		25.880.000	•	25.880.000	·	14,19	•	25.880.000		4,42	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta	Jumlah TSL endemik	jenis	1	321.310.968			1	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Habitat TAHURA Provinsi	yang terfasilitasi																		
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan	pengawetannya Jumlah kawasan	ha	122	128.524.387			122	40.000.000		_		<u> </u>				<u> </u>	 	 . 	
	Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan		122	120,324,307				40.000.000											
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA	Jumlah Sarpras objek	unit	1	715.617.362			1	222.718.000		1.070.000	-	1.070.000	-	0,48	-	1.070.000	-	0,15	
	Provinsi	wisata yang dibangun																		
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan	Jumlah KTH mitra	kelompok	2	144.589.936	 		2	45.000.000		1.250.000		1.250.000	-	2,78	_	1.250.000	_	0,86	
	Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	konservasi Tahura yang	por	_	144.565.550			-	43.000.300		1.250.000		250.000		2,.0		1.250.500		0,00	
	Devencement Dengel-I TALLIDA	terbentuk	Delumon		22 424 222	\vdash			40.000.000		1		1				+		1	
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan	Dokumen	4	32.131.097			4	10.000.000			-	_	-	-	-	-	-	-	
		TAHURA yang tersusun																		
Deslindunger Tumbuhan dan Catus Univ		lumlah nanat TCI		72	2.5 252			24					4						1	
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam		Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib	penangkar	72	345.259.560			24	107.453.400		1.763.400	-	1.763.400	-	1,64	-	1.763.400	-	0,51	
Lampiran (Appendix) CITES (Convension On		aturan																		
International Trade In Endangered Species) untuk																				
Kewenangan Daerah Provinsi																				
	Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah penangkar TSL	penangkar	72	345.259.560			24	107.453.400		1.763.400	-	1.763.400	-	1,64	-	1.763.400	-	0,51	
	Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	non appendix yang tertib aturan																		
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting,		Jumlah KEE, Cagar	kelompok	8	570.051.990			8	177.414.420		20.456.900	-	20.456.900	-	11,53	-	20.456.900	-	3,59	
Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Biosfer dan Geopark yang terkelola																		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	n dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	ja Pada Triwulan I	Anggai	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16	195.869.624		16	60.959.520		5.081.900	-	5.081.900	-	8,34	-	5.081.900	-	2,59	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/le mbaga	8	374.182.366		8	116.454.900		15.375.000		15.375.000	-	13,20	-	15.375.000	-	4,11	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125.242.316		13,27	661.428.500		64.395.465	-	64.395.465	-	9,74	÷	64.395.465	-	3,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Penyuluh dan Penyuluh Kehutanan Swadaya	orang	90	659.021.648		30	205.104.000		64.395.465	-	64.395.465	-	31,40	-	64.395.465	-	9,77	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	5	137.521.094		1	42.800.000		4.400.000	-	4.400.000	-	10,28	-	4.400.000	-	3,20	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	КТН	17	197.927.556		6	61.600.000		9.940.000	-	9.940.000	-	16,14	-	9.940.000	-	5,02	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	Kelompok	3	323.572.997		1	100.704.000		50.055.465	-	50.055.465	-	49,71	-	50.055.465	-	15,47	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4	14.296.328.273		4	4.449.374.500		33.402.000		33.402.000	-	0,75	-	33.402.000	-	0,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah KTA yang terbangun	Unit	578	905.081.587		130	281.684.000		33.402.000		33.402.000	-	11,86		33.402.000	-	3,69	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	468	328.328.399		100	102.184.000		1.222.000	-	1.222.000	-	1,20	-	1.222.000	-	0,37	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	110	255.442.220		30	79.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah kegiatan monev bangunan Konservasi Tanah dan Air	kegiatan	190	321.310.968		30	100.000.000		32.180.000	-	32.180.000	-	32,18	-	32.180.000	-	10,02	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900		89,07	680.998.000		30.000.000	-	30.000.000	-	4,41	-	30.000.000	-	0,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Tersedianya Perda RTR yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang Dok	dokumen	10	571.551.333		1	117.173.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				571.551.333			117.173.700,00		-	-	-		-	-	-		-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					283.059.457			58.030.000,00		9.000.000	-	9.000.000		15,51	-	9.000.000		3,18	
Kanding in Grahaming Danger	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota		Dalama	007205000	283.059.457			58.030.000,00		9.000.000	_	9.000.000		15,51	-	9.000.000		3,18	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		Terwujudnya sistem informasi/databas e pemanfaatan ruang (kawasan)	Dokumen	997395000	1.047.397.547			214.726.900,00		10.500.000	-	10.500.000		4,89	-	10.500.000	-	1,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				618.912.453			126.883.200,00		10.500.000	-	10.500.000		8,28	-	10.500.000		1,70	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Ren sampai dg Thn La	stra Targ Renja		a Anggaran Renja Tahun g Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggai	Capaian Kinerja dan ran Renja yang raluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Sistem Informasi Penataan Ruang	T	dokumen	341342500	428.485.094 273.496.018				87.843.700,00 56.069.400,00		10.500.000	-	10.500.000		18,73	-	10.500.000	ļ	3,84	
Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		Tersedianya Bahan	dokumen	341342300	273.430.010				30.003.400,00		10.300.000		10.300.000		10,73		10.500.000		3,04	
		Pengendalian Pemanfaatan																		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan	Ruang			273.496.018				56.069.400,00		10.500.000	-	10.500.000		18,73	-	10.500.000		3,84	
Date Date Consists Variation /Sub Variation	Ruang				83.993.447.393				25.248.925.026		1.024.885.065		1.024.885.065		8,83		1.024.885.065		4,75	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100	03.253.447.323			70	23.248.323.020		1.024.083.003		1.024.883.003		6,63		1.024.883.003		4,73	
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70				50												
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30				20												
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484			70	4.756.110.800		1.008.937.339	-	1.008.937.339	-	21,21	-	1.008.937.339	-	6,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Sampan			15.916.448.484				4.756.110.800		1.008.937.339	-	1.008.937.339		21,21	-	1.008.937.339		6,34	Kenutanan
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				10.380.853.500				3.460.284.500		793.041.800	-	793.041.800			-	793.041.800			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				200.691.900				66.897.300		12.330.000	,	12.330.000			-	12.330.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				3.148.514.551				1.084.590.800		203.565.539	-	203.565.539		18,77	-	203.565.539		6,47	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				352.014.600				117.338.200		-	-	-			-	-			
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				81.000.000				27.000.000		-	-	-			-	-		6,34	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	Try it St Regional				15.916.448.484				4.756.110.800		1.008.937.339		1.008.937.339		21,21	-	1.008.937.339	-	4,93	
Misi NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui pena	<mark>nggulangan kemiskinan, mengurangi keser</mark> T				<mark>la pertanian, pariwisata dan indu</mark>	strialisasi	72	7077463												
Tujuan: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)		75,5637493				7977463												
Sasaran : Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17814				13362												
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	1.099.303.769			100	493.277.000	-	13.613.800		13.613.800	-	2,76	-	13.613.800	-	1,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		jumlah kebijakan		1	779.890.311			1	212.101.000	-	3.017.800	-	3.017.800	-	1,42	-	3.017.800	-	0,39	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah insentif/kebijakan yang diberikan kepada investor		1	367.899.845			1	100.055.000	0	1.979.400	0	1.979.400	-	1,98	0	1.979.400	-	0,54	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen monev	Dokumen	1	411.990.466			1	112.046.000	0	1.038.400	0	1.038.400	-	0,93	0	1.038.400	-	0,25	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		Jumlah Peta dan Dokumen RUPM		2	1.033.877.436			2	281.176.000	-	10.596.000	-	10.596.000	-	3,77	-	10.596.000	-	1,02	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Dokumen	1	253.433.740			1	68.924.500	-	8.383.000	-	8.383.000	-	12,16	-	8.383.000	-	3,31	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi		1	780.443.696			1	212.251.500		2.213.000	-	2.213.000	-	1,04	-	2.213.000	-	0,28	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	manara PLATITAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	2.628.846.723			100	714.948.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Promosi	Dokumen	2	2.528.846.721			2	714.948.000	-	1.799.700	-	1.799.700	-	0,25	-	1.799.700	-	0,07	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun rang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir T	ja dan Anggaran ahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian Ki nealisasi Anggana s/d Tahun 202	n nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	1	1.270.021.300		1	345.398.300	-	1.799.700		1.799.700	-	0,52	-	1.799.700	-	0,14	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen	1	1.258.825.421		1	369.549.700	=	770.000	-	770.000	-	0,21	-	770.000	-	0,06	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1.953.548.364		87	531.292.100	-	1.029.700	-	1.029.700	-	0,19	-	1.029.700	-	0,05	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P
Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota		4	300.577.354		4	81.745.800	2	44.300.600	2	44.300.600	50,00	54,19	2,00	44.300.600	50,00	14,74	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkupnya lintas kab/kota		4	300.577.354		4	81.745.800		7.170.000	-	7.170.000	-	8,77	-	7.170.000	-	2,39	
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	1.652.971.008		3	449.546.300	-	7.170.000	1	7.170.000	-	1,59	-	7.170.000	-	0,43	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi		3700	1.008.309.951		3500	274.222.600		37.130.600	-	37.130.600	-	13,54	-	37.130.600	-	3,68	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pemantuan pemenuhan komitmen		10	437.776.364		10	119.058.800	2	29.855.600	2	29.855.600	20,00	25,08	2,00	29.855.600	20,00	6,82	
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokumen	2	206.884.693		2	56.264.900	0	6.276.500	0	6.276.500	-	11,16	0	6.276.500	-	3,03	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2.702.918.671		50	735.092.800	0	998.500	0	998.500	-	0,14	0	998.500	-	0,04	Dinas Penanaman Modal o Pelayanan Terpadu Satu Pi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaiakn LKPM		500	2.702.918.669		500	735.092.800	100	58.063.900	100	58.063.900	20,00	7,90	100,00	58.063.900	20,00	2,15	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau		4	430.339.312		4	117.036.200	2	58.063.900	2	58.063.900	50,00	49,61	2,00	58.063.900	50,00	13,49	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina		5	1.355.125.280		5	368.543.400		10.210.000	-	10.210.000	-	2,77	-	10.210.000	-	0,75	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi		20	917.454.077		20	249.513.200	1	18.905.300	1	18.905.300	5,00	7,58	1,00	18.905.300	5,00	2,06	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428.183.869		100	116.450.000	13	28.948.600	13	28.948.600	13,00	24,86	13,00	28.948.600	13,00	6,76	Dinas Penanaman Modal d Pelayanan Terpadu Satu Pin
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP	Dokumen	2	428.183.869		2	116.450.000	-	300.000	-	300.000		0,26	-	300.000		0,07	
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP secara OSS	Dokumen	2	428.183.869		2	116.450.000	-	300.000	-	300.000	-	0,26	-	300.000	-	0,07	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					8.812.801.396			2.591.059.900		44.590.600		44.590.600	6,32			44.590.600	6,32		
Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88			23,52		22,88	300.000		300.000		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417.101.158		9	44.457.563.187		4.544.208.500	-	4.544.208.500	-	10,22	-	4.544.208.500	-	3,36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Jumlah distributor obat hewan yang diawasi	(toko/depo)	20	63.125.609		10	21.702.388		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	(Sampel)	10	36.586.113		10	11.142.388		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	(Laporan)	1	26.539.495		1	10.560.000		-	-	-	-	-	•	-	-	-	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlh bibit ternak yang diadakan	(ekor)	1000	39.022.484.195		1000	46.835.374.300		4.221.368.500	-	4.221.368.500	-	9,01	-	4.221.368.500	-	10,82	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing/U nggas yang diadakan	(ekor)	1000	37.075.699.230		1000	46.670.648.700	-	4.221.368.500	-	4.221.368.500	-	9,05	-	4.221.368.500	-	11,39	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Kelompok pakan	(kelompok)	30	1.946.784.965		6	164.725.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah lahan HPT yang dikelola	(Ha)	6	1.277.279.138		6	1.065.396.500		158.840.000	-	158.840.000	-	14,91	-	158.840.000	-	12,44	
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan yang dihasilkan	Laporan	1	805.060.426		1	670.643.000	0	103.240.000	-	103.240.000	-	15,39	-	103.240.000	-	12,82	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dar Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		(ton)	1 laporan / 15 ton	472.218.712		1 laporan / 5 ton	394.753.500		55.600.000	-	55.600.000		14,08	-	55.600.000		11,77	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provins		Peningkatan Populasi ternak			2.048.204.537			1.249.865.600		60.000.000	-	60.000.000		4,80	-	60.000.000		2,93	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pakan Ternak / Tersedianya Semen Beku	ton	145000dosis +20 ton + 50 4on	1.867.956.717		365 Ton + 15 ton +2 ton / 100000 Dosis	1.067.038.350		60.000.000	-	60.000.000		5,62	-	60.000.000		3,21	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terujianya Benih/Bibit Ternak	(saampel)	200	180.247.820		200	172.681.600				-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak	(kali)	1	10.534.446		1	10.145.650			-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				85	1.735.256.154		75	708.120.000	-	104.000.000	-	104.000.000	-	14,69	-	104.000.000	-	5,99	
1 TOVINSI	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah ternak	(ekor)	85	1.735.256.154		75	708.120.000	-	104.000.000	-	104.000.000	-	14,69	-	104.000.000	-	5,99	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	1.707.732.485		100	560.650.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	(unit)	9	277.207.623		9	11.461.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan		1	206.477.480		1	1.442.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	(unit)	3	70.730.143		3	10.019.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	(lokasi)	2	375.657.624		2	182.741.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Terna	Jumlah Laporan	(laporan)	1	219.957.384		1	170.739.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawa
				К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekwensi pembinaan dan pengawasan wilayah sumber bibit	(kali)	12	155.700.241		12	12.002.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	<1	8.463.555.546		<1	2.778.593.340	<1%	40.000.000	<1%	40.000.000	100,00	1,44	<1%	40.000.000	100,00	0,47	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah PHMS yang dikendalikan	(penyakit)	5	722.205.180		5	279.362.810	5	10.000.000	5	10.000.000	100,00	3,58	5,00	10.000.000	100,00	1,38	
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan Al yang diadakan	(dosis)	30050	258.809.183		20050	119.292.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan	(laporan)	1	130.191.176		1	52.375.300	-	10.000.000	-	10.000.000	-	19,09	-	10.000.000	-	7,68	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penyediaan obat-obatan dan peralatan pelayanan	(jenis/ekor)	1270	333.204.822		910	107.695.510		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	unit)	61	273.251.722		61	54.977.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan Hasil penilain resiko keamanan produk hewan	(laporan)	1	105.810.143		1	30.380.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratar Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	n Frekwensi Pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	(kali)	4	92.848.569		4	11.507.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatar Hewan dan Produk Hewan di Perbatasar Lintas Daerah Provins		(kali)	12	74.593.010		12	13.090.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil pternakan yang tersertifikasi (sertifikat)	(sertifikat)	5	764.336.933		5	338.998.700		30.000.000	-	30.000.000	-	8,85	-	30.000.000	-	3,92	
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV	(Sertifikat)	5	132.164.505		5	11.426.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat	(Sertifikat)	15	419.898.215		15	219.442.000	0	30.000.000	-	30.000.000	-	13,67	-	30.000.000	-	7,14	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	(penyakit)	5	212.274.213		5	108.130.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kesejahteraan Hewan		Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH (Persen)		1	265.289.873		1	74.348.800		-	-	-	-	÷	-	-	-	-	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV	(orang)	50	131.250.886		35	32.106.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah RPH Diawasi		61	134.038.987		61	42.242.000		-		-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1.278.805.431		100	419.833.040		-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	(paket)	10	260.536.230		10	123.410.600		-	-	-	-	-	-	-	-		

Add To be and Company to	6.1.4	Indikator Kinerja	64	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I		Capaian Kinerja dan ran Renja yang	Tingkat Capaiar Realisasi Angg			erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan	Tingkat Capaian	an nenstna	000 0
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	(tujuan/impact/ outcome)	Satuan			sampai dg Renj Thn Lalu		yang Dievaluasi (2021)			Diev	aluasi (2021)	Tahun 20	21 (%)		Renja)	s/d Tahun 20	023 (%)	OPD Penanggung Jawab
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial,	Jumlah produk hasil	(jenis)	K 10	Rp 260.536.230	K Rp	K	Rp 123.410.600	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Ekonomi dan Inovasi Pertanian	peternakan yang dipamerkan	(Jenis)	10	260.536.230		10	123.410.600		-		-	-	-	-	-	-		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi		Jumlah kelompok		3	175.385.402		3	46.752.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petani Berbasis Kawasan	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	berbasis korporasi Terlatihnya peternak tentang teknologi pakan									-	-			-	-			
	Pembentukan dan Penguatan	jumlah koorporasi	(lembaga)	3	93.330.599		3	19.896.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kelembagaan Koorporasi Petani Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	terbentuk Jumlah koorporasi yang dibina	(lembaga)	5	44.498.718		3	14.106.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi yang dievaluasi	(lembaga)	5	37.556.085		2	12.750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319		1,93	20.209.054.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			14.385.072.389			4.586.290.000			-	-		-	-	-		-	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				14.385.072.389			4.586.290.000			-	-		-	-	-		-	
		Jumlah/jenis pupuk (bersubsidi) yang diawasi		5			5				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah sample pestisida yang diawasi di 10 kabupaten/kota		30							-	-			-	-	-		
		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75			176				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pasca panen dan pengolahan hasil yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		45			3				-	-	-		-	-	-		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman		100	49.571.809.080		100	15.622.764.200			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah kegiatan Penerbitan sertifikasi benih yang dilaksanakan		3	399.873.000		1	133.291.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				7.006.789.800			2.335.596.600			-	-		-	-	-		-	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Hortikultura		115							-	-			-	-	-		
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Hortikultura		2750							-	-			-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Hortikultura		35000							-	-			-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Hortikultura		83000							-	-			-	-	-		
		Luasan bantuan benih hortikultura		148			47,85				-	-	-		-	-	-		
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				6.620.607.880			1.261.266.800			-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Ren Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman		1045							-	-			-	-	-		
		Pangan Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman		348							-	-			-	-	-		
		Pangan Luas bantuan benih		2370			790				_	_			_	-	-		
		tanaman pangan		2370			750					_							
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				11.892.609.800						-	-			-	-		-	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan (Kg)		273			86				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan (Batang)		444612			148204				-	-	ē		-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan		5793			1750				-	-	-		-	-	-		
		Luas Bantuan Benih Tanaman Perkebunan		1530			510				-	-	-		-	-	-		
		Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1530			510				-	-	-		-	-	-		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055		35,41	104.378.790.100		33.512.114.660	-	33.512.114.660	-	32,11	-	33.512.114.660	-	12,53	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-		2				-	-	-		-	-	-		
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Bantuan Prasarana Pertanian Yang dibangun		676	274.817.512.028		264	104.378.790.100		33.512.114.660	-	33.512.114.660	-	32,11	-	33.512.114.660	-	12,19	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaar Pengelolaan Jalan Usaha Tani			507	154.611.096.505		207	55.153.625.000		20.005.800.000	-	20.005.800.000	-	36,27	-	20.005.800.000	-	12,94	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaar Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		163	35.937.090.995		55	12.435.949.100		3.305.000.000	-	3.305.000.000	-	26,58	-	3.305.000.000	-	9,20	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63.429.872.528		2	21.949.764.000		10.201.314.660		10.201.314.660	-	46,48	-	10.201.314.660	-	16,08	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD yang dibangun/direhabilitasi		8	20.839.452.000		4	14.839.452.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.136		95,5	360.656.500		58.273.000	-	58.273.000	-	16,16	-	58.273.000	-	4,74	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		VI		5	1.229.042.136		5	360.656.500		58.273.000	_	58.273.000	-	16,16	-	58.273.000	-	4,74	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1.229.042.136			360.656.500		58.273.000	-	58.273.000		16,16	-	58.273.000		4,74	
		Luasan Pengendalian OPT (Tanaman Pangan)		13124							-	-			-	-	-		
		Luasan Pengendalian OPT (Hortikultura)		1083							-	-			-	-	-		
PROCEDULA PENNUMBAN		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1360							_	-			-	-	-		Disco De la la la
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000		50	5.431.885.000		550.842.356		550.842.356	-	10,14	-	550.842.356	-	2,92	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
		22.30		К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Yang Dilatih		900	4.197.327.300		300	1.399.109.100		196.712.176	-	196.712.176	-	14,06	-	196.712.176		4,69	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		750	3.436.512.300		250	1.145.504.100		93.321.800	-	93.321.800		8,15	-	93.321.800	-	2,72	
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh		150	760.815.000		50	253.605.000		103.390.376	-	103.390.376		40,77	-	103.390.376	-	13,59	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		345	14.697.245.700		115	4.032.775.900		354.130.180	-	354.130.180	-	8,78	-	354.130.180	-	2,41	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				8.604.246.000			2.001.776.000		322.125.280	-	322.125.280		16,09	-	322.125.280		3,74	
		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		115			115					-	-		-	-	-		
		Jumlah kegiatan Peda dan Penas yang dilaksanakan/diikuti		2	-		0				-	-			-	-	-		
		Jumlah kegiatan Rembuk KTNA yang difasilitasi		2	-		0				-	-			-	-	-		
		Jumlah Buku Programa Penyuluhan Yang Dibuat		2	-		0				-	-			-	-	-		
		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan		2	-		0				-	-			-	-			
		Jumlah siswa SMKPP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607			607				-	-	-		-	-	1		
		Jumlah siswa SMKP Pertanian Bima yang difasilitasi		360			360				-	-	-		-	-			
DOCUMENT DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		5	6.092.999.700		5	2.030.999.900		32.004.900	-	32.004.900	-	1,58	-	32.004.900	-	0,53	Disable described
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola		30	5.253.465.493		10	1.635.009.700		846.667.300	-	846.667.300	-	51,78	-	846.667.300	-	16,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Davidson State Charles Constitution	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333,701,361		50	103,856,200		25.933.500	-	25.933.500			-	25.933.500	-		
Roncana Bengelelaan Keratuan Bengelelaan	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333,701,361		50	103,856,200		25.933.500	-	25.933.500	-		-	25.933.500	-		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Penyusunan Rencana Pengelolaan			3	846,111,385		1	263,331,000		4.680.000 4.680.000	-	4.680.000 4.680.000			-	4.680.000 4.680.000	-		
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kesatuan Pengelolaan Hutan	tersedianya data dan Informasi pemanfaaatan	dokumen	3	548,256,118		1	170,631,000		33.952.500	-	33.952.500	-		-	33.952.500	-	#VALUE!	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah		Dokumen							14.932.500	-	14.932.500			-	14.932.500			
	Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi	dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun																	
	Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	i								-		-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiai Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	к	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung									-	-	-			-	-			
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	159,370,240		1	49,600,000		16.100.000	-	16.100.000	-		-	16.100.000	-		
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	138,485,027		1	43,100,000		-	-	-	-		-	-	-		
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan									2.920.000	-	2.920.000			-	2.920.000			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	16	1,224,773,148		16	381,180,000		78.125.700	-	78.125.700	-		-	78.125.700	-		
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206,346,546		1	64,220,200		-	-	-	-		-	-	-		
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kegiatan monev pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan	kegiatan	24	534,340,140		11	166,300,000		25.760.000	-	25.760.000	-		-	25.760.000	-		
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									32.880.000		32.880.000			-	32.880.000			
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	КРН	24	484,086,462		11	150,659,800		19.485.700	-	19.485.700	-		-	19.485.700	-		
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										570.632.800	-	570.632.800			-	570.632.800			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan									223.897.000	-	223.897.000			-	223.897.000			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan									270.140.000	-	270.140.000			-	270.140.000			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	yang ditangani	kasus	30	1,311,290,624		10	408,106,400		46.190.800	-	46.190.800	-		-	46.190.800	-		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	1	437,308,404		1	136,101,300		28.870.000	-	28.870.000	-		-	28.870.000	-		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	90	320,096,412		30	99,622,000		1.535.000		1.535.000	-		-	1.535.000	-		
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Terlaksananya pengolahan HHBk di tingkat tapak	Unit	4,575	321,310,968		1525	100,000,000		114.975.000	-	114.975.000	-		-	114.975.000	-		
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	monev kegiatan pengolahan HHBK yang dilaksanakan	kegiatan	3	321,310,968		1	100,000,000		114.975.000	-	114.975.000	-		-	114.975.000	-		
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya									-	-	-			-	-			
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun		Terlaksananya pengolahan HHK dengan kapasitas produksi < 6000	Industri	3	458,873,190		1	142,812,800		18.367.800	-	18.367.800	-		-	18.367.800	-		
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	16	458,873,190		16	142,812,800		18.367.800	-	18.367.800	-		-	18.367.800	-		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	15.330.163.046		8,53	4.867.861.900		1.440.000	-	1.440.000	-	0,03	-	1.440.000	-	0,01	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola		340271	2.154.187.939		244926	2.043.172.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
· ,	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen yang tersusun		1	704.187.939		1	1.614.042.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	et Akhir Renstra OPD		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Berjalan ya	ian Anggaran Renja Tahun ing Dievaluasi (2021)		rja Pada Triwulan I	Anggara Dieva	paian Kinerja dan an Renja yang luasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja 1 (%)	Renstra (Akhi	erja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri		K 271,86	Rp 600.000.000	K Rp	K 244926,54	Rp 429.130.000	К	Rp -	-	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Mitigasi Bencana		75	60.156.999		25	2.774.689.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pulau-Pulau Recii	Persetujuan teknis/rekomendasi pemafaatan ruang laut		17	60.156.999		10	50.000.000		1.440.000	-	1.440.000	-	2,88	-	1.440.000	-	2,39	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah SOP yang tersusun		1	3.338.340.368		1	2.774.689.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah lokasi yang disurvey, ekspos rencana usaha		17	3.338.340.368		10	2.774.689.900		1.440.000	-	1.440.000	•	0,05	-	1.440.000	-	0,04	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi		20	3.338.340.368		20	2.774.689.900		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton 25	66572	11.895.178.174		241843	6.336.155.300		68.525.375	-	68.525.375	-	1,08	-	68.525.375	-	0,58	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil		Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia		45	3.555.957.843		36	2.905.695.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Publikasi Data Statistik Perikanan Tangkap		1	60.000.000		1	-		-	-	•			-	-	-	-	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia		5	1.023.000.000		0			=	-	-			-	-	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			45	2.095.957.843		36	2.905.695.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT		Jumlah kapal yang memperoleh rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	:	220	380.000.000		0			25.500.000	-	25.500.000			-	25.500.000	-	6,71	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1	80.000.000					-	-	-			-	-	-	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan		220	250.000.000		0	-		25.500.000	-	25.500.000			-	25.500.000	-	10,20	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap		1	50.000.000					-	-	-			-	-	-	-	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Jumlah kapal yang memperoleh rekomendasi zin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		50	55.000.000		50	-		-	-		-		•	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Renst sampai dg R Thn Lalu	ra Targ enja		an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang		К 1	Rp 25.000.000	K F	₹р	К	Rp	К	Rp -	-	Rp -	K Rp	К -	Rp -	К -	Rp -	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha	Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang tersusun Jumlah Rekomendasi Izin		50	30.000.000			50			-	-		-	-	-	-	-	
	Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang terfasilitasi																	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterdaftar		500	265.000.000			500			-	-	-		-		-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT	Jumlah SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang disusun		1	25.000.000			1				-	-		·	-	-	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar		500	240.000.000			500			-	-	-	-	-	-	-	-	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM (Unit)		1	5.167.442.138			1	3.280.950.000		-	-	-		-	-	-	-	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan yang terbina		1	2.984.965.328				2.065.400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	pelabuhan yang terbina operasionalnya		1	1.882.476.810				1.215.550.000		,	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT		Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit		50	77.000.000			50	-		-	-	-		-	-	-	-	
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	persetujuan		50	77.000.000				-			-	-		-	-	-	-	
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT		Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang terdaftar		220	119.724.941			200	99.510.400		-	-	-		-	-	-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT	Jumlah SOP Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang tersusun		0	19.724.941						-	-	-		-	-		-	

						- "													
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Re	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun rang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerj	a Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
		,		К	Rp	K Rp	К	Rp	к	Rn	к	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah surat pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT		220	100.000.000		200	99.510.400		1.000.000	-	1.000.000	-	1,00		1.000.000		1,00	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,		550	275.000.000		500	49,999,900		-	-		-	-	-	-		-	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT	Jumlah penerbitan pendaftaran kapal		550	275.000.000		500	49.999.900	_	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1243385	32.728.577.394		1195104	3.022.814.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang memiliki izin		5	100.000.000		5	·		-	-		-		-	-	-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Publikasi Data n dan Informasi Bidang Usaha Perikanan Budidaya		1	100.000.000		1				-	-	-		-	-	-	-	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia		15	3.953.338.779		15	1.255.424.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut	Jumlah penyediaan Unit prasarana Budidaya ikan di laut		4	1.253.540.200		0				-	•			-	-	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia		3	445.825.000		3	345.825.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia		6	923.450.000		6	609.600.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			6	399.999.300		6	299.999.300			-	-		-	-	-	-	-	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah kelompok pembudidaya yang dibina		10	2.184.064.479		0	-			-	-			-	-	-	-	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	8.942.779.585		99,91	4.851.624.000		390.000	-	390.000	-	0,01	-	390.000	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil		Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa		17	4.851.624.000		12	2.128.630.979		390.000	-	390.000	-	0,02	-	390.000	-	0,01	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Ren sampai dg Thn La	stra Target Kin Renja Berja	erja dan Anggaran Renja Tahun lan yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Rongawasan Romanfeaten Duesa Laut	lumlah onoresi		K 12	Rp	К		Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	Jumlah operasi		12	83.600.000		0	166.793.114				•			-	-			
		Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan ruang laut yang terawasi		10	3.869.616.000		10	900.000.000		-			-	-	-	-	-		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi		10	898.408.000		0	955.888.808		-	-	•		-	-	-	-	-	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Budidaya Perikanan yang terawasi		5	30.000.000			-		390.000	-	390.000			-	390.000	-	1,30	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2.897.006.721		21313			5.250.000	-	5.250.000	-	0,85	-	5.250.000	-	0,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang difasilitasi penerbitannya		5	120.301.967		5	99.990.000		-	-		-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan		5	-		5			-	-	-	-		-	-	-		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersedia		3	120.301.967		3	99.990.000			-	-	-	-	-	-	-	1	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi Pembinaan untuk Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		7	748.200.988		6	454.999.100		5.250.000		5.250.000	-	1,15	-	5.250.000		0,70	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah kegiatan bimbingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan dan		5	547.427.611		5	454.999.100		5.250.000	-	5.250.000	-	1,15	-	5.250.000	-	0,96	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri Pengolahan ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		384270	200.773.377		34854	50.054.100		-			-	-	-	-	-	-	
	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha bidang penyediaan sarana logistik ikan yang terpantau		15	60.222.089		15			-	-	-	-		-	-	-	-	
	Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah	Jumlah pelaku usaha yang menerima insentif dan fasilitasi		35	60.222.089		35	50.054.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan			0/	100	571.512.726.958			197.203.041.146		39.627.711.191		39.627.711.191	1,52	5,10		39.627.711.191	1,23	#VALUE!	
Sasaran : Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100			100												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	257.570.105.057		85	79.154.494.280		897.780.000	-	897.780.000	-	1,13		897.780.000			Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					186.631.633.972			57.321.064.000,00		448.890.000		448.890.000		0,78	-	448.890.000		0,24	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggara	apaian Kinerja dan an Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akh	nerja dan Anggaran ir Tahun Pelaksanaan Renja)	nealisasi Ang	an Kinenja dan ganan nenstna n 2023 (%)	OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
	Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat				8.139.749.202 170.209.852.752		1	2.500.000.000,00 52.277.364.000,00		448.890.000		448.890.000		17,96	-	448.890.000		5,51	
	Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				170.209.652.752			52.277.564.000,00		-		•		-	•	-		-	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan				142.282.816			43.700.000,00		-		-		-		-		-	
	Kesehatan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas				8.139.749.202			2.500.000.000,00		-		-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas	Layanan Kesehatan				402.662.974	<u> </u>		290.000.000,00								_			
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					402.662.974			290.000.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				402.662.974			290.000.000,00		-		-			-	-		-	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					26.643.684.496			8.137.659.080,00		-		-			-	-		-	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				22.698.881.872			6.932.816.000,00		-		-		-	-	-		-	
	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				657.859.409			200.927.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				-			-		-		-			-	-			
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				-			-		-		-			<u>-</u>	-			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				244.740.582			74.750.000,00				-		-		-		-	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					43.892.123.615			13.405.771.200,00	_	448.890.000		448.890.000		3,35	-	448.890.000		1,02	
	Pengembangan Rumah Sakit				1.795.999.700			548.544.000,00		448.890.000		448.890.000		81,83		448.890.000		24,99	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.801.337.780			6.658.683.200,00		-		-		-	-	-		-	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				20.294.786.135			6.198.544.000,00		-		-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.375.949.557			420.250.000,00		117.075.865		117.075.865		27,86	-	117.075.865		0,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.375.949.557			420.250.000,00		117.075.865		117.075.865		27,86	-	117.075.865		8,51	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635		100	764.118.500		57.205.859	-	57.205.859	-	7,49	-	57.205.859	-	2,43	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah PMB, KPO, KTK dan OT yang dipulangkan ke daerah asal	Jiwa	1150	2.356.150.635		350	764.118.500		57.205.859	-	57.205.859	-	7,49	-	57.205.859	-	2,43	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah orang KPO, KTK, PMB dan OT yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	Jiwa	1150	2.356.150.635		350	764.118.500		57.205.859	-	57.205.859	-	7,49	-	57.205.859	-	2,43	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.397.902.044		2,5	17.317.366.810		1.716.782.602	-	1.716.782.602	-	9,91	-	1.716.782.602	-	3,22	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					8.645.943.057			2.803.948.500		335.554.000	-	335.554.000		11,97	-	335.554.000		3,88	
	Penyediaan Permakanan	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti	Orang	450	4.872.103.064		150	1.580.062.000		314.554.000	-	314.554.000	-	19,91	-	314.554.000	-	6,46	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Ca Kin. Rens sampai dg I Thn Lal	tra Target Kinerja d Renja Berjalan ya	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi K	inerja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam panti	Orang	450	3.373.891.487		150	1.094.180.000		-	-	-		-	-	-		-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam panti	Orang	450	226.039.752		150	73.306.500		21.000.000	-	21.000.000	-	28,65	-	21.000.000	-	9,29	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan bimbingan mental spiritual, sosial dan fisik dalam panti	Orang	450	162.808.195		150	52.800.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti	Orang	450	11.100.559		150	3.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar									-		-			-	-			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti	Orang	240	6.214.478.214		80	8.362.753.110		565.826.000	-	565.826.000	-	6,77	-	565.826.000	-	9,10	
	Pengasuhan							60000000		15.000.000	-	15.000.000			_	15.000.000			
	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Terlantar yang di penuhi kebutuhan permakanan di dalam panti	Orang	240	185.009.312		80	2.670.215.000		265.650.000	-	265.650.000	-	9,95	-	265.650.000		143,59	
		Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	240	3.397.588.096		80	198.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar di penuhi kebutuhan sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti	Orang	240	222.381.193		80	160.965.000		28.200.000	-	28.200.000	-	17,52	-	28.200.000	-	12,68	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti	Orang	240	37.618.560		80	78.430.910		2.700.000	-	2.700.000	-	3,44	-	2.700.000	-	7,18	
	Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti	Orang	240	863.561.800		80	1.454.118.200		136.569.000	-	136.569.000	-	9,39	-	136.569.000	-	15,81	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan							375160000		67.497.000	-	67.497.000			-	67.497.000			
	Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang di berikan layanan reunifikasi keluarga di dalam panti	Orang	240	1.156.801.559		80	330.000.000		-	-	-	-	-		-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	a Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan an Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan	K 10	Rp 351.517.693	K Rp	K 10	Rp 3.035.364.000	К	Rp 50.210.000	- K	Rp 50.210.000	К -	Rp 1,65	К <u>Rp</u> - 50.210.000	К -	Rp 14,28	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumah Lanjut Usia Terlantar yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti	Orang	50	3.603.990.652		50	1.168.803.000		481.642.602	-	481.642.602	-	41,21	- 481.642.602	-	13,36	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	50	2.079.159.318		50	674.288.000		420.959.602	-	420.959.602	-	62,43	- 420.959.602	-	20,25	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan sandang dalam Panti	Orang	50	94.354.749		50	30.600.000		5.463.000	-	5.463.000	-	17,85	- 5.463.000	-	5,79	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan asrama dalam Panti	Orang	50	676.825.734		50	219.500.000		13.965.000	-	13.965.000	-	6,36	- 13.965.000	-	2,06	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan Alat Bantu dalam Panti	Orang	50	46.252.328		50	15.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan kesehatan dalam Panti	Orang	50	262.469.628		50	85.121.000		21.095.000	-	21.095.000	-	24,78	- 21.095.000	-	8,04	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang	50	217.077.593		50	70.400.000		17.100.000	-	17.100.000	-	24,29	- 17.100.000	-	7,88	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang	50	22.201.117		50	7.200.000		-	-	-	-	-		-	-	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan reunifikasi dalam Panti	Orang	50	165.429.160		50	53.650.000		3.060.000	-	3.060.000	-	5,70	- 3.060.000	-	1,85	
	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan pemulaksaraan dalam Panti	Orang	50	40.221.024		50	13.044.000		-	-	-	-	-		-	-	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti	Orang	300	17.011.658.368		100	1.578.469.500		30.420.000	-	30.420.000	-	1,93	- 30.420.000	-	0,18	
	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	300	2.987.823.305		100	968.975.000		29.295.000	-	29.295.000	-	3,02	- 29.295.000	-	0,98	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang	300	150.242.979		100	48.725.000		1.125.000	-	1.125.000	-	2,31	- 1.125.000	-	0,75	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Ang	si Capaian Kinerja dar garan Renja yang ievaluasi (2021)	Tingkat Capaiar Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	nerja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
		,		К	Rp	K Rp	К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dan sarana/ prasaranan dalam Panti	Orang	300	48.333.683		100	15.675.000				-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Panti	Orang	300	23.010.533		100	7.462.500	-			-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang	300	305.265.365		100	99.000.000				-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang	300	12.148.998.487		100	1.470.000	-			-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keteramilan dasar dalam Panti	Orang	300	1.014.467.729		100	329.000.000	-			-	-	-	-	-	-	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	300	92.504.656		100	30.000.000				-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan	6	241.011.631		2	78.162.000	-			-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.264.230.300				303.340.000)	- 303.340.000			-	303.340.000			
	Penyediaan Permakanan					 			126.000.000	,	- 126.000.000	1		-	126.000.000			
	Penyediaan Sandang Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah								66.400.000		- 66.400.000 			-	66.400.000			
	Diakses Penyediaan Perbekalan Kesehatan di								27.880.000)	- 27.880.000			-	27.880.000			
	dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,								12.740.000)	- 12.740.000			-	12.740.000			
	Spritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari								-					-	-			
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar								64.250.000)	- 64.250.000			-	64.250.000			
	Pemulangan ke Daerah Asal								6.070.000)	- 6.070.000			-	6.070.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				1.264.230.300						-			-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612		100	12.091.472.100	•			-	-	-		-	-	Dinas Sosial
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		39	273.166.558		13	88.590.100	-			-	-	-	-	-	-	

						Realisasi Cap	aian												
		Indikator Kinerja				Kin. Renst	ra Target Kinerja o	dan Anggaran Renja Tahun				Capaian Kinerja dan				rja dan Anggaran	Tingkat Capaian I		
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	(tujuan/impact/	Satuan	Target Akhir Ro	enstra OPD pada Tahun 2023	sampai dg Re	enja Berjalan ya	ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kir	erja Pada Triwulan I	Angga	ran Renja yang valuasi (2021)	Realisasi Anggaran R Tahun 2021 (%)	enja Re		Tahun Pelaksanaan enja)	nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
		outcome)				Thn Lalu						raidasi (2021)	1 anun 2021 (%)			enjaj	s/u ranun 20	,23 (/0)	
				K	Rp	K R		Rp	K	Rp	К	Rp	K F	р	K	Rp	К	Rp	
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah pengangkatan anak antar WNI		30	78.519.802		10	25.464.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak oleh orang tua		9	194.646.756		3	63.125.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		tunggal																	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah data kemiskinan yang termutakhirkan	KK	310700	37.010.749.054		304300	12.002.882.000		-	-	-	-	-		-	-	-	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah data fakir miskin	KK	301100	978.390.913		301100	317.300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Keluarga	daerah cakupan provinsi yang terverifikasi dan validasi																	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah	Jumlah KK Fakir miskin	KK	6000	27.061.626.611		2000	8.776.302.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	yang tertangani melalui bantuan sosial																	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	jumlah KK Fakir miskin	KK	3600	8.970.731.530		1200	2.902.280.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ekonomi Masyarakat	yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi																	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					350.608.073.348			109.327.451.690		2.671.768.461		2.671.768.461	_	7,69		2.671.768.461	_	5,30	
Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan keragaman		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,2	330.000.073.340		86,2	103.327.431.030		2.071.700.401		2.071.700.401		7,03		2.071.700.401		3,30	
konsumsi pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi		Persentase Lumbung	%	86,62	770.871.786		71,97	215.000.000											Dinas Ketahanan Pangan
Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Pangan yang termanfaatkan	76	86,62	//0.8/1./86		71,97	215.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketananan Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Unit	9	770.871.786		2	215.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Unit	6	594.908.418		2	215.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit	1	45.000.000		0	-			-	-			-	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangu	Unit	2	130.963.367		0	-			-	-			-	-	-	-	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466.150.864		100	3.517.365.780		-	-	-	-	-		-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/ Tahun	8294,57	1.074.342.980		7787,81	256.184.980		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	6	303.393.880		2	93.235.880		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	25	230.000.000		0	-		-	-	-			-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	6	265.000.600		2	75.000.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	Unit	3	275.948.500		1	87.948.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	_	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	25,08305648	1.018.510.000		12,72076412	208.510.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	151	1.018.510.000		15	208.510.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggai s/d Tahun 2	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Persen	90	9.373.297.884		90	3.052.670.800		-		-	-	-	-	-	-		
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	3	242.509.084		1	67.080.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	KRPL/P2L	144	9.130.788.800		62	2.985.590.800			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah orang yang menerima informasi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Orang	3600			1200	-			-	-	-		-	-	-		
Program Penanganan Kerawanan Pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.141.837.902		5,77	358.435.000		-	-	•	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	39	1.268.451.063		12	358.435.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	Kelompok/ Sekolah	8	540.951.063		2	130.935.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Balita yang difasilitasi bantuan hibah pangan	Balita	1500	727.500.000		500	227.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90	1.857.153.698		80	539.025.900		38.008.931	-	38.008.931	-	7,05	-	38.008.931	-	2,05	Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	Komoditi	295	1.857.153.698		80	539.025.900		38.008.931	-	38.008.931	-	7,05	-	38.008.931	-	2,05	
		Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Orang	150	495.420.000		50	250.420.000		38.008.931	,	38.008.931	-	15,18	-	38.008.931		7,67	
		Jumlah Dokumen Perda Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	-		1	-		-	-	-	-		-	-	-		
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	Sertifikat	195	828.192.667		60	155.612.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kali	100	252.737.289		4	62.998.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi C Kin. Ren sampai dg Thn La	rstra Target Kinerj Renja Berjalan	a dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi	Kinerja Pada Triwulan I	Angg	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaiar Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhi	nerja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К		Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Komoditi	100	280.803.742		20	69.994.700			-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					15.236.014.250			4.629.826.680		38.008.931		38.008.931	-	1,27		38.008.931	-	0,45	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%	80,59			76,48												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN		Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000		76,48	2.936.368.000		341.649.500	-	341.649.500	-	11,64	-	341.649.500	-	3,34	Dinas Pekerjaan Umum dan
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																			Penataan Ruang
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Buah	102	10.224.348.000		34	2.936.368.000		341.649.500	-	341.649.500	-	11,64	-	341.649.500	-	3,34	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM									43.500.000	-	43.500.000			-	43.500.000			
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan									298.149.500	-	298.149.500			-	298.149.500			
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	Регріраан				10.224.348.000			2.936.368.000		341.649.500		341.649.500	-	11,64		341.649.500	-	3.34	
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46	201224134101000		80,1	2133013001000		34216433366		54216451566		22,04		31210131300		3,3.4	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	11.865.261.619		94	3.644.234.400		1.876.977.000	-	1.876.977.000	-	51,51	-	1.876.977.000	-		Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					11.865.261.619			3.644.234.400,00		1.876.977.000	=	1.876.977.000			-	1.876.977.000		15,82	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.865.261.619			3.644.234.400,00		1.876.977.000	-	1.876.977.000			-	1.876.977.000		15,82	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	На	253391,4	587.290.665.869		84392,8	256.812.896.004		71.741.059.960	-	71.741.059.960	-	27,94	-	71.741.059.960	-	12,22	Dinas Perumahan dan Permukiman
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Perencanaan dan penanganan PSU Permukiman yang terlaksana	На	978	587.290.665.869		84	2,5837E+11		71.741.059.960	-	71.741.059.960	-	27,77	-	71.741.059.960	-	12,22	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman	Dokumen	3	1.029.079.161		1	450000000		2.500.000	-	2.500.000	-	0,56	-	2.500.000	-	0,24	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman	Paket	2931	586.261.586.708		1600	2,5792E+11		71.738.559.960	-	71.738.559.960	-	27,81	-	71.738.559.960	-	12,24	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					599.155.927.488			260.457.130.404		73.618.036.960		73.618.036.960	-	39,72		73.618.036.960	-	6,11	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%	99,99			99,77												
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.991.688.898		5,96	557.222.820		12.901.600		12.901.600		2,32		12.901.600		0,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, dan PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) sebagai BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN sampai dengan (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Jumlah Izin	Izin	6	214.456.006		1	34.499.220,00		- 3.041.600	-	3.041.600	-	8,82	-	3.041.600	-	1,42	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	6	131.729.920		1	17.854.610,00		- 3.041.600	-	3.041.600	-	17,04	-	3.041.600	-	2,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Penja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
		outcomey		К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin	6	82.726.086		1	16.644.610,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI		Unit	Unit	46	1.667.873.204		1	400.127.600,00	-	9.860.000	-	9.860.000	-	2,46	-	9.860.000	-	0,59	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	356.100.249		1	85.127.600,00	-	449.000		449.000	-	0,53	-	449.000		0,13	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	Orang	300	268.073.492		100	61.000.000,00	-	1.251.000	-	1.251.000	-	2,05	-	1.251.000	-	0,47	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	46	1.043.699.463		1	254.000.000,00	-	8.160.000	-	8.160.000	-	3,21	-	8.160.000	-	0,78	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99,99	5.546.102.425		99,77	1.551.655.400	99,98	12.696.100	100	12.696.100	100,21	0,82	99,98	12.696.100	99,99	0,23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA dan PENJUALAH TENAGA LISTRIK Serta PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah Izin	Izin	90	285.942.199		28	46.499.200,00	13	9.239.200	13	9.239.200	46,43	19,87	13,00	9.239.200	14,44	3,23	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Millik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	90	178.715.304		28	25.999.900,00	13	8.739.900	13	8.739.900	46,43	33,62	13,00	8.739.900	14,44	4,89	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin	Izin	90	107.226.895		28	20.499.300,00	13	499.300	13	499.300	46,43	2,44	13,00	499.300	14,44	0,47	
PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI yang FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan	Izin	90	285.885.367		13	50.983.300,00	3	934.500	3	934.500	23,08	1,83	3,00	934.500	3,33	0,33	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Rekomendasi	90	178.694.216		13	25.494.000,00	1	494.000	1	494.000	7,69	1,94	1,00	494.000	1,11	0,28	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	90	107.191.152		13	25.489.300,00	3	440.500	3	440.500	23,08	1,73	3,00	440.500	3,33	0,41	
PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL dan PEDESAAN		Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS	2900	4.807.801.220		800	1.312.597.900,00	-	2.522.400	-	2.522.400	-	0,19	-	2.522.400	-	0,05	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	268.073.492		1	42.500.000,00	-	460.000	-	460.000	-	1,08	-	460.000	-	0,17	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun	RTS	2900	4.539.727.728		800	1.270.097.900,00	-	2.062.400	-	2.062.400	-	0,16	-	2.062.400	-	0,05	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	- p	. 0 0			7.537.791.323			2.108.878.220		939.800		25.597.700	50,11	2,08		25.597.700	49,99	0,44	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95			62,65												

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaiar Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		an Anggaran Renja Tahun Ing Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	ja Pada Triwulan I	Anggai	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir T	rja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Penja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan	%	K 100	Rp 7.063.959.946	K Rp	K 100	Rp 1.943.219.300	К	Rp 62.290.000	К -	Rp 62.290.000	K -	Rp 3,21	К -	Rp 62.290.000	К -	Rp 0,88	Dinas Perumahan dan Permukiman
		direkonstruksi Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91			98,81				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan rumah terdampak bencana yang terdata dan terverifikasi	%	100	1,227,471,538.61		100	337,664,200		18.490.000	-	18.490.000	-		-	18.490.000	-	#VALUE!	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen perndataan rumah terdampak bencana	dok	3	620,411,785		1	170,668,600		7.490.000	-	7.490.000	-		-	7.490.000	-	#VALUE!	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima bentuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi	%	100	607,059,753.66		100	166,995,600		11.000.000	-	11.000.000	-		-	11.000.000	-	#VALUE!	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan masyarakat terdampak bencana/terdampak relokasi program provinsi yang tersosialisasi	%	100	997,844,227.95		100	274,496,200		8.630.000	-	8.630.000	-		-	8.630.000	-	#VALUE!	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana	OK	210	425,158,411.83		50	116,956,500		2.500.000	1	2.500.000	-		-	2.500.000	-		
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan	OK	205	572,685,816.12		50	157,539,700		6.130.000		6.130.000	-		-	6.130.000	-		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan penanganan rumah terdampak bencana yang tertangani	%	100	4,838,644,179.51		100	1,331,058,900		35.170.000		35.170.000	-		-	35.170.000	-		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman	Unit	169	4,838,644,179.51		49	1,331,058,900		35.170.000		35.170.000	-			35.170.000	-		
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					7.063.959.946			1.943.219.300		62.290.000		62.290.000		3,21		62.290.000	-	0,88	
Sasaran :		Inflasi	%	3,0 - 4,0			3,0 - 4,0		0,12										
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874.409.856		60	280.000.000	20	14.060.000	20	14.060.000	33,33	5,02	20,00	14.060.000	25,00	1,61	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor		7	70.705.716		5	65.000.000,00	0	14.060.000	-	14.060.000	-	21,63	-	14.060.000	-	19,89	
	Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP- MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Distributor Minuman Beralkohol (MB) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		7	70.705.716		5	65.000.000,00	2	14.060.000	2	14.060.000	40,00	21,63	2,00	14.060.000	28,57	19,89	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor		6	81.583.518		4	75.000.000,00		-	-	-	-	-	•	•	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi (Kin. Re sampai d Thn L	enstra Targ		lan Anggaran Renja Tahun nng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhi	nerja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pengecer Bahan Berbahaya (B2) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		6	81.583.518			4	75.000.000,00			-	-	-	-	-		-	-	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali		7	152.289.234			5	140.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	Jumlah Toko Sarana Distribusi Bahan Berbahaya yang Diperiksa Jumlah Pengawasan		7	81.583.518 70.705.716			6	75.000.000,00 65.000.000,00		-	-	-	-	-	-		-	-	
	Pelabelan Bahan Berbahaya																			
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importi (API)		Jumlah Dokumen Pendukung Ekspor yang diterbitkan Bagi Eksportir		120	-			0	-		-		-			-				
	Koordinasi dan singkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah Calon Eksportir Penerbitan SKA Terlayani		120	-			0	-				-			-				_
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179.316.326			4	1.658.499.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi		22	87.022.420			22	80.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan		8	43.511.210			6	40.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dar Sub Distributor			8	43.511.210			6	40.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting padd pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	3	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		22	1.717.060.899			22	1.578.499.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		22	97.900.005			22	89.999.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilisasi Harga Bapok		13	1.619.160.895			9	1.488.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Stok Pupuk Pestisida yang Terkendali		0	-						-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		0	-						-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir F	Renstra OPD pada Tahun 2023	sampai	Renstra Targ		an Anggaran Renja Tahun ng Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi Pupuk Terperiksa		0	-						-	-	-			-				
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Stok Pengadaan Pupuk dan Pestisida Terawasi		0	-						-	-	-			-	-			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	n Jumlah Stok Pupuk dan Pestisida Tersalurkan		0	-						-	-	-			-	-			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.070.555.572			3	1.303.456.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang		6	1.417.874.666			4	1.303.456.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah UKM yang ikut Pameran		10	602.039.482			6	553.456.900,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina		30	163.167.037			30	150.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang		10	163.167.037			6	150.000.000,00	0	-	_	-	-	-	1	-	-		
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara		2	326.334.074			2	300.000.000,00	0	=	-	-	-	-	-		-	-	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor Terpilih		4	163.167.037			2	150.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3.914.544.303			80	1.253.499.600	25	2.095.000	25	2.095.000	31,25	0,17	25,00	2.095.000	27,78	0,05	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota		50	1.022.513.104			40	939.999.700,00	6	-	6	-	15,00	-	6,00	-	12,00	-	
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang di Koordinasikan Ke BPSK Kab/Kota		60	108.778.025			50	100.000.000,00	11	2.095.000	11	2.095.000	22,00	2,10	11,00	2.095.000	18,33	1,93	
	Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah Konsumen Tersosialisasi Konsumen Cerdas dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		300	97.900.005			200	89.999.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama		8	815.835.075			6	749.999.900,00		-	-		-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa		60	261.066.932			50	239.999.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi penganganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Konsumen yang Direkomendasikan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen		20	97.900.005			10	89.999.800,00		-	-	-	-	-	-	-		-	
	Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Barang Beredar dan Jasa Yang Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		110	163.166.928			100	149.999.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Teruji		3	79.952.066			1	73.500.200,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Re	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capa Kin. Renstr sampai dg Re Thn Lalu	a Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Kin Realisasi Anggara Tahun 2021 (n Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K R	р К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk		2	79.952.066		2	73.500.200,00		-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Layanan Pengujian	Terverifikasi Mutu						_			-	_			_	_			
	Pengembangan Layanan Sertifikasi							-			-	-			-	-			
	Pengembangan Layanan Kalibrasi										-	-			-	-			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550.068.505		100	12.024.131.600	20	2.000.000	20	2.000.000	20,00	0,02	20,00	2.000.000	20,00	0,01	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi		60	12.046.221.585		20	11.074.131.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana		4	12.046.221.585		2	11.074.131.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk		Jumlah Jenis Produk		14	935.491.011		10	860.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dalam Negeri		Dalam Negeri]	333.431.011		1	230.000.000,00			1	1					1		
·		Terpasarkan																	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana		4	935.491.011		2	860.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk		Jumlah UKM		50	97.900.222		15	90.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dalam Negeri		Terakomodir di Retail						,,,,,											
	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sosialiasasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana		2	81.583.518		2	75.000.000,00		,	-	-	-	-	-	,	-	-	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing		40000	16.316.704		30000	15.000.000,00	18.896	2.000.000	18.896	2.000.000	62,99	13,33	18.896,00	2.000.000	47,24	12,26	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					51.588.894.563			16.519.587.900		18.155.000		18.155.000	5,61	1,60		18.155.000	4,26	1,39	
Sasaran : Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11943,70147			11273,02017												
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.833.875.000		100	3.703.875.000	0	11.680.000	-	11.680.000	-	0,32	-	11.680.000	-	0,24	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan		10	4.029.002.055		10	3.703.875.000,00	0		-	-	-	-	-	,	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Jenis Bantuan Sarana Prasarana		9	3.865.835.018		9	3.553.875.000,00	0	-	-	-	-	-	-	,	-	-	
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Provinsi		0	-			-	0	-	-	-							
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas		2	163.167.037		2	150.000.000,00	0	11.680.000	-	11.680.000	-	7,79	-	11.680.000	-	7,16	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					4.833.875.000			3.703.875.000		11.680.000		11.680.000		0,32		11.680.000		0,24	
Tujuan : Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4,5			1,5		(0,38)		-0,38		-25,33333333		-25,33333333		-8,444444444		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Ren Thn Lalu	Target Kinerja d	an Anggaran Renja Tahun Ing Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan aran Renja yang valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
Sasaran : Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	K 137,24	Rp	K Rp	K 122,71	Rp	K (87,42)	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580.012.830		65,66	4.992.741.802		39.186.200	-	39.186.200	-	0,78	-	39.186.200	-	0,24	Dinas Pariwisata
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-		37,5			30.187.000	-	30.187.000	-		-	30.187.000	-		
Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi		ic. total			80.864.671			49.805.500		30.187.000	-	30.187.000		60,61	-	30.187.000		37,33	
	Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah workshop paket wisata	kali	2	80.864.671		2	49.805.500		2.100.000	-	2.100.000	-	4,22	-	2.100.000		2,60	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi yang	paket	20	5.729.636.512 5.729.636.512		20	4.537.000.100 4.537.000.100		2.100.000	-	2.100.000	-	0,05	-	2.100.000	-	0,04	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lointas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	provinsi	dikembangkan			84.435.279			44.938.700		6.899.200	-	6.899.200		15,35	-	6.899.200		8,17	
	Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah paket wisata	paket	2	84.435.279		2	44.938.700		6.899.200	-	6.899.200	-	15,35	-	6.899.200	-	8,17	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.391.905.747		4650000	2.240.149.900		110.200.000	-	110.200.000	-	4,92	-	110.200.000		1,49	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah promosi event yang dilaksanakan			2.705.004.086			2.190.531.900		110.200.000	-	110.200.000		5,03	-	110.200.000		4,07	
	Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi	media	12	2.572.419.576		10	2.121.400.000		100.000.000	-	100.000.000	•	4,71	-	100.000.000	-	3,89	
		Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran yang dilaksanakan	kegiatan	8	43.452.138		5	28.184.900		=	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah jenis dokumen penyediaan data dan informasi	dokumen	2	40.831.961		2	20.947.000		10.200.000	-	10.200.000	-	48,69	-	10.200.000	-	24,98	
		Jumlah mitra di dalam dan di luar negeri	lokasi	10	48.300.412		10	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		606.633.173		30,21148036	164.700.000		17.400.000	-	17.400.000	-	10,56	-	17.400.000		2,87	Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					232.043.419			100.899.900		17.400.000	-	17.400.000		17,24	-	17.400.000		7,50	
	Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik	Jumlah produk yang dipasarkan	produk	10	76.079.809		10	32.000.000		4.350.000	-	4.350.000	-	13,59	-	4.350.000	-	5,72	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	Jumlah ruang kreasi dan orang kreatif yang terdata	orang	10	102.285.077		10	44.799.900		10.650.000	-	10.650.000	-	23,77	•	10.650.000	-	10,41	
	usaha kreatif terutama bagi usaha	Jumlah usaha kreatif bagi pemula yang terdata	usaha	10	53.678.532		10	24.100.000		2.400.000	-	2.400.000	-	9,96	-	2.400.000	-	4,47	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506.228.054		60	1.062.578.000		8.200.000	-	8.200.000	-	0,77	-	8.200.000		0,23	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah pelaku wisata yang dilatih			1.283.073.884			974.920.300		8.200.000	-	8.200.000		0,84	-	8.200.000		0,64	
	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Jumlah SDM yang terlatih	orang	150	1.041.571.944		150	862.578.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Renst sampai dg R Thn Lalu	ra Target Kiner enja Berjala	ja dan Anggaran Renja Tahun n yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata	Jumlah pokdarwis	pokdarwis	20	122.972.729		40	57.846.200		-		1	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan	Jumlah pelaku wisata yang dilatih	orang	130	118.529.211		50	54.496.000		8.200.000	-	8.200.000	-	15,05	-	8.200.000	-	6,92	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					28.084.779.803			8.460.169.702		174.986.200		174.986.200	-	2,07		174.986.200	-	0,62	
Tujuan: Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri	%	9			6,5												
Sasaran :		Pertambahan Nilai PDRB	Rp. Milyar	179,91			166,39		23,09										
Meningkatnya daya saing industri		sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)																	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223		100	27.070.135.811		258.000.000	-	258.000.000	-	0,95	-	258.000.000	-	0,25	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi			39.971.793.683		-	Rp27.070.135.811		258.000.000	-	258.000.000		0,95	-	258.000.000		0,65	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya RPIP Prov.			4.949.375.098		-	Rp3.351.870.000		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaar Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				3.117.355.165		-	Rp2.111.169.400		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaar Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Kapasitas IKM dan Terfasilitasinya Operasional Dekrnasda			12.964.823.373		-	Rp8.780.179.650		258.000.000	-	258.000.000		2,94	-	258.000.000		1,99	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaar Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	n Persentase Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang terlaksana			11.039.203.924		-	Rp7.476.090.561		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaar Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang terbina			7.594.957.377		-	Rp5.143.540.200		-	-	-		-	-	-		-	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun			306.078.746		-	Rp207.286.000		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.892		2,69	798.525.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi			1.179.102.934		-	Rp798.525.000		-	-	-		-	-	-	#DIV/0!	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUJ, IPUJ, IUKJ, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin IKM yang terfasilitasi			1.058.448.377		-	Rp716.814.000		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	perizinan yang terfasilitasi			120.654.557		-	Rp81.711.000		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043.024.494		1	540.498.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan an Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian K Realisasi Anggar Tahun 2021	an Renja	Renstra (Akhir 1	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggai s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		К	Rp 798.099.969	K Rp	- -	Rp Rp540.498.000	К	Rp -	К -	Rp .	К	Rp -		Rp -	К	Rp -	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen yang tersusun			293,542.402		-	Rp198.796.000		-	-	-		-	-	-		-	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen yang tersusun			224.983.811		-	Rp152.366.000		-	-	-		-	,	-		-	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah temu mitra yang terlaksana			279.573.755		-	Rp189.336.000		-	-	-		-		-		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,714079074	4.806.536.363		5,990838959	1.280.297.500		65.907.400	-	65.907.400	-	5,15	-	65.907.400	-	1,37	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	i	Jumlah Usaha Kecil yang dibina					30	1.280.297		65.907.400	-	65.907.400	-	5.147,82	-	65.907.400			
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Usaha Kecil yang dibina					30	1.280.297		65.907.400	-	65.907.400	-	5.147,82	-	65.907.400			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,74518201	7.967.004.066		50,32119914	2.122.138.400		421.173.800	-	421.173.800	-	19,85	-	421.173.800	-	5,29	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan						692.952		421.173.800	-	421.173.800		60.779,65	-	421.173.800			
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan						692.952		421.173.800	-	421.173.800		60.779,65	-	421.173.800			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332		100	3.245.457.000			-	-	-	-	-	•	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100			100			-	-	-	-			-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	480	11.196.717.332		0	2.271.242.250		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi (Orang)	Orang	45	534.060.283		0	12.000.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih (Orang)	Orang	300	479.287.279		0	2.130.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	Orang	1200	1.799.106.230		0	13.470.000		-	-	-		-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Benja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan (Orang)	Orang	6	971.920.387		0	227.257.250				-		-	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang difasilitasi	Lembaga	60	7.175.198.742		20	2.015.705.000	_		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	Orang	180	237.144.411		0	680.000		-	-	-		-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					131.453.832.370			35.057.051.711		745.081.200		745.081.200	-	2,13		745.081.200	-	0,57	
Sasaran :		Tingkat Pengangguran	%	3,17			3,3		3,97										
Menurunnya pengangguran terbuka PROGRAM PELATIHAN KERIA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Terbuka Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.780		16	829.654.400	0	9.154.200	-	9.154.200	-	1,10	-	9.154.200	-	0,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi		300	1.092.070.448		150	192.905.200	0	5.700.200	-	5.700.200	-	2,95	-	5.700.200	-	0,52	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri (Induk)		300	1.092.070.448		150	192.905.200	0	5.700.200	-	5.700.200	-	2,95	-	5.700.200	-	0,52	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai		40	147.454.000		20	23.454.000	0	3.454.000	-	3.454.000	-	14,73	-	3.454.000	-	2,34	
	Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi (Induk)		40	147.454.000		20	23.454.000	0	3.454.000	-	3.454.000	•	14,73	-	3.454.000	-	2,34	
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi (BLKDLN)		160	2.044.288.965		96	533.154.900	0	-	•	-	-	-	-	-	-		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri (BLK)		160	2.044.288.965		96	533.154.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal)		5	92.804.380		100	5.210.800	0	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal) (BLKDLN)		5	92.804.380		5	5.210.800	0	-	-		-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391.251.944		44,71	991.936.430	0	55.680.800	-	55.680.800	-	5,61	-	55.680.800	-	1,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		160	910.699.800		160	303.566.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.		160	910.699.800		160	303.566.600	0	-	1	•	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair		2000	388.974.000		1500	129.658.000	0	1.792.500	1	1.792.500	-	1,38	-	1.792.500	-	0,46	
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair		2000	388.974.000		1500	129.658.000	0	1.792.500	-	1.792.500	-	1,38	-	1.792.500	-	0,46	
Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.		27253	1.995.499.514		23460	514.633.200	0	53.888.300	-	53.888.300	-	10,47	-	53.888.300	-	2,70	
	Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani		1600	618.360.000		1900	94.120.000	0	1.934.200	-	1.934.200	-	2,06	-	1.934.200	-	0,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		lan Anggaran Renja Tahun Ing Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	rja Pada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan an Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir T	ia dan Anggaran ahun Pelaksanaan nja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Demodlers Investor To 1 2 1 2 1	Lumbels DAMING		K	Rp	K Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA		27500	1.033.252.214		21500	305.884.100	0	51.954.100	-	51.954.100	-	16,98	-	51.954.100	-	5,03	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan		253	343.887.300		60	114.629.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan		80	96.078.630		25	2.078.630	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan		80	96.078.630		25	2.078.630	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	1.025.630.908		21	299.995.600	5	51.372.100	5	51.372.100	23,81	17,12	5,00	51.372.100	21,74	5,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat / Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina		90	743.997.600		70	135.999.200	15	43.382.100	15	43.382.100	21,43	31,90	15,00	43.382.100	16,67	5,83	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang bina		90	447.631.500		70	70.710.500	8	26.412.100	8	26.412.100	11,43	37,35	8,00	26.412.100	8,89	5,90	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTripartit		11	296.366.100		11	65.288.700	7	16.970.000	7	16.970.000	63,64	25,99	7,00	16.970.000	63,64	5,73	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)		Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.		11	281.633.308		11	81.996.400	5	7.990.000	5	7.990.000	45,45	9,74	5,00	7.990.000	45,45	2,84	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan		11	281.633.308		11	81.996.400	5	7.990.000	5	7.990.000	45,45	9,74	5,00	7.990.000	45,45	2,84	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.656		21	1.013.941.600	2,00	44.046.000	2	44.046.000	9,52	4,34	2,00	44.046.000	8,70	1,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3		1070	3.466.483.654		650	799.742.000	23	44.046.000	23	44.046.000	3,54	5,51	23,00	44.046.000	2,15	1,27	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja D Perusahaan	i Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya (Induk)		90	269.601.295		20	53.858.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya di Pulau Lombok (UPTD BPKPL)		100	320.895.558		20	53.861.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya di Pulau Sumbawa (UPTD BPKPS)		20	232.905.050		20	53.624.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	lenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun rang Dievaluasi (2021)		rja Pada Triwulan I	Anggai Diev	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir Ta	ja dan Anggaran ahun Pelaksanaan nja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan		K 90	Rp 319.634.697	K Rp	K 20	Rp 68.492.700	K	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	
		Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya (Induk)																	
		Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerjanya di Pulau Sumbawa (UPTD BPKPS)		90	219.346.694		20	52.158.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya (Induk)		90	350.935.019		25	77.648.000	23	44.046.000	23	44.046.000	92,00	56,73	23,00	44.046.000	25,56	12,55	
		Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja yang diperiksa Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya di Pulau Lombok (UPTD BPKPL)		500	1.521.653.119		500	384.881.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja yang diperiksa Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya di Pulau Sumbawa (UPTD BPKPS)		90	231.512.222		25	55.217.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					11.365.358.289			3.135.528.030		160.253.100		160.253.100	8,79	5,11		160.253.100	6,62	1,41	
Misi NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujuda Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	n masyarakat madani yang beriman, berk	lndeks Kriminalitas	um yang berke Point	13,25			14,85												
Sasaran : Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%	0			16,67												
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.849		10	457.500.000	10	35.760.000	10	35.760.000	100,00	7,82	10,00	35.760.000	100,00	2,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan ideologi wawasan kebangsaan pada daerah rawan konflik	Orang	200	562.456.541		200	457.500.000,00	-	35.760.000	-	35.760.000	,	7,82	-	35.760.000	-	6,36	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideolog Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	ij Jumlah Tenaga Administrasi Non PNS	Orang	1	-		0	30.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000		16,67	1,00	5.000.000			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumah peserta pelaksanaan koordinasi di Bidang Wasbang	Orang	200	383.444.004		200	267.800.000,00	-	30.760.000	-	30.760.000	-	11,49	-	30.760.000	-	8,02	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	146.337.289		1	159.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Ro	enstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	rja Pada Triwulan I	Anggai	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir T	ja dan Anggaran ahun Pelaksanaan nja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	K 11,43	Rp 11.105.209.927	K Rp	K 10	Rp 3.328.089.000	К -	Rp 20.000.000	К -	Rp 20.000.000	-	0,60	К -	Rp 20.000.000	К -	Rp 0,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan	Orang	85	3.191.596.561		50	3.328.089.000,00	=	20.000.000	-	20.000.000	-	0,60	-	20.000.000	-	0,63	
Current garrant retirms about	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jejaring Deteksi Dini	Orang	85	855.085.702		50	1.427.580.000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Mediasi Konflik	Kali	20	303.454.832		20	246.829.000,00	÷	-	-			-	-			-	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	125.732.088		1	102.270.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	19,56	1,00	20.000.000	100,00	15,91	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rekomendasi	6	1.907.323.939		6	1.551.410.000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798		100	87.426.891.700	0,62	7.549.215.500	1	7.549.215.500	0,62	8,63	0,62	7.549.215.500	0,62	2,58	Biro Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali)		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual		2385	100.348.573.728		790	28.240.421.700,00	5	51.755.000	5	51.755.000	0,63	0,18	5,00	51.755.000	0,21	0,05	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		2370	89.954.926.705		785	25.527.153.700,00	4	51.755.000	4	51.755.000	0,51	0,20	4,00	51.755.000	0,17	0,06	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi		5	10.393.647.022		5	2.713.268.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar		45	190.236.028.124		15	55.074.371.100,00	-	7.474.175.200	-	7.474.175.200	-	13,57	-	7.474.175.200	-	3,93	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		12	186.708.519.065		4	54.509.775.500,00	-	7.447.614.000	-	7.447.614.000	-	13,66	-	7.447.614.000	-	3,99	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renja	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pa	ada Triwulan I	Anggar	apaian Kinerja dan ran Renja yang	Tingkat Capaian Realisasi Angga	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan	Tingkat Capaian R	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Jan Neglatan	outcome)	Juliani			Thn Lalu	Derjaidir	, ,			Diev	aluasi (2021)	Tahun 202	1 (%)	R	enja)	s/d Tahun 20	023 (%)	J. D. C. C. C. C. Saulis Jawai
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		K 24	Rp 3.025.514.118	K Rp	K 8	Rp 502.705.000,00	К -	Rp 21.646.000	-	Rp 21.646.000	K -	4,31		Rp 21.646.000	-	0,72	
		Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial		9	501.994.941		3	61.890.600,00	-	4.915.200	-	4.915.200	·	7,94	-	4.915.200	-	0,98	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		9	2.058.471.946		3	243.536.900,00	-	23.285.300	-	23.285.300	-	9,56	-	23.285.300	-	1,13	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		3	855.856.277		1	120.751.400,00	-	15.225.300	-	15.225.300	-	12,61	-	15.225.300	-	1,78	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		3	424.296.999		1	40.848.400,00	-	2.277.700		2.277.700		5,58	-	2.277.700	-	0,54	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		3	778.318.670		1	81.937.100,00	-	5.782.300	•	5.782.300	-	7,06	-	5.782.300	-	0,74	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519.090.462		60	6.798.099.800		899.996.000	-	899.996.000	-	13,24	-	899.996.000	-	3,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan da Pencatatan Sipil
		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-		14,43				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-		60				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-		47,86		İ		-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir f	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capa Kin. Renstr sampai dg Re Thn Lalu	Target Kinerja	ı dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian I nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					24.613.751.414			6.798.099.800,00		899.996.000	-	899.996.000		13,24	-	899.996.000	-	3,66	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				754.912.008			208.500.000,00		149.996.000	-	149.996.000		71,94	-	149.996.000	-	19,87	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.149.034.094			1.974.499.800,00		750.000.000	-	750.000.000		37,98	-	750.000.000	-	10,49	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				15.985.669.094			4.415.100.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				724.136.219			200.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759		63,64	1.975.050.900		118.840.600	-	118.840.600	-	6,02	-	118.840.600	-	1,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					913.426.285			258.233.000,00		68.840.600	-	68.840.600		26,66	-	68.840.600	-	7,54	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				464.992.000			131.457.000,00		41.840.600	-	41.840.600		31,83	-	41.840.600	-	9,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				448.434.285			126.776.000,00		27.000.000	-	27.000.000		21,30	-	27.000.000		6,02	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										50.000.000	-	50.000.000			-	50.000.000	-		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									50.000.000		50.000.000			-	50.000.000	-		
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					901.771.154			254.938.000,00		-		-		-	-	-	-		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				63.450.607			17.938.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				194.546.962			55.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				643.773.584			182.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-]	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	* *****	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736		100	389.516.700			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.426.928.736			389.516.700,00			-	-		-	-	-	-	-	
and our nadapately NOID	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				1.426.928.736			389.516.700,00			-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541		100	164.312.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	tenstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Cap Kin. Renst sampai dg R Thn Lalu	tra Target Kinerja Berjalan	dan Anggaran Renja Tahun rang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Iraluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angga Tahun 202	ran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Benja)	Tingkat Capaian k nealisasi Anggan s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp		Rp K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					719.796.541			164.312.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				78.580.447			17.938.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				641.216.094			146.374.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan	T CHIDITIANT SCJAFATI				337.626.326.533			100.375.148.100		8.623.812.100		8.623.812.100	6,96	8,59		8.623.812.100	4,57	2,55	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07			5,41												
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	11.445.268.038		100	2.864.180.600	100	186.132.400	100	186.132.400	100,00	6,50	100,00	186.132.400	100,00	1,63	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100			100				-	-	-		-	-	-		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	5.810.081.702		17	1.415.276.100	3	176.352.300	3	176.352.300	17,65	12,46	3,00	176.352.300	20,00	3,04	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	36	2.401.255.636		12	562.216.700	3	72.144.700	3	72.144.700	25,00	12,83	3,00	72.144.700	8,33	3,00	
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah				10				-	-			-	-			
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan				10				-	-	-		-	-			
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						10			8.770.000	-	8.770.000			-	8.770.000			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			15	1.008.191.008		17	252.300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	7	287.369.602		2	71.914.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			450	678.041.819		400	169.680.100		84.017.800	-	84.017.800	-	49,52	-	84.017.800	-	12,39	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			2060	1.027.900.882		675	257.232.400		11.419.800	_	11.419.800	-	4,44	-	11.419.800	-	1,11	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						50			-	-	-	-		-	-			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah			3	199.508.733		1	49.927.100	-	9.780.100	-	9.780.100 6.618.100	-	19,59	-	9.780.100		4,90	
	dan Peraturan Gubernur			6	_				_	6.618.100	_	0.018.100			-	6.618.100	_		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu	Berjalan y	dan Anggaran Renja Tahun _Y ang Dievaluasi (2021)		rja Pada Triwulan I	Anggar Dieva	apaian Kinerja dan an Renja yang aluasi (2021)	Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja 21 (%)	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna 023 (%)	OPD Penanggung Jawab
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap			K 2	Rp -	K Rp	К	Rp	K -	Rp 3.000.000	К -	Rp 3.000.000	К	Rp	К -	Rp 3.000.000	К -	Rp	
	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			36	207.814.021		12	52.005.500		162.000	-	162.000	-	0,31	-	162.000	-	0,08	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				120	458.447.988		40	114.726.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									-	-	-			-	-			
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS			5	199.799.242		1	49.999.800		-	-	-	-	-	•	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.436.780.947		51,72	730.272.000		92.325.000	-	92.325.000	-	12,64	-	92.325.000	-	3,79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar	Desa	10	848.629.511		10	730.272.000,00		92.325.000	-	92.325.000	-	12,64	-	92.325.000	-	10,88	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	i Tim Terpadu P4GN	Orang	26	354.342.992		26	124.542.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Lembaga	2	-		2	40.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung madani	Desa	2	253.260.060		2	368.680.000,00		92.325.000	-	92.325.000	-	25,04	-	92.325.000	-	36,45	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	24.102.645.863		1	196.050.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.727.596.770		100	1.711.115.100			-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100			100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100			100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada	%	100			100				-	-	-		-		-		Biro Hukum
		masyarakat Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100			100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100			100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capai Kin. Renstra sampai dg Rer Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Iraluasi (2021)	Tingkat Capaian Ki Realisasi Anggara Tahun 2021	an Renja	Renstra (Akhir T	rja dan Anggaran Fahun Pelaksanaan enja)	Tingkat Capaian K nealisasi Anggana s/d Tahun 20	an nenstna	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100			100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah		100	3.900.653.457			781.485.600	286	173.700.400	286	173.700.400		22,23	286,00	173.700.400	-	4,45	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	30	937.240.588		10	186.199.900	3	46.590.000	3	46.590.000	30,00	25,02	3,00	46.590.000	10,00	4,97	
			Pergub	90			30		11		11		36,67		11,00		12,22		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept.Gub	2100	468.619.123		700	85.094.400	181	31.970.400	181	31.970.400	25,86	37,57	181,00	31.970.400	8,62	6,82	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan ersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda /Pergub	132	1.222.824.592		44	221.188.900	14	51.832.000	14	51.832.000	31,82	23,43	14,00	51.832.000	10,61	4,24	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	75	-		25				-	-	-		-	-	-		
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan Terevaluasi	Perda	150	1.271.969.154		50	289.002.400	15	43.308.000	15	43.308.000	30,00	14,99	15,00	43.308.000	10,00	3,40	
			Perbup/ Perwal	300			100		51		51		51,00		51,00		17,00		
Bantuan Hukum dan HAM		Terlaksananya fasilitasi penanganan kasus-kasus hukum		100	1.826.943.313		100	344.099.050	23,75	73.029.700	24	73.029.700	23,75	21,22	23,75	73.029.700	23,75	4,00	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	Perkara	12	904.765.525		4	160.098.000	4	17.328.000	4	17.328.000	100,00	10,82	4,00	17.328.000	33,33	1,92	
	Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	- Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	12	922.177.788		4	184.001.050	1	55.701.700	1	55.701.700	25,00	30,27	1,00	55.701.700	8,33	6,04	
		-Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	9	-		3		0		-	-	-		-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					19.609.645.754			5.305.567.700		278.457.400		278.457.400	12,42	5,25		278.457.400	6,72	1,42	
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	85,2			83,74												
Sasaran : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1			0,8												
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528.305.431		80	4.653.634.000	20	54.345.200	20	54.345.200	25,00	1,17	20,00	54.345.200	20,00	0,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Parpol peserta Pemilu yang melaksanakan kegiatan kaderisasi	Parpol	12	33.671.239.086		12	4.653.634.000,00	-	54.345.200	-	54.345.200	-	1,17	-	54.345.200	-	0,16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir R	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Renj Thn Lalu	Target Kinerja	dan Anggaran Renja Tahun ang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	Capaian Kinerja dan Iran Renja yang Valuasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 202	aran Renja	Renstra (Akhir	nerja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Anggar s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang difasilitasi	Parpol	К 12	Rp 33.148.535.457	K Rp	K 12	Rp 4.200.000.000,00	К -	Rp -	-	Rp -	к -	Rp -	К -	Rp -	к -	Rp -	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Orang	60	279.641.098		60	227.459.000,00	-	9.385.200	-	9.385.200	-	4,13	-	9.385.200	-	3,36	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	278.062.531		1	226.175.000,00	-	44.960.000	-	44.960.000	-	19,88	-	44.960.000		16,17	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631.097.489		79,66	488.819.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa da Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	Ormas	50	1.600.137.061		50	488.819.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas dan Lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	8	1.368.000.489		2	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	Orang	165	172.786.649		165	140.544.000,00	-	-	-	-	·	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	59.349.922		1	48.275.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					45.159.402.920			5.142.453.000		54.345.200		54.345.200	12,50	1,06		54.345.200	10,00	0,12	
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,4			59,81												
Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47			18,6												
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100			60												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231.111.760		52,17	1.769.040.900			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir I	Renstra OPD pada Tahun 2023	Realisasi Ca Kin. Rens sampai dg F Thn Lal	tra Target Kinerja tenja Berjalan	dan Anggaran Renja Tahun yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kine	rja Pada Triwulan I	Angga	apaian Kinerja dan ran Renja yang aluasi (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Angg Tahun 20	aran Renja	Renstra (Akhir	erja dan Anggaran r Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian nealisasi Angga s/d Tahun 2	nan nenstna	OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	К		Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah					43,7	1.739.129.900			-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB					30	1.608.226.700			-	-	-	-	-	-			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB					45	130.903.200			-	-	-	-	-	-			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik					38,2	29.911.000			-	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Parpol Ikut FGD					25	29.911.000			-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	1.876.538.872		75,52	805.507.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					285.696.385		237	81.110.500		-	-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan			285.696.385		237	81.110.500		-	-	-	-	-	-	-			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										-	-	-			-	-		-	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									-	-				-	-		-	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					1.590.842.487		15	451.647.400		-	-		-	-	-	-		-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek			1.238.611.766		30	351.647.500		-	-	-	-	-	-	-			
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.			352.230.722		500	99.999.900		-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.340.778.150		5	380.653.000		12.820.000	-	12.820.000	-	3,37	-	12.820.000	-	0,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga					3	380.653.000		12.820.000	-	12.820.000	-	3,37	-	12.820.000			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih					60	263.143.000		12.820.000	-	12.820.000	-	4,87	-	12.820.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capa Kin. Renstr sampai dg Re Thn Lalu	a Target Ki	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		inenja dan un nenstna 23 (%)
				K	Rp	K R	p K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA					50	117.510.000		-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender		1	200.537.840		1	34.997.400		-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Data Gender dan Anak			200.537.840		60	34.997.400		-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak			200.537.840		60	34.997.400		-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42	1.490.733.752		80	360.562.500		-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana
		Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%							-	-	-			-	-		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					1.490.733.752		80	360.562.500		-	-	-	-	-	-	-		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				706.027.216		80	170.766.200		-	-	-	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				784.706.536		80	189.796.300		-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.001.008.091			517.931.700		-	-	-		-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%									-			-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaia Kin. Renstra sampai dg Ren Thn Lalu	Target Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Kinenja dan an nenstna 023 (%)	OPD Penanggung Jawab
				К	Rp	K Rp		Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					432.470.145		100	109.237.000,00					-	-	-	-			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				432.470.145			109.237.000,00				-		÷	-	-			
					1.568.537.945			396.194.700,00				-		-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang			1.169.138.976		72	295.311.100,00					-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak			399.398.969		400	100.883.600,00			-	-	-	-	-	-			
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					13.140.708.464			3.868.693.400		12.820.000	l e	12.820.000	-	0,33		12.820.000	-	0,10	

Mataram, Mei 2021 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si Pembina Utama Madya NIP: 19651231 199403 1 153